

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek Geografi dan Demografi memberikan gambaran permasalahan/tantangan, kelemahan, kekuatan, potensi dan peluang dari kondisi geografis dan demografis saat ini dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

2.1.1 Aspek Geografi

a. Kondisi Geografi

1. Wilayah Administratif

Provinsi Kalimantan Timur terletak diantara 113°35'31"–119°12'48" Bujur Timur dan 2°34'23" Lintang Utara – 2°44'17" Lintang Selatan, memiliki luas wilayah 16.732.065 ha terdiri dari daratan seluas 12.638.931 Ha (75,68%) dan perairan laut seluas 3,3 juta Ha (2,59 %). Secara administratif terdiri dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang meliputi 7 (tujuh) Kabupaten, yaitu seperti tabel berikut :

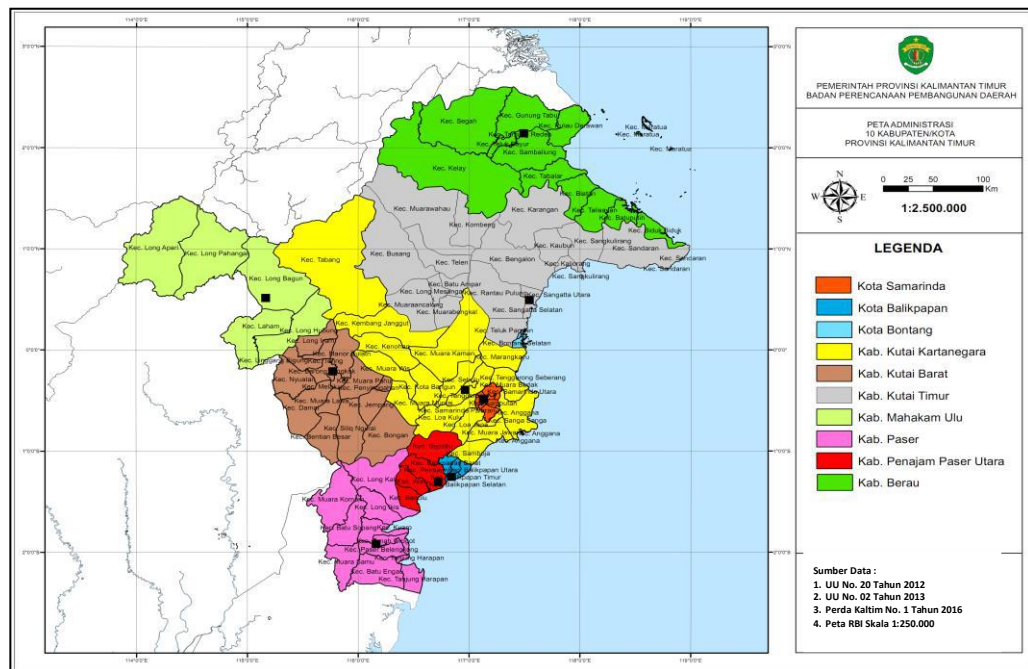
Tabel 2.1
Kode Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota Kalimantan Timur

Kode Wilayah	Nama Provinsi/Kabupaten/Kota
64	Kalimantan Timur
64.01	Kabupaten Paser
64.02	Kabupaten Kutai Kartanegara
64.03	Kabupaten Berau
64.07	Kabupaten Kutai Barat
64.08	Kabupaten Kutai Timur
64.09	Kabupaten Penajam Paser Utara
64.11	Kabupaten Mahakam Ulu
64.12	Kota Balikpapan
64.72	Kota Samarinda
64.74	Kota Bontang

Sumber : Ditjen Kependudukan dan catatan Sipil Kemendagri

Paser, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, Penajam Paser Utara dan Mahakam Ulu; dan 3 (tiga) Kota, yaitu: Balikpapan, Samarinda dan Bontang.

Gambar 2. 1
Peta Administratif Provinsi Kalimantan Timur



Sumber : Bappeda Provinsi Kaltim, 2016)

Secara geostrategis, posisi Kalimantan Timur memiliki potensi dalam perdagangan internasional berada di tengah-tengah wilayah NKRI dan sangat strategis sebagai jalur transportasi laut internasional karena berbatasan langsung dengan wilayah perairan Selat Makasar dan Laut Sulawesi yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II).

Gambar 2. 2
Peta Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)



Sumber : Bappeda Provinsi Kaltim

2. Kondisi Fisik Wilayah

Karakteristik topografi wilayah Kalimantan Timur didominasi oleh lahan-lahan dengan kelerengan di atas 15 persen. Kondisi demikian mempunyai pengaruh sangat besar dalam rangka pemanfaatan lahan kegiatan budidaya. Lahan datar (0-2%) di Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya hanya terdapat di daerah pantai dan daerah aliran sungai-sungai besar yang luasnya sekitar 10,70 persen dari total wilayah. Sedangkan lahan dengan tingkat kelerengan landai (2-15%) luasnya mencapai 16,16 persen. Sisanya, lahan berbukit dengan tingkat kelerengan > 15% dengan luasnya mencapai sekitar 73,14 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Pengembangan tanaman pangan hanya mungkin dilakukan di daerah yang datar hingga landai atau wilayah dengan kemiringan 0-15 persen. Sedangkan lahan dengan tingkat kelerengan yang lebih tinggi (>15 persen) hanya cocok untuk tanaman tahunan dan kawasan konservasi.

Berdasarkan ketinggian tempat di atas permukaan laut, 51,51 persen lahan di Provinsi Kalimantan Timur mempunyai ketinggian di bawah 100 mdpl. Sedangkan luas lahan yang terletak pada ketinggian antara 100 dan 500 mdpl mencapai 26,94 persen. Selebihnya terletak pada ketinggian di atas 500 mdpl sekitar 21,55 persen. Berdasarkan data ketinggian tempat tersebut, wilayah Provinsi Kalimantan Timur sekitar 21,55 persen termasuk daerah yang berhawa sejuk dengan ketinggian di atas 500 mdpl. Wilayah yang suhunya relatif lebih rendah ini cocok untuk tempat pengembangan tanaman hortikultura, terutama sayuran dan buah-buahan.

Jenis tanah di wilayah daratan Provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh tanah podsolik merah kuning latosol dan litosol yang tersebar di bagian Tengah dan Utara Provinsi Kalimantan Timur. Jenis tanah lainnya adalah aluvial, organosol, latosol, podsol, dan podsolik merah kuning dengan tingkat kesuburan yang rendah. Jenis tanah ini sesuai untuk usaha pertanian, kebun campuran, pertanian sayur-sayuran, dan hutan.

Jumlah sungai yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 157 sungai besar dan kecil di antaranya adalah Sungai Mahakam yang memiliki panjang 920 km dengan luas Daerah Pengaliran Sungai (DPS) 77.913 km². Terdapat juga Sungai Kelay dengan panjang 254 km. Sedang jumlah danau yang ada sebanyak 18 (delapan belas) buah, dengan 3 (tiga) danau terbesar adalah Danau Melintang seluas 11.000 Ha, Danau Semayang seluas 13.000 Ha dan Danau Jempang seluas 15.000 Ha.

Selain dimanfaatkan sebagai prasarana transportasi dan sumber air baku, sungai-sungai tersebut juga dapat digunakan sebagai Pembangkitan Listrik Tenaga Air (PLTA) seperti Sungai Kelay, Sungai Telen, dan Sungai Medang. Sungai-sungai di Provinsi Kalimantan Timur dikelompokkan dalam 6 (enam) Satuan Wilayah Sungai (SWS), yaitu SWS Mahakam (Strategis Nasional) yang terdiri dari Sungai-sungai Besar antara lain Sungai Mahakam, Samboja, Senipah, dan Semoi; SWS Berau-Kelay (Lintas Kabupaten) yang terdiri dari sungai-sungai besar antara lain Sungai Kuning, Bakau, Berau, Pangkung, dan Sungai Pantai; SWS Karangan (Lintas Kabupaten) yang terdiri dari sungai-sungai besar antara lain Sungai Karangan, Sangatta, Bengalon, dan Santan.

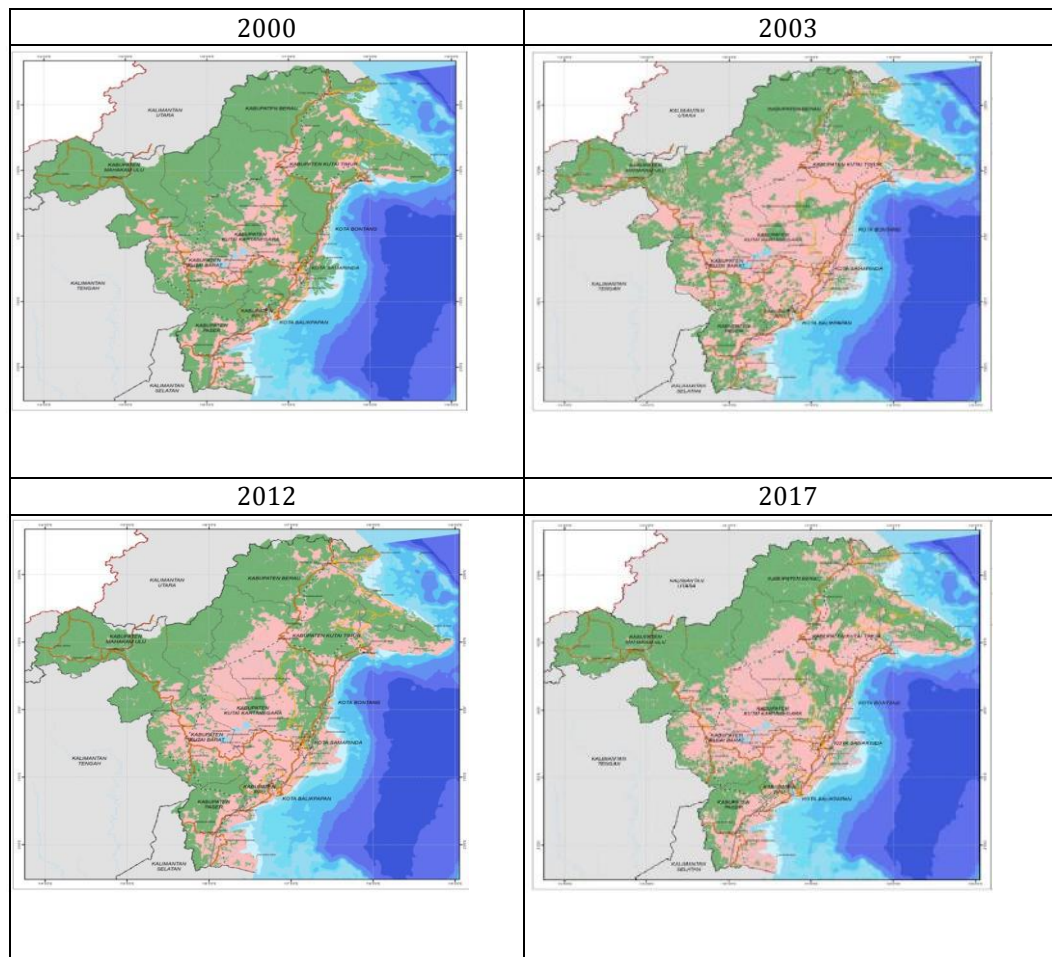
Provinsi Kalimantan Timur beriklim tropis dengan suhu udara berkisar dari 20,8°C sampai dengan 35,6°C, dan mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober, sedang musim penghujan terjadi pada bulan November sampai dengan bulan April. Selain itu, karena letaknya di daerah khatulistiwa maka iklim di Provinsi Kalimantan Timur juga dipengaruhi oleh angin Muson, yaitu angin Muson Barat (November-April) dan angin Muson Timur (Mei-Oktober). Namun dalam beberapa tahun terakhir ini, keadaan musim di Provinsi Kalimantan Timur kadang tidak menentu. Pada bulan-bulan yang seharusnya turun hujan dalam kenyataannya tidak ada hujan sama sekali, atau sebaliknya pada bulan-bulan yang seharusnya kemarau justru terjadi hujan dengan musim yang jauh lebih panjang. Provinsi Kalimantan Timur mempunyai kelembaban udara relatif tinggi dengan rata-rata berkisar antara 83-87 persen dan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 3-4 knot.

3. Kondisi Tutupan Lahan

Kondisi tutupan lahan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017 (diolah berdasarkan data citra satelit) telah terjadi deforestasi yang sangat luas hingga mencapai lebih dari 176 ribu Ha per tahun. Deforestasi menjadi salah satu isu degradasi lingkungan di Kalimantan Timur. Kondisi tutupan hutan di Kalimantan Timur mengalami penurunan dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2017, dimana luas tutupan hutan di tahun 2000 adalah seluas $\pm 9,28$ Juta Hektare, kemudian turun di tahun 2003 menjadi $\pm 7,21$ Juta Hektare. Selanjutnya di tahun 2012 tutupan hutan

di Kalimantan Timur kembali turun menjadi seluas $\pm 7,19$ Juta Hektare, dan terus menurun menjadi seluas $\pm 6,28$ Juta Hektare di tahun 2017. Wilayah yang paling luas deforestasinya sepanjang tahun 2000 sampai dengan 2017 adalah di Kabupaten Kutai Timur (± 911 ribu Ha) dan Kutai Kartanegara (± 797 ribu Ha).

Gambar 2. 3
Peta Perubahan Tutupan Lahan Provinsi Kalimantan Timur 2000-2017



Sumber : One Data One Map, Bappeda Prov.Kaltim

Saat ini kondisi tutupan lahan didominasi oleh Hutan Lahan Kering Primer seluas 2,17 Juta Ha, Hutan Lahan Kering Sekunder dengan luasan 3,89 Juta Ha dan Semak Belukar dengan luasan 2,71 Juta Ha, yang tersebar di Kabupaten Berau, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kabupaten Mahulu, dan Kabupaten Paser. Kondisi lahan terbuka untuk kegiatan pertambangan seluas 130.789 Ha, tersebar di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Kutai Timur. Sementara untuk tutupan lahan yang telah ditanami komoditi perkebunan teridentifikasi seluas 1,33 Juta Ha yang tersebar hampir di seluruh kabupaten/kota. Sedangkan untuk kelas

tutupan lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang meliputi sawah, pertanian lahan kering, dan pertanian lahan campuran hanya seluas 494.293 Ha.

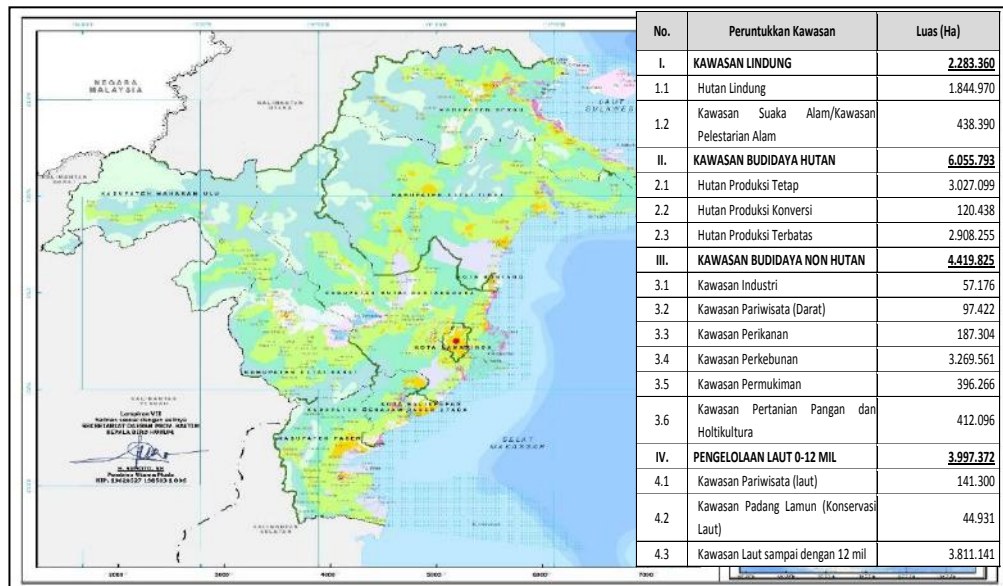
Ketersediaan sumber daya lahan yang produktif menjadi salah satu permasalahan dalam pengembangan komoditas pertanian di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur memiliki lahan dengan kategori Kritis seluas \pm 820 ribu Ha (6,50 %), lahan kategori Agak Kritis seluas 6,95 Juta Ha (55,15 %), kategori lahan Potensial Kritis seluas \pm 3,1 Juta Ha (25,18 %). Sementara itu lahan dengan kategori Sangat Kritis di Kalimantan Timur seluas \pm 36.500 Ha (0,29 %), sedangkan lahan yang masuk kategori Tidak Kritis adalah seluas \pm 1,62 Juta Ha (12,88 %). Lahan kategori Sangat Kritis tersebar hampir di seluruh wilayah kabupaten/kota di Kalimantan Timur, dan areal yang paling luas berada di wilayah Kabupaten Kutai Timur, Berau, dan Kabupaten Paser.

b. Potensi Pengembangan Wilayah

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Potensi sumber daya lahan di Kalimantan Timur telah dialokasikan berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036, terdiri dari kawasan yang diperuntukan bagi kawasan lindung seluas 2.283.360 ha (18,03%), kawasan budidaya hutan seluas 6.055.792 Ha (47,82%) dan kawasan budidaya non hutan seluas 4.299.799 ha (34,15%). Kawasan non hutan terdiri dari kawasan permukiman sebesar 2,37% (396.266 Ha), kawasan industri sebesar 0,34% (57.176 Ha), kawasan pariwisata sebesar 0,58% (97.422 Ha) serta perkebunan dan pertanian pangan dan hortikultura yang mencapai 22,55% (3.773.204 Ha) terhadap luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Gambar 2. 4
Peta Rencana Pola Ruang dalam RTRWP Kaltim 2016-2036



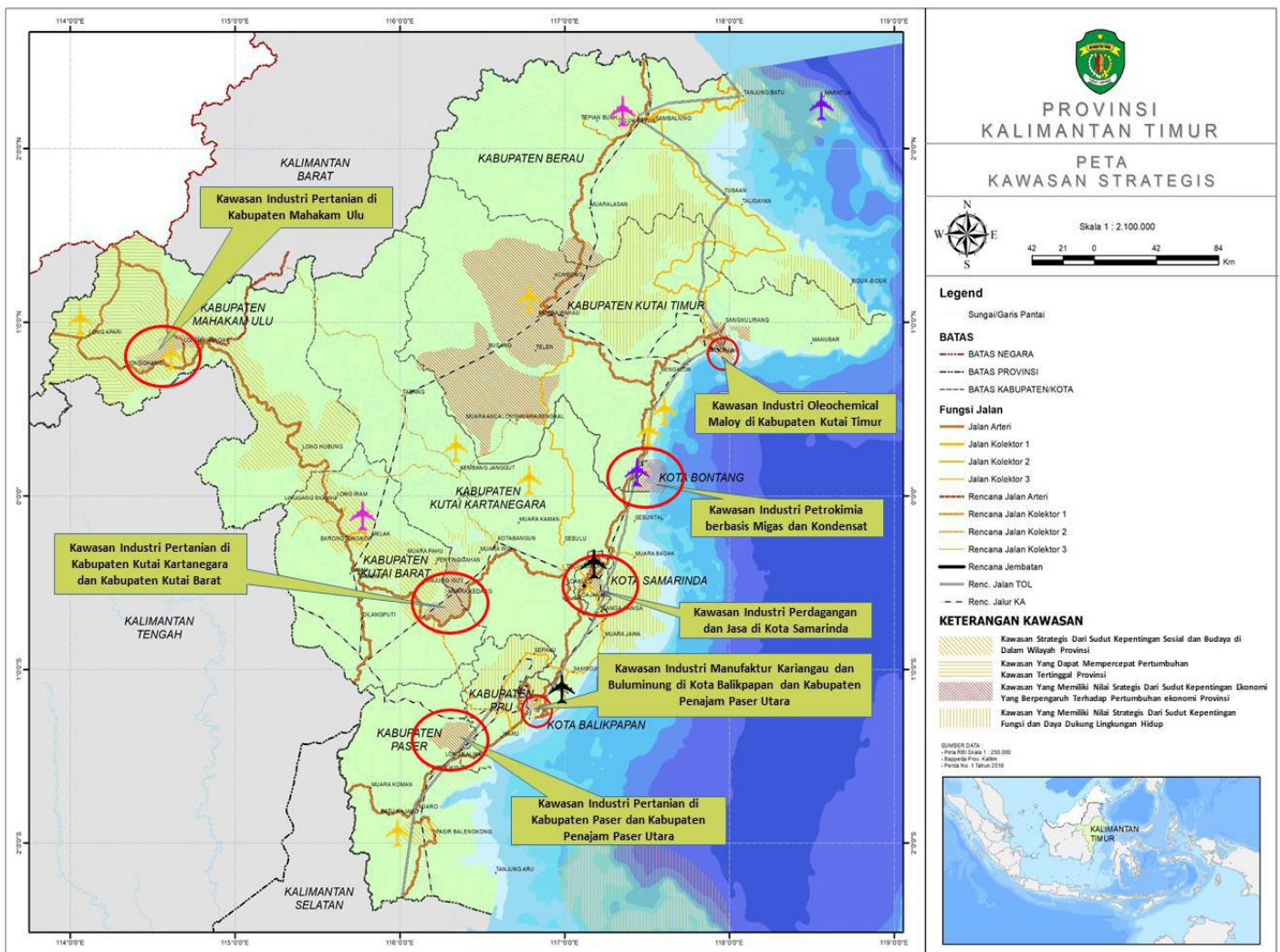
Sumber : Perda No. 1 Tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kaltim Tahun 2016-2036, Dinas PUPRPERA Provinsi Kalimantan Timur, 2016

Disamping itu, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 telah dikembangkan struktur ruang yang dilengkapi dengan jaringan infrastruktur untuk mendukung pengembangan sektor unggulan daerah pada kawasan strategis dan kawasan pusat kegiatan ekonomi daerah. Dalam mendukung kebijakan nasional, tidak hanya melihat pertumbuhan ekonomi namun juga pengembangan wilayah dengan mendukung fungsi lingkungan secara berkelanjutan, telah ditetapkan kawasan strategis provinsi dengan melihat nilai strategis penting dalam lingkup wilayah provinsi serta potensi dan pengaruh terhadap daerah sekitarnya, yaitu:

- 1) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi meliputi:
 - Kawasan industri dan Pelabuhan Maloy di kabupaten Kutai Timur;
 - Kawasan agropolitan regional di kabupaten Kutai Timur; dan
 - Kawasan pusat pertambangan regional (klaster pertambangan) di kabupaten Kutai Timur.
- 2) Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal provinsi terdapat di Kabupaten Kutai Barat.
- 3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya di dalam wilayah provinsi meliputi:

- Koridor Sungai Mahakam hingga ke hulu;
 - Museum Mulawarman, Museum Kayu Tenggarong, dan Bukit Bangkirai di Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
 - Desa budaya Pampang di Kota Samarinda.
- 4) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di dalam wilayah provinsi meliputi:
- Kawasan Delta Mahakam;
 - Kawasan Danau Semayang, Danau Jempang, Danau Melintang, Danau Siran, dan sekitarnya;
 - Kawasan Teluk Balikpapan (Sepaku-Penajam-Balikpapan); dan
 - Kawasan Pesisir dan Laut Kepulauan Derawan.

Gambar 2.5
Peta Struktur Ruang dan Kawasan Strategis Provinsi Kaltim 2016-2036



Sumber : Perda No. 1 Tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kaltim Tahun 2016-2036, Dinas PUPRPERA Provinsi Kalimantan Timur, 2016

2. Potensi Pengembangan Kawasan

Berdasarkan deskripsi kondisi fisik wilayah, Provinsi Kalimantan Timur memiliki kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki daya tarik investasi yang cukup besar. Selaras dengan hal tersebut, sebagian besar penggunaan lahan di Kalimantan Timur didominasi oleh investasi dari sektor-sektor yang memiliki keterkaitan dengan pemanfaatan ruang, baik izin dari sektor pertambangan dan penggalian, sektor kehutanan, maupun sektor perkebunan. Pemanfaatan ruang terbesar untuk perizinan adalah dari sektor kehutanan yakni seluas $\pm 5,6$ Juta Ha. Kemudian dari sektor pertambangan batubara seluas $\pm 4,8$ Juta Ha, dan selanjutnya dari sektor perkebunan seluas $\pm 2,4$ Juta Ha. Tingginya intensitas penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk kegiatan perizinan di Kalimantan Timur pada akhirnya juga menyebabkan tumpang tindih perizinan antar sektor, baik izin pertambangan batubara dengan izin kehutanan, izin perkebunan dengan izin pertambangan batubara, maupun tumpang tindih perizinan lainnya.

Total luas Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Hasil Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) di Kalimantan Timur adalah $\pm 3,79$ Juta Ha, dimana seluas $\pm 2,9$ Juta Ha kondisinya masih berupa hutan (hutan lahan kering primer dan sekunder, hutan rawa primer dan sekunder) dan masih memiliki potensi kayu alam, sedangkan seluas ± 892 ribu Ha kondisi tutupan lahannya sudah bukan lagi hutan dan tidak memiliki potensi kayu alam (berupa belukar rawa, semak belukar, perkebunan, permukiman, pertambangan, pertanian, dan lain-lain).

Sementara total luasan untuk IUPHHK Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Kalimantan Timur adalah seluas $\pm 1,57$ juta Ha, dimana seluas ± 638 ribu Ha kondisi tutupan lahannya masih berupa hutan, sedangkan seluas ± 940 ribu Ha kondisi tutupan lahannya sudah bukan lagi hutan. IUPHHK-HA paling luas berada di Kabupaten Berau seluas ± 848 ribu Ha, sedangkan IUPHHK-HT paling luas berada di Kabupaten Kutai Kartanegara seluas ± 508 ribu Ha.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan investasi di Kalimantan Timur adalah terkait dengan optimalisasi pemanfaatan lahan. Di sektor perkebunan, dari seluas $\pm 2,76$ Juta Ha total luas seluruh izin perkebunan di

Kalimantan Timur, baru sekitar $\pm 1,32$ Juta Ha atau 48% yang telah terdapat tanam tumbuh, berarti masih ada ± 52 % luas wilayah izin perkebunan yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Sektor perkebunan telah dikembangkan menjadi salah satu sektor perekonomian unggulan di Kalimantan Timur. Sampai dengan tahun 2018 terdapat $\pm 2,76$ Juta Ha Izin Perkebunan di Kalimantan Timur yang terdiri dari Hak Guna Usaha (HGU) dan Izin Lokasi. Total luasan HGU kebun di Kalimantan Timur adalah seluas $\pm 1,02$ Juta Ha, dimana dari seluruh luasan HGU tersebut setelah diidentifikasi melalui citra satelit, baru ± 650 Ribu Ha yang kondisi eksistingnya sudah tanam tumbuh, sementara sisanya belum terlihat produktif. Sedangkan untuk izin perkebunan yang statusnya dibawah HGU, luasan yang teridentifikasi adalah $\pm 1,74$ Juta Ha, dimana penampakan eksisting yang sudah tanam tumbuh seluas ± 461 Ribu Ha. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pemanfaatan lahan izin perkebunan belum optimal dan perlu ditingkatkan untuk mendukung peningkatan kontribusi terhadap PDRB Kaltim.

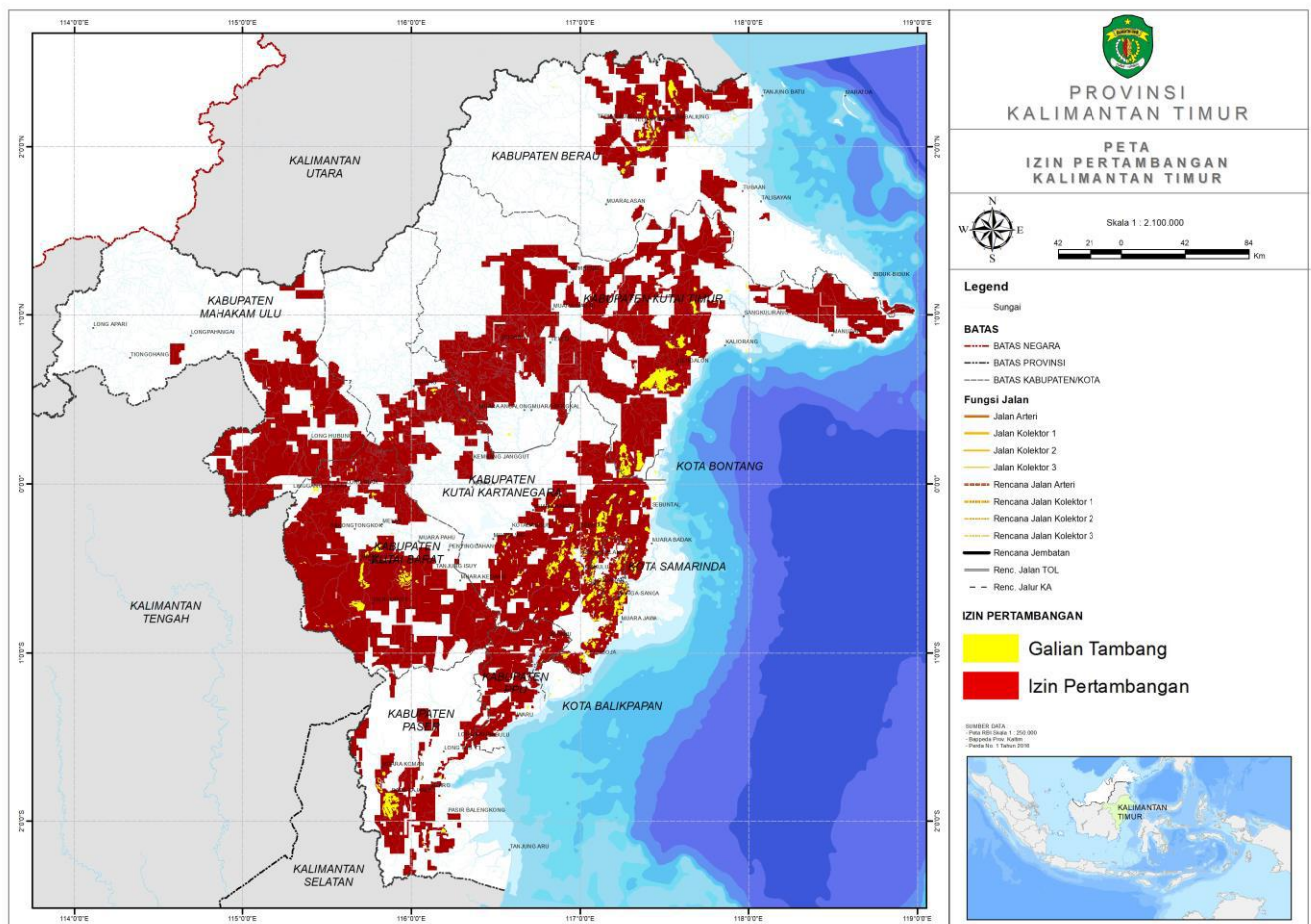
Upaya mewujudkan swasembada pangan di Kalimantan Timur memiliki keterkaitan erat dengan ketersediaan sumber daya lahan yang sesuai untuk kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, peruntukan lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura seluas 412.016 Ha, namun hanya dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian ± 42.546 Ha atau 10,3 % yang kondisi eksistingnya berupa sawah, pertanian lahan kering, dan pertanian lahan campuran. Masih terdapat lahan seluas ± 369.470 Ha yang belum dimanfaatkan untuk pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Areal ini selanjutnya menjadi lahan potensial untuk dikembangkan sesuai dengan arahan pola ruang dalam RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036. Oleh karena itu, dibutuhkan insentif program/kegiatan agar potensi ruang yang telah disediakan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dalam satu dekade terakhir, sektor pertambangan khususnya batubara, menjadi sektor ekonomi utama pembentuk struktur PDRB Provinsi Kalimantan Timur. Luas izin usaha pertambangan di Kalimantan Timur yang memiliki status CnC (clean and clear) mencapai $\pm 4,6$ Juta Ha. Luas izin usaha pertambangan (IUP) terbesar ada di Kabupaten Kutai Timur seluas $\pm 1,4$ Juta Ha, selanjutnya di Kabupaten

Kutai Barat seluas ± 957 ribu Ha dan Kutai Kartanegara seluas ± 937 ribu Ha. Luasan IUP ini letaknya tersebar baik di dalam kawasan hutan melalui mekanisme pinjam pakai kawasan hutan, maupun yang berada di areal peruntukan lain. Kawasan pertambangan ini masih menyisakan persoalan semakin meluasnya lubang bekas galian tambang. Dari hasil interpretasi citra satelit resolusi tinggi tahun 2017, diketahui bahwa bukaan lubang tambang yang ada di Kalimantan Timur telah mencapai ± 130 ribu Ha atau hanya 2,7 % dari total luas IUP yang diberikan.

Sektor perikanan menjadi salah satu sektor potensial yang akan dikembangkan untuk mempercepat upaya transformasi ekonomi daerah, terlebih dengan adanya keunggulan komparatif berupa luasnya wilayah kewenangan wilayah laut dan pesisir sejauh 0 sampai dengan 12 mil dengan luas ± 4 Juta Ha.

Gambar 2. 6
Peta Kawasan Pertambangan Migas dan Batu Bara



Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov.Kaltim

Wilayah pesisir laut Kaltim sepanjang 1.583 km telah direncanakan alokasi ruang untuk perikanan tangkap pelagis seluas $\pm 1,5$ Juta Ha, ikan pelagis dan demersal seluas ± 605 ribu Ha, ikan demersal seluas ± 8 ribu Ha, dan untuk budidaya laut seluas ± 13 ribu Ha. Sedangkan untuk wisata alam bawah laut dan pantai pesisir tersedia alokasi ruang seluas ± 3 ribu Ha. Disamping itu, Kalimantan Timur memiliki Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) yakni Pulau Maratua dan sekitarnya, wilayah tersebut sebagian besar telah ditetapkan sebagai wilayah konservasi laut oleh pemerintah pusat. Hal ini selaras dengan kebijakan daerah yang menetapkan Kepulauan Derawan dan sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Disamping perikanan, sektor pariwisata juga menjadi salah satu sektor ekonomi yang akan dikembangkan dalam mendukung upaya transformasi ekonomi. Kalimantan Timur memiliki 406 titik obyek wisata alam dan budaya potensial yang tersebar di kabupaten/kota se-Kalimantan Timur.

Titik obyek wisata terbanyak berada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan 76 obyek wisata (18,72 %), Kota Samarinda dan Paser yang masing-masing memiliki 51 obyek wisata. Sedangkan Kabupaten Berau yang terkenal dengan wisata alam Kepulauan Derawan, memiliki 35 obyek wisata. Sementara Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki titik obyek wisata paling sedikit yaitu 18 obyek wisata (4,43 %). Sebagian besar obyek wisata tersebut belum dikelola secara optimal.

c. Wilayah Rawan Bencana

Kalimantan Timur merupakan wilayah yang relatif aman dari bencana gempa bumi tektonik dan vulkanik. Kejadian bencana yang paling berpotensi di Provinsi Kalimantan Timur adalah kebakaran hutan dan banjir, daerah yang berpotensi rawan bencana meliputi:

- **Gempa Bumi**

Daerah rawan gempa bumi terdapat di Kabupaten Paser, Tanjung Mangkalia di Kutai Timur dan Teluk Sulaiman di Berau.

- **Banjir**

Daerah rawan banjir terdapat hampir di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, dan kawasan yang sering dilanda banjir adalah kawasan perkotaan dan pemukiman di Bontang, Samarinda dan Balikpapan. Di wilayah

Kalimantan Timur terdapat \pm 2,9 Juta Ha (23,18 %) yang merupakan wilayah rawan banjir dengan kriteria rawan tinggi seluas 350.460 Ha (2,78%) dan kategori rawan seluas 2.575.933 Ha (20,40 %). Wilayah lainnya merupakan wilayah dengan kategori kurang rawan seluas 8.611.705 Ha (68,21 %) dan tidak rawan seluas 1.087.525 Ha (8,61 %). Wilayah yang masuk ke dalam kategori rawan tinggi bencana banjir yang sangat luas terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Kabupaten Paser, dimana sebagian besar morfologi wilayah dimaksud merupakan daerah dataran rendah, rawa, daerah yang dekat dengan danau-danau alam dan muara-muara sungai.

- **Tanah Longsor**

Daerah yang rawan terhadap bencana tanah longsor terdapat di daerah perkotaan seperti Kota Samarinda dan Kota Balikpapan

- **Kebakaran Hutan dan Lahan**

Daerah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan terdapat di hampir seluruh kabupaten/kota kecuali Bontang dan Samarinda.

- **Tsunami**

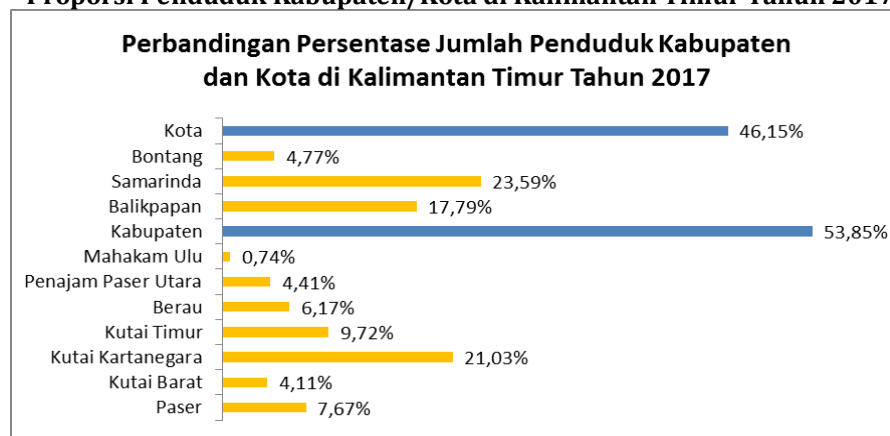
Meski tidak pernah mengalami tsunami, namun Provinsi Kalimantan Timur terdapat daerah yang rawan bencana tsunami. Daerah rawan tsunami adalah sepanjang pantai Provinsi Kalimantan Timur. Sementara daerah dengan tingkat kerawanan tsunami tinggi terdapat di Kota Balikpapan, Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Timur.

2.1.2 Aspek Demografi

Kalimantan Timur memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.505.161 jiwa yang tersebar 53,85 % di 7 kabupaten dan 46,15 di 3 kota, dengan rata-rata laju pertumbuhan 1,28 persen per tahun dan kepadatan rendah 27,26 jiwa per Km². Ketimpangan Distribusi penduduk yang tidak merata ini memiliki konsekuensi kebutuhan biaya infrastruktur yang sangat besar untuk meningkatkan akses pelayanan. Hal tersebut menjadi salah satu permasalahan dalam pemerataan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur secara menyeluruh di setiap lapisan masyarakat.

Penduduk Kaltim didominasi oleh kelompok usia 5-39 tahun dengan proporsi masing-masing sekitar 8-9 persen sedangkan penduduk di atas usia 70 tahun menempati jumlah yang paling sedikit dengan jumlah kurang dari 1 %. Struktur penduduk tersebut memperlihatkan bahwa Kaltim memiliki proporsi penduduk usia produktif jauh lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif. Penduduk Kalimantan Timur didominasi oleh laki-laki dimana sex ratio mencapai 108,99. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam setiap 100 penduduk berjenis kelamin perempuan terdapat 108-109 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki.

Gambar 2. 7
Proporsi Penduduk Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2017



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2017

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat memberikan gambaran permasalahan/tantangan, kelemahan, kekuatan, potensi dan peluang dari kondisi ekonomi, sosial, kemasyarakatan saat ini dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Gambaran kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat Kalimantan Timur dapat dilihat dari perkembangan capaian kinerja pembangunan daerah terkait dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat kesenjangan, pengangguran, kemiskinan dan indikator kesejahteraan lainnya.

Perekonomian Kalimantan Timur masih memiliki ketergantungan sumber daya alam tak terbarui cukup tinggi, sehingga analisis pada PDRB baik secara total (dengan migas+batubara) maupun partial tanpa adanya migas maupun batubara (non migas dan non batubara) akan memberikan gambaran lebih proporsional jika dihubungkan dengan analisis mikro kesejahteraan masyarakat. Lapangan Usaha Pertambangan dan

Penggalian serta Lapangan Usaha Industri Pengolahan terutama pada sektor migas dan batubara masih memegang kendali pada struktur PDRB Kalimantan Timur.

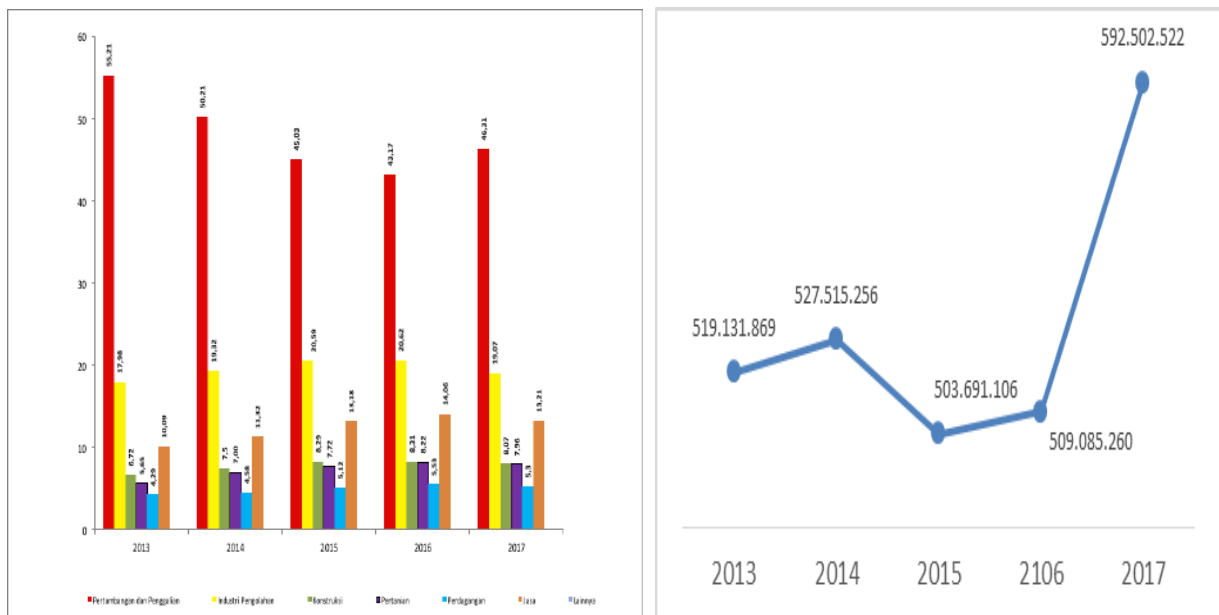
Tabel 2. 2
Capaian Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kalimantan Timur 2013-2017

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					PILAR-TUJUAN SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	2,25	1,71	-1,21	-0,38	3,13	II.8
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi non migas dan Non Batubara (%)	%	5,99	5,87	3,60	1,57	5,24	II.8
3	Laju Inflasi	%	9,65	7,66	4,89	3,39	3,15	II.10
4	PDRB per kapita	Juta Rp	158,47	157,40	147,41	145,40	165,71	II.8
5	Indeks Gini		0,3341	0,3355	0,32	0,32	0,330	II.10
6	Pemerataan versi Worid Bank :							
	- 40% Rendah	%	19,77	18,92	21,49	20,03		II.10
	- 40% Sedang	%	37,67	36,85	37,91	38,91		II.10
	- 20% Tinggi	%	42,55	44,23	40,6	41,06		II.10
7	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)		0,57	0,53	0,48	0,49	0,51	II.10
8	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.			1,71	1,2	0,36	3,13	II.8
9	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	5,65	7,00	7,72	8,22	7,96	II.8
10	Produksi sektor pertanian	ton	76.653	84.516	76.100	89.083	105.669	II.8
11	Kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB	%	2,59	3,75	3,98	4,43	4,49	II.8
12	Produksi sektor perkebunan	ton	6.988.344	9.717.275	10.902.358	11.499.164	13.249.959	II.8
13	Kontribusi subsektor kehutanan terhadap PDRB	%	1,11	1,16	1,33	1,34	1,15	II.8
14	Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	%	55,21	50,21	45,03	43,17	46,31	II.8
15	Kontribusi subsektor pariwisata terhadap PDRB	%	0,66	0,73	0,86	0,95	0,93	II.8
16	Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB	%	1,18	1,30	1,50	1,54	1,46	II.8
17	Kontribusi subsektor perdagangan terhadap PDRB	%	4,29	4,58	5,12	5,53	5,30	II.8
18	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	17,98	19,32	20,59	20,62	19,07	II.8

Sumber : BPS Kaltim

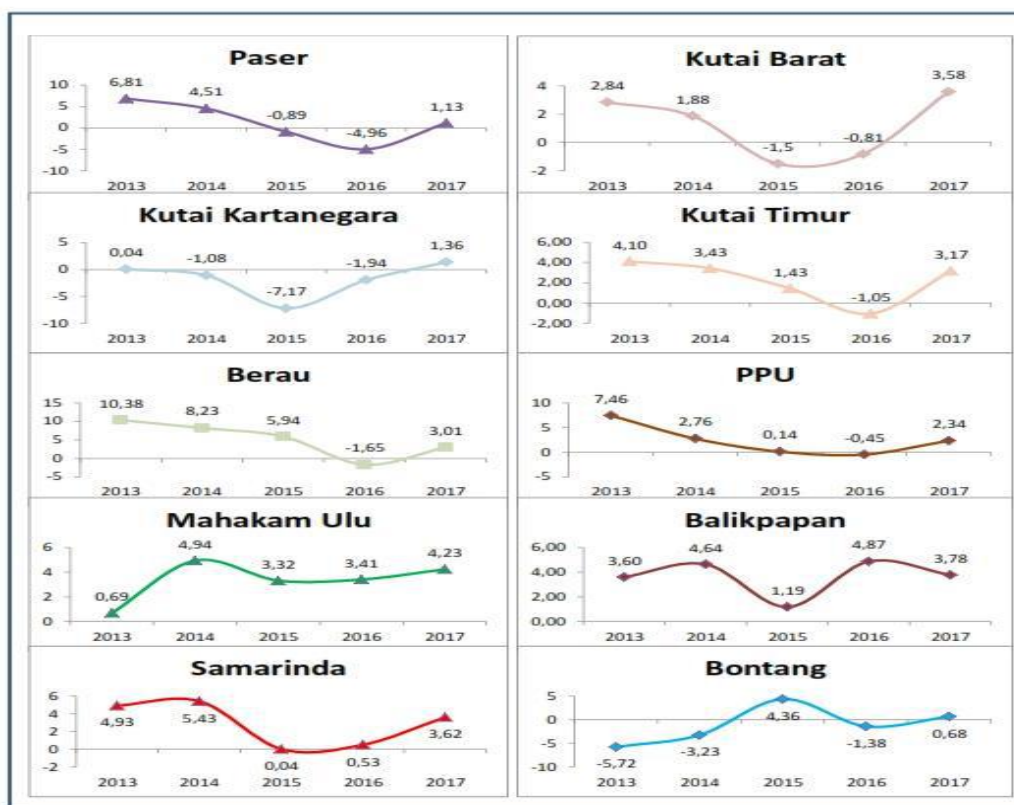
Besarnya kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Timur terhadap pembentukan PDB Nasional tidak menjadikan Kaltim memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil. Kinerja perekonomian Kalimantan Timur sangat rentan terhadap gejolak harga komoditas minerba dan CPO Sawit di pasar internasional. Pada saat harga komoditas energi tersebut mengalami penurunan pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur terpuruk pada level negatif 1,21 persen. Seiring membaiknya harga komoditas minerba dan CPO Sawit, perekonomian Kaltim mulai merangkak naik di tahun 2016 sebesar negatif 0,36 persen, dan mampu keluar dari tekanan kontraksi pada tahun 2017 menjadi sebesar 3,13 persen. Demikian pula yang terjadi di Kabupaten/Kota, hanya Mahakam Ulu, Balikpapan dan Samarinda yang mengalami pertumbuhan ekonomi relatif stabil.

Gambar 2. 8
Struktur Perekonomian (%) dan PDRB Kalimantan Timur (Juta Rp) Tahun 2013-2017



Sumber : BPS Prov. Kaltim

Gambar 2. 9
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota (persen) Tahun 2013-2017



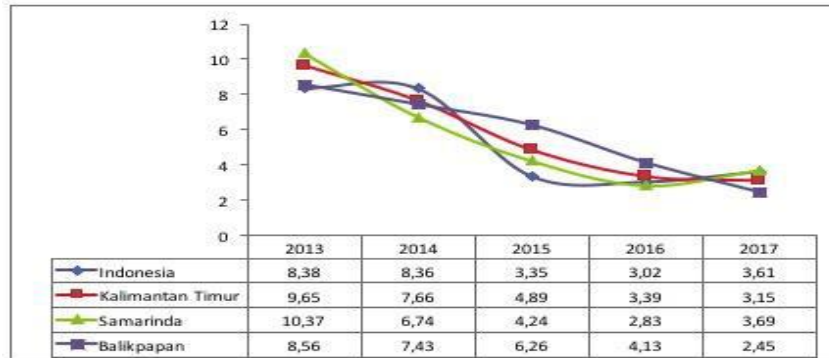
Sumber : BPS Provinsi Kaltim

Perkembangan kontribusi lapangan usaha terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Timur selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa lapangan usaha konstruksi dan pertanian pada tahun 2013-2017 terlihat terus meningkat peranannya terhadap PDRB Kalimantan Timur, dan lapangan usaha pertambangan dan penggalian cenderung menurun. Ini menjadi indikasi positif bahwa transformasi ekonomi Kaltim ke arah sumber daya alam terbarukan (*renewable resources*) sudah berjalan. Oleh karena itu, peningkatan kontribusi Lapangan Usaha Pertanian (pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan) menjadi harapan dalam mendukung percepatan transformasi ekonomi Kaltim kedepan. Kontribusi Lapangan Usaha Perdagangan terhadap PDRB Kaltim juga menunjukkan pergerakan yang positif dan terus meningkat ditengah-tengah menurunnya aktivitas pertambangan dan penggalian, namun kontribusinya masih sangat kecil yaitu 5,30 persen.

Dalam pembangunan ekonomi, faktor stabilitas harga sangat penting mengingat fluktuasi harga sangat berpengaruh pada nilai barang dan jasa yang di

hasilkan, serta berdampak pada daya beli masyarakat. Inflasi merupakan salah satu alat ukur untuk melihat stabilitas harga barang dan jasa secara umum dari waktu ke waktu. Laju inflasi pada periode tahun 2013-2017 menunjukkan penurunan yang signifikan walaupun masih lebih tinggi dibandingkan dengan capaian nasional sebesar 3,02 %.

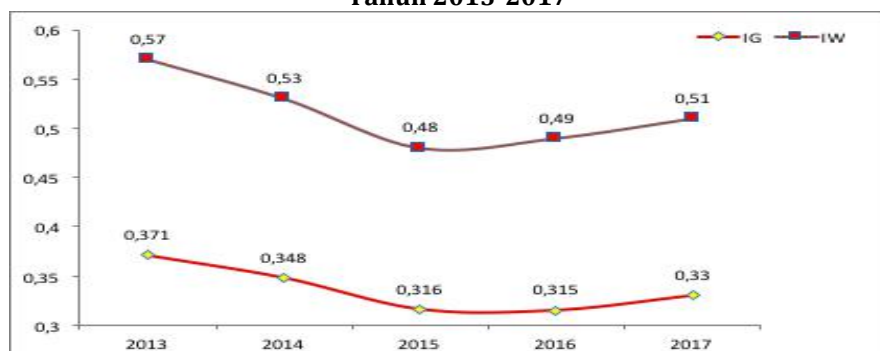
Gambar 2. 10
Laju Inflasi Kalimantan Timur,
Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Nasional Tahun 2013-2017 (%)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2017

Indeks Gini Kaltim selama periode lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun, namun pada tahun 2017 mengalami sedikit peningkatan menjadi 0,330. Sementara itu, Indeks Ketimpangan Williamson selama 2013-2017 juga menunjukkan kecenderungan menurun, namun pada tahun 2017 mengalami kenaikan ketimpangan menjadi sebesar 0,51. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan antar kabupaten/kota di Kaltim masih relatif tinggi. Perbedaan sumber daya antar wilayah, akses, dan tingkat kemudahan mobilitas barang dan jasa memberi andil dalam terciptanya ketimpangan tersebut.

Gambar 2. 11
Indeks Gini dan Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2013-2017



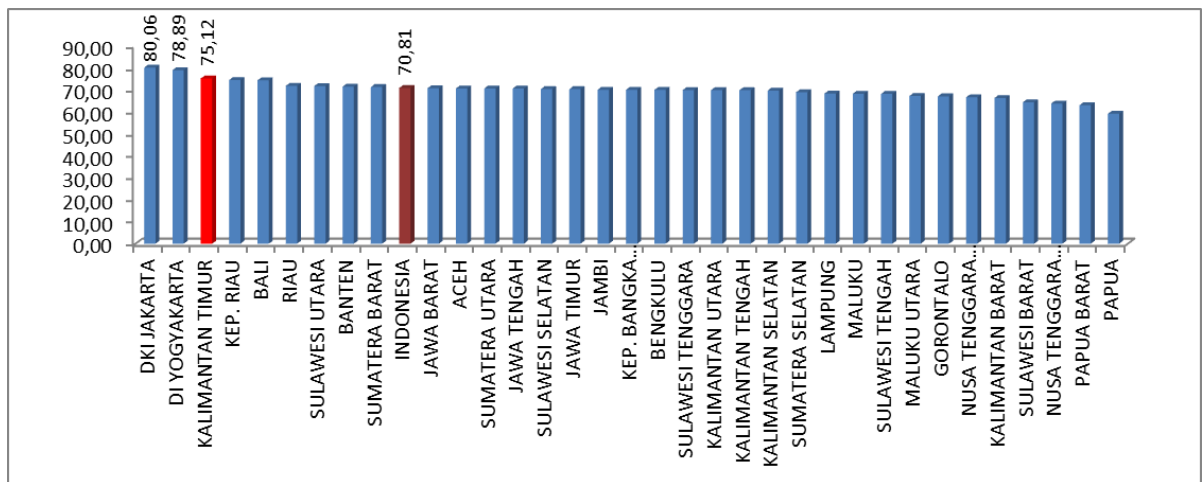
Sumber : BPS Provinsi Kaltim

Indeks ketimpangan regional masih bisa diturunkan jika terjadi peningkatan PDRB di Kabupaten Mahakam Ulu dan Penajam Paser Utara. Angka PDRB yang tinggi hanya didominasi oleh 2 (dua) kabupaten yaitu Kutai Timur (Rp. 117.816.986.000.000) dan Kutai Kartanegara (Rp. 148.336.960.000.000), sedangkan besar PDRB kabupaten/kota lainnya tidak sampai 50% dari nilai PDRB kedua kabupaten tersebut. Hanya Kota Balikpapan yang berada di urutan ketiga dengan nilai Rp. 86.732.396.000.000.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Walaupun mengalami pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil dan adanya ketimpangan perekonomian antar kabupaten/kota, tingkat kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Hal ini ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Timur mengalami tren peningkatan selama periode 2013-2017, sudah lebih tinggi dibandingkan dengan IPM daerah provinsi lainnya di Pulau Kalimantan dan IPM Nasional.

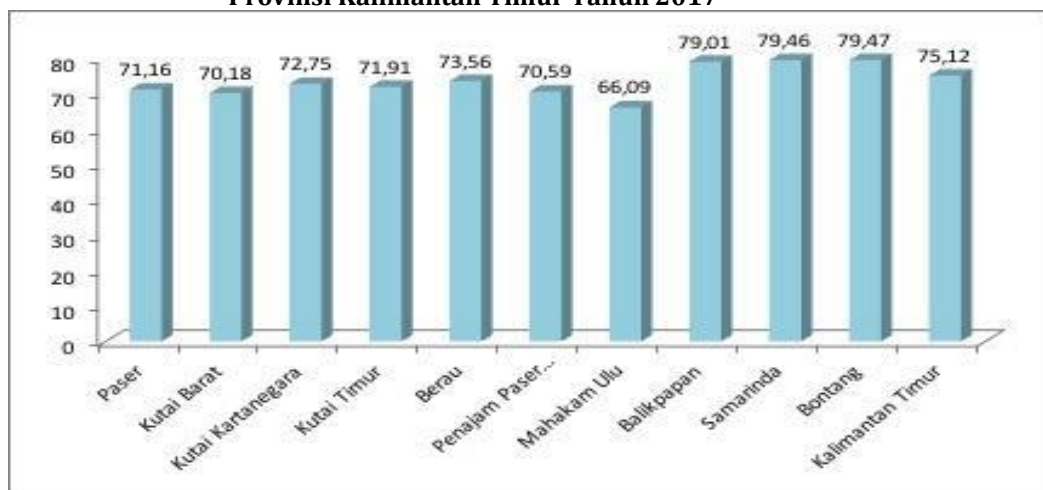
Gambar 2. 12
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi secara nasional Tahun 2017



Sumber : BPS Provinsi Kaltim

Jika dilihat IPM Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, ketujuh kabupaten memiliki nilai IPM dibawah IPM Provinsi. Hanya wilayah kota yang memiliki nilai IPM di atas IPM Provinsi. Pemerataan pembangunan masyarakat terkait pendidikan, kesehatan dan kualitas hidup di wilayah kabupaten perlu ditingkatkan terutama pada daerah perbatasan seperti di Kabupaten Mahakam Ulu.

Gambar 2. 13
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

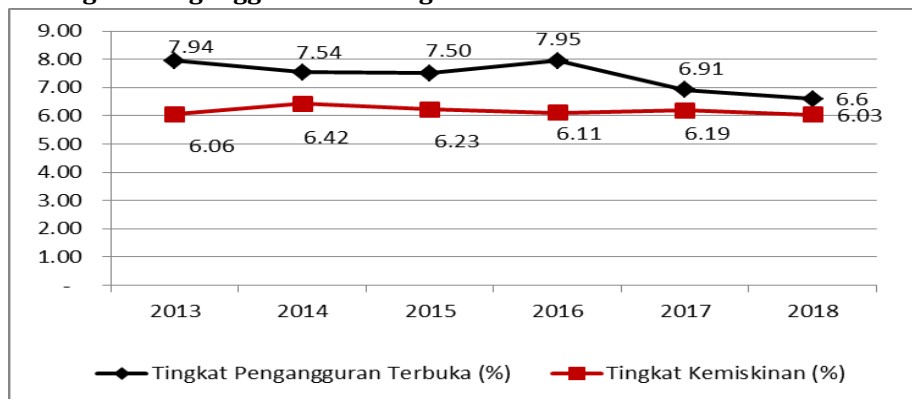
Tabel 2. 3
Capaian Kesejahteraan Sosial Kalimantan Timur 2013-2017

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					PILAR-TUJUAN SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Pemerataan Pendapatan Versi World Bank							
	- 40% Rendah	%	19.77	18.92	21.49	20.03		II.10
	- 40% Sedang	%	37.67	36.85	37.91	38.91		II.10
	- 20% Tinggi	%	42.55	44.23	40.6	41.06		II.10
2	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	93.94	93.58	93.77	93.89	93.09	I.1
3	Tingkat Kemiskinan	%	6.06	6.42	6.23	6.11	6.19	I.1
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		73.21	73.82	74.17	74.59	75.12	I.1
5	Indeks Desa Membangun (Permendes 2/2016)				0.525	0.525	0.525	II.10
6	Angka Melek Huruf	%	97.95	98.59	98.69	98.81	98.96	I.4
7	Rata-rata lama sekolah	tahun	8,87	9,04	9,15	11	9,24	I.4
8	Angka Harapan Hidup	tahun	73.52	73.62	73.65	73.68	73.7	I.3
9	Persentase Balita Gizi Buruk	%	3.9	3.7	3.7	0.1		I.3
10	Prevalensi balita gizi kurang		17.1	17.3	19.1	19.8		I.3
11	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	70	63.98	78	79		I.3
12	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	63.53	63.48	62.39	67.79	63.75	II.8
13	Tingkat pengangguran terbuka	%	7.94	7.54	7.5	7.95	6.91	II.8
14	Rasio penduduk yang bekerja		102.09	102.21	57.71	62.4	59.35	II.8
15	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	22.81	24.02	65.35	64.44	60.86	I.1
16	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)		92.53	97.75	97.74	97.26	98.16	I.2

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Pada aspek kesejahteraan masyarakat lainnya, Kaltim masih menghadapi permasalahan kemiskinan dan pengangguran. Selama periode tahun 2013-2017 tingkat kemiskinan Kalimantan Timur berfluktuasi dan cenderung meningkat walaupun disisi lain tingkat pengangguran terbuka cenderung menurun. Kondisi tingkat kemiskinan sangat dipengaruhi oleh migrasi penduduk miskin dari luar daerah yang menambah jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur.

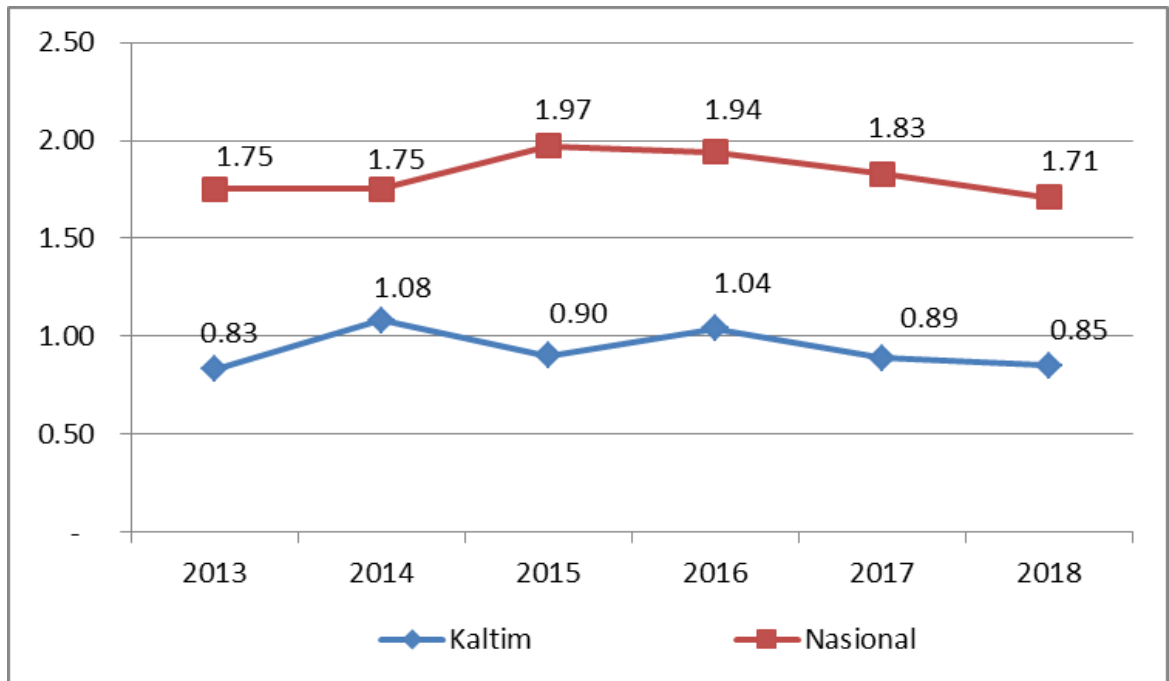
Gambar 2. 14
Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan Kalimantan Timur 2013-2017



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Angka kemiskinan terkait dengan pengeluaran, sementara pengeluaran masyarakat terkait dengan pendapatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Nilai indeks kedalaman kemiskinan Kaltim sangat fluktuatif dan selalu berada di bawah nasional, serta cenderung menurun menunjukkan bahwa semakin kecil rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Strategi penurunan kemiskinan di beberapa daerah dapat dimulai dari penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Pengembangan ekonomi Kaltim kedepan harus mempertimbangkan penyerapan tenaga kerja untuk menekan tingkat pengangguran terbuka dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Gambar 2. 15
Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2013-2018

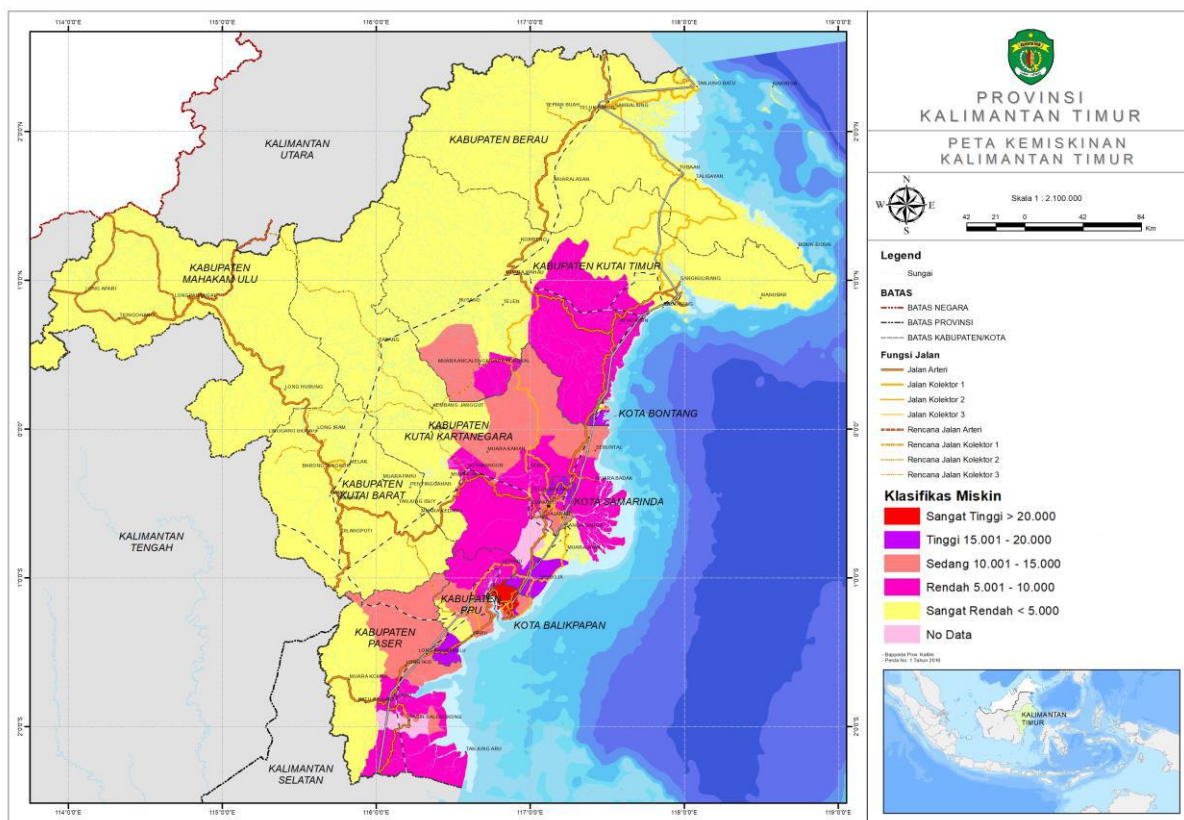


Sumber : BPS Provinsi Kaltim

Jumlah penduduk miskin terbanyak di Kalimantan Timur sebagian besar berada di kawasan perkotaan. Jumlah penduduk miskin terbanyak berada di Balikpapan, Samarinda, Bontang, Kutai Kartanegara dan Kutai Timur. Diperlukan kerjasama lintas sektor yang terintegrasi untuk pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat miskin pada daerah-daerah ini.

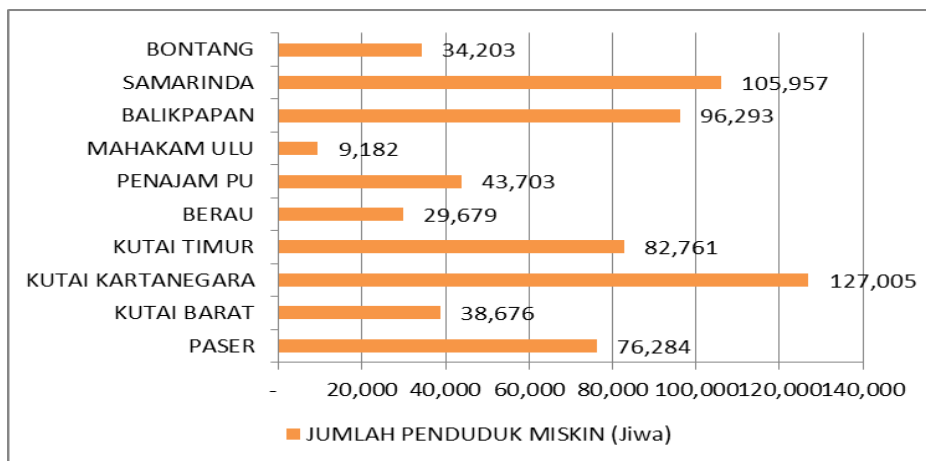
Kegiatan-kegiatan pengelolaan sumber daya alam di Kalimantan Timur diharapkan memberi manfaat yang besar terhadap masyarakat yang berada di desa-desa sekitarnya. Namun sampai saat ini sebagian penduduk belum mendapatkan manfaat langsung dari kegiatan tersebut, masih terdapat banyak penduduk miskin di sekitar kawasan lindung dan kawasan konsesi hutan produksi, pertambangan, dan perkebunan sejumlah 341.114 jiwa atau 53% dari total 643.743 jiwa penduduk miskin di Kalimantan Timur.

Gambar 2. 16
Peta Sebaran Penduduk Miskin Kalimantan Timur Tahun 2017



Sumber : One Data One Map, Bappeda Prov.Kaltim

Gambar 2. 17
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2017



Sumber : Basis Data Terpadu, TNP2K

Kabupaten Paser memiliki jumlah desa terbanyak (22 desa) yang berada pada kawasan Hutan Lindung, dengan jumlah penduduk miskin terbanyak yaitu 16.865

jiwa. Di Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki jumlah penduduk miskin 30.309 jiwa pada Kawasan Hutan Produksi dan pada kawasan Perkebunan sebanyak 62.815 jiwa.

Tabel 2. 4
Jumlah Desa dan Penduduk Miskin dalam Kawasan Pengelolaan Sumber Daya Alam Kalimantan Timur Tahun 2017

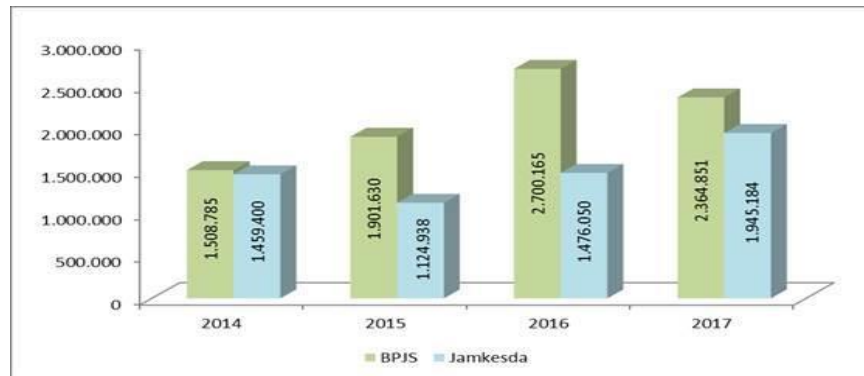
No	Kota/Kabupaten	Kawasan								Total	
		Hutan Lindung		Hutan Produksi		Perkebunan		Pertambangan			
		Jumlah Desa	Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Desa	Penduduk Miskin
1	Balikpapan	2	10.706					0	14.883	2	25.589
2	Berau	9	839	46	12.051	30	9.210	49	19.365	134	41.465
3	Bontang	1	1.870			1	2.464	-	-	2	4.334
4	Kutai Barat	4	691	21	4.640	81	14.198	144	29.095	250	48.624
5	Kutai Kartanegara	11	9.549	57	30.309	120	62.815	139	101.075	327	203.748
6	Kutai Timur	11	13.816	41	22.460	76	37.520	108	76.215	236	150.011
7	Mahakam Ulu	14	2.362	20	3.614	16	3.206	30	7.151	80	16.333
8	Paser	22	16.865	23	7.896	69	34.198	69	36.059	183	95.018
9	Penajam Paser Utara	4	5.020	10	6.368	15	12.591	26	35.189	55	59.168
10	Samarinda	7	15.856					0	56.380	7	72.236
Jumlah		85	77.574	218	87.338	408	176.202	565	375.412	1.276	716.526

Terkait dengan kesejahteraan sosial masyarakat, Kaltim memiliki tingkat literasi masyarakat yang sangat baik dengan angka melek huruf di atas rata-rata nasional. Selama lima tahun terakhir, capaian Harapan Lama Sekolah Provinsi telah naik sebesar 0,64 poin dan telah melampaui capaian provinsi lainnya di wilayah Kalimantan. Selain Harapan Lama Sekolah (HLS) indikator penting untuk melihat keterjangkauan layanan pendidikan bagi penduduk usia sekolah adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Perkembangan RLS Provinsi Kalimantan Timur selama lima tahun terakhir tidak mengalami peningkatan yang signifikan karena hanya naik sebesar 0,49 tahun. Jenjang pendidikan yang ditamatkan penduduk usia sekolah di Kaltim rata-rata pada jenjang pendidikan SMP.

Disamping pendidikan, kesehatan merupakan indikator penting dalam menilai kesejahteraan masyarakat. Secara umum, perkembangan rata-rata Usia Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan secara perlahan. Dalam kurun waktu lima tahun UHH Provinsi Kalimantan Timur telah meningkat dari 73,32 tahun di tahun 2012 menjadi 73,70 tahun di tahun 2017. Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan kesehatan masyarakat dapat terlihat melalui jumlah kepesertaan

jaminan kesehatan baik melalui Jamkesda (untuk penduduk miskin) dan BPJS (berbayar) di Provinsi Kalimantan Timur.

Gambar 2. 18
Jumlah Kepesertaan Jaminan Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2014-2017



Sumber : SIDATA, Bappeda Provinsi Kaltim

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Bidang seni budaya dan keolahragaan juga menjadi aspek penting dalam aspek kesejahteraan masyarakat. Berkembangnya keolahragaan di Kalimantan Timur dapat dilihat dari capaian prestasi olahraga Kaltim dalam kejuaraan tingkat nasional seperti Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX di Jawa Barat pada tahun 2016 dimana Kaltim menempati posisi ke lima dari 34 provinsi. Peringkat Kaltim di PON 2016 tidak jauh berbeda dengan PON 2012 di Bengkulu yang juga menempati posisi kelima. Capaian tersebut menggambarkan bahwa keolahragaan sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kaltim. Selain itu, capaian prestasi olahraga tersebut juga ditopang oleh adanya sarana dan prasarana keolahragaan yang memadai.

Secara umum, jenis olahraga yang paling populer adalah olahraga terukur seperti lari, renang, angkat besi, lompat tinggi, dan sebagainya. Olahraga ini paling banyak memiliki klub olahraga dan atlet dengan jumlah sarana dan prasarana sekitar 24 buah. Sedangkan olahraga lain yang juga populer di Kalimantan Timur adalah olahraga beladiri seperti taekwondo, silat, dan lain-lain dengan jumlah atlet profesional lebih dari 260 orang dan terdapat 11 klub. Di samping itu, olahraga lain seperti permainan dan olahraga beregu juga tetap menjadi minat yang populer.

Aktifitas seni dan budaya di Kalimantan Timur meliputi grup sanggar kesenian, sanggar seni ukir, sanggar seni lukis/gambar dan sanggar seni teater masih

belum berkembang optimal. Rendahnya aktifitas seni dan budaya disebabkan sanggar-sanggar kesenian di Kabupaten/Kota masih belum aktif. Disamping itu, event seni budaya Kalimantan Timur hanya diselenggarakan setahun sekali diantaranya Festival Budaya Erau, Festival Mahakam, Festival Budaya Dayak Kenyah.

Tabel 2. 5
Kondisi Olahraga dan Seni Budaya di Kalimantan Timur

Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Klub Olahraga	1.045	1.045	1.050	1.050	1.050
Jumlah Gedung Olahraga	47	55	97	97	101
Jumlah Event Budaya	56	55	60	60	60
Jumlah Group Kesenian	676	735	861	861	861

Sumber : Sidata Kaltim

Kinerja pembangunan pemuda di suatu daerah dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Pemuda. Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu satu tahun 2015-2016 mampu meningkatkan capaian IPP nya dari sebesar 50,83 menjadi 56,33 dan berhasil menempati posisi ketiga secara nasional dibawah DI Jogjakarta dan Bali. Dimana peningkatan angka indeks ini dominan dipengaruhi oleh perbaikan kinerja pemuda dari sisi lapangan dan kesempatan kerja. Indikator pendukung pemuda wirausaha (*white collar*) dan tingkat pengangguran menunjukkan kinerja yang baik.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Pada bagian aspek pelayanan umum berikut ini menjelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, baik pada urusan pelayanan wajib dan urusan pilihan.

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

Pembangunan pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur telah berkembang dan menjadi perhatian Pemerintah, dimana sampai dengan tahun 2018 jumlah sekolah yang tersebar di 10 kabupaten/kota sebanyak 6.916 sekolah, terdiri dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 2.895 sekolah, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 1.895 sekolah, Sekolah Menengah

Pertama (SMP) sebanyak 648 sekolah, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 221, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 222 sekolah. Sementara itu untuk pendidikan khusus telah dikembangkan sekolah luar biasa sebanyak 9 sekolah tersebar di 9 kabupaten/kota.

Selanjutnya untuk pengembangan pendidikan sekolah menengah yang diarahkan untuk sekolah vokasi telah dikembangkan sebanyak 147 jurusan/program keahlian. Dalam rangka mendukung kawasan industry yang akan dikembangkan, maka pemerintah akan melakukan revitalisasi sekolah vokasi yang disesuaikan dengan potensi daerah.

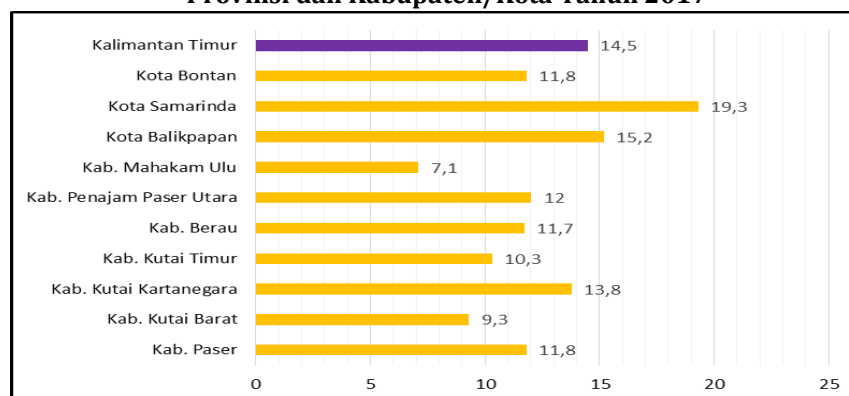
Sementara itu dalam rangka pengembangan pendidikan yang diarahkan bagi anak-anak penyandang disabilitas, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan sarana dan prasarana di sekolah luar biasa.

Namun Kalimantan Timur masih menghadapi permasalahan pada partisipasi pendidikan di tingkat sekolah menengah atas terutama jika dilihat dari Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) rata-rata belum mencapai 90 persen dan angka putus sekolah yang tinggi yaitu rata-rata 21,09 % setiap tahun. Secara umum capaian APK Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan 9,56 persen dalam kurun waktu lima tahun, demikian pula capaian APM Kaltim meningkat sebesar 6,29 persen. Meskipun capaian APK dan APM Kaltim lebih unggul dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Kalimantan, tetapi terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara APK dan APM yaitu sebesar 25,57 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa tingginya partisipasi penduduk usia sekolah dalam jenjang pendidikan SMA tidak diikuti dengan kesesuaian umur peserta didik dengan golongan umur yang seharusnya memasuki jenjang pendidikan SMA. Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya peserta didik di SMA/SMK/MA yang tinggal kelas atau mengulang atau juga disebabkan oleh adanya umur peserta didik lebih muda daripada golongan umur yang seharusnya masuk jenjang SMA. Demikian pula capaian APK dan APM di Kabupaten/Kota mencerminkan disparitas kualitas pendidikan di Kaltim. Daerah yang harus menjadi prioritas perbaikan layanan pendidikan adalah Kabupaten Mahakam Ulu, Paser, Kutai

Kartanegara, Berau dan Kutai Barat karena nilai APK dan APM selalu menjadi yang paling rendah dalam lima tahun terakhir.

Disamping itu, disparitas pelayanan pendidikan dapat juga dilihat dari sisi ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta ketercukupan tenaga pengajar. Kalimantan Timur memiliki tenaga pengajar yang terbatas di tingkat sekolah menengah atas, dimana rasio guru terhadap murid SMA/MA/SMK di Kalimantan Timur adalah 14,5 yang bermakna bahwa satu orang guru mengajar sebanyak kurang lebih 14-15 siswa. Terdapat beberapa daerah dengan rasio guru-murid yang kecil seperti di Mahakam Ulu, Kutai Barat dan Kutai Timur. Di sisi lain, juga terdapat daerah dengan rasio guru-murid sangat tinggi seperti di Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal tersebut mengindikasikan bahwa proporsi guru-murid lebih tinggi di wilayah perkotaan dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota.

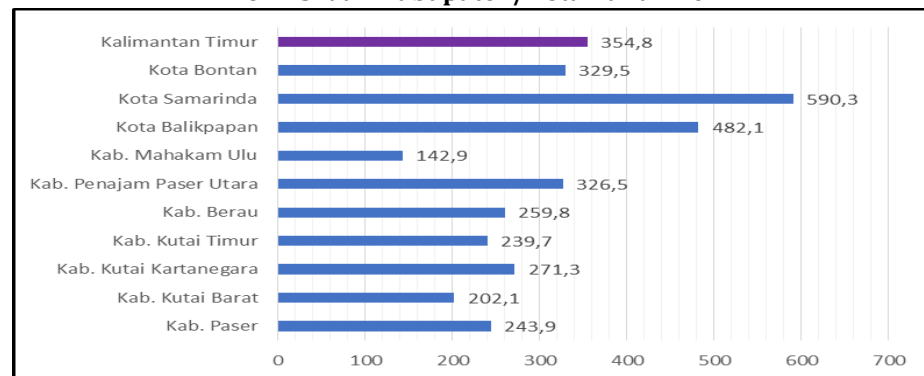
Gambar 2. 19
Rasio Guru-Murid pada Jenjang Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA)
Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2017



Sumber: BPS Kaltim, Kaltim Dalam Angka 2017

Di samping rasio guru-murid, indikator lain yang juga menjadi indikasi penyebab disparitas pelayanan pendidikan adalah rasio sekolah-murid. Rasio murid-sekolah di Kaltim sebesar 354,8 yang artinya setiap satu sekolah rata-rata memiliki 354 siswa. Namun demikian, data tersebut belum menggambarkan daya tampung sekolah secara lebih rinci karena diperlukan data-data terkait jumlah ruang kelas per sekolah untuk mengukur rasio jumlah siswa dengan jumlah ruang belajar.

Gambar 2. 20
Rasio Sekolah-Murid pada Jenjang Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA)
Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2017



Sumber: BPS Kaltim, Kaltim Dalam Angka 2017

Kota Balikpapan dan Kota Samarinda rasio memiliki sekolah-murid sangat tinggi yaitu satu sekolah rata-rata memiliki jumlah siswa 500 orang. Sebaliknya, di beberapa daerah terutama di Kabupaten Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan Paser perbandingan sekolah-siswa terlihat lebih kecil.

b. Kesehatan

Kondisi kesehatan masyarakat menjadi penentu penting bagi produktivitas suatu masyarakat. Oleh karena itu pembangunan bidang kesehatan perlu menjadi prioritas pemerintah daerah. Pembangunan bidang kesehatan di Kalimantan Timur semakin membaik, hal ini ditunjukkan oleh usia harapan hidup yang semakin meningkat dari 73,52 tahun pada tahun 2013 mencapai 73,7 tahun pada tahun 2017.

Kalimantan Timur masih menghadapi permasalahan kesehatan terkait kematian ibu, morbiditas, keterbatasan tenaga kesehatan terutama dokter, belum terpenuhinya standar pelayanan minimal di pusat-pusat pelayanan kesehatan, prevalensi TB dan HIV-AIDS.

Tabel 2. 6
Capaian Pembangunan Kesehatan di Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Pilar-Tujuan SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Angka Harapan Hidup	tahun	73,52	73,62	73,65	73,68	73,7	I.3
2	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	jiwa	177,21	177,21	177,21	177,21	177,21	I.3
3	Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	jiwa	21	21	21	21	21	I.3
4	Angka Kematian Balita	jiwa	72	60	84	117	31	I.3

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Pilar-Tujuan SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
	(AKBa) per 1000 kelahiran hidup.							
5	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan (jumlah)		7319	6012	6695	7933	10110	I.3
6	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk		0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	I.3
7	Rasio penduduk terhadap jumlah dokter	Orang	1.756	2.154	1.978	1.726	1.660	I.3
8	Rasio penduduk terhadap jumlah puskesmas+pustu	Orang	4.380	4.097	4.036	4.124	3.895	I.3
9	Rasio posyandu per satuan balita	(per. 1000)	24,87	29,33	31,02	33,4	34,33	I.3
10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	(per. 1000)	4,09	3,57	3,4	3,39	4,03	I.3
11	Kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih	%	90,86	88,76	91,26	90,12	92,29	I.3
12	Persentase penduduk dengan keluhan kesehatan	%	18,99	21,22	21,98	21,76	20,89	I.3
13	Morbiditas (Angka Kesakitan)	%	11,74	9,18	9,18	11,9	10,5	I.3
14	Cakupan Puskesmas	%	180,58	174,76	174,76	174,76	176,87	I.3
15	Cakupan Puskesmas Pembantu	%	564,71	624,27	676,70	693,20	693,20	I.3
16	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	87,21	92,9	95,46	88,75	I.3
17	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	%	90,9%	79,6%	79,6%	91,3%	90,1%	I.1
18	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	%	90,9%	79,6%	79,6%	91,3%	90,1%	I.3
19	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		7,3	7,54	7,81	8,62	7,8	I.3
20	Cakupan Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	I.3
21	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	85,34	87,73	92,4	89,4	94,46	I.3
22	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk		1,28	1,05	1,24	1,96	1,88	I.3
23	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	17	14,65	23,6	38,89	30,96	I.3
24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	30,57	37,94	20,83	9,6		I.3
25	Tingkat prevalensi		229,40	74,28	56,00	4,19	100	I.3

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Pilar-Tujuan SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
	Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)							
26	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	22,50	28,00	19,80	47,10	35,99	I.3
28	Angka kejadian Malaria	per 1000 penduduk	1,50	0,75	0,20	0,04	0,40	I.3
29	Tingkat kematian akibat malaria		5,70	1,00	0	0	0	I.3
30	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi		0,18	0,03	0,09	0,190	<1	I.3
31	Cakupan kunjungan bayi	%	60,44	78,52	65,41	84,16	82,40	I.3
32	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	84,99	78,95	65,23	88	45	I.3
33	Cakupan pelayanan nifas		84,80	85,30	82,30	79,40	81	I.3
34	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	48,60	63,20	57,90	68,10	69	I.3
35	Cakupan pelayanan anak balita	%	55,60	54,50	59,00	66,20	61,2	I.3
37	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	43,00	91,88	94,24	99,34	98,52	I.3
38	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	97,00	100,00	100,00	100,00	100,00	I.3
39	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)		60,06	93,18	100,00	97,92	94,12	I.3
40	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam		100,00	85,23	98,80	100,00	100,00	I.3
41	Cakupan Jaminan Kesehatan		61,33	42,65	49,80	51,67	55,00	I.1
44	Angka Kematian Ibu (AKI).		113	104	100	95		I.3
45	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.		-	1,5	1,9	2,7	2,3	I.3
46	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).		-	1,5	1,9	2,7	2,3 jt	I.3

Sumber : Dinas Kesehatan Prov.Kaltim dan BPS Kaltim

Tuberkulosis (TB) dan HIV-AIDS merupakan salah satu penyakit yang menjadi perhatian pemerintah. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir,

temuan kasus TB BTA+ baru di Kalimantan Timur meningkat sebesar 34,92 % yaitu sebanyak 1.953 kasus pada tahun 2014 meningkat menjadi 2.635 kasus pada akhir tahun 2017. Kota Bontang, Kota Samarinda dan Kota Balikpapan merupakan penyumbang terbesar kasus TB BTA+ Baru selama kurun waktu empat tahun terakhir. Hal tersebut mengindikasikan tingginya resiko penyebaran TB BTA+ di wilayah tersebut. Terkait dengan distribusi tenaga medis dan paramedis, bahwa masih terjadi kekurangan tenaga medis dan paramedis terutama daerah 3T. Untuk memenuhi hal tersebut diperlukan penambahan tenaga medis dan para medis sehingga masyarakat yang berada di daerah 3T bisa terlayani dengan baik. Untuk sarana dan prasarana kesehatan, pemerintah telah memenuhi fasilitas kesehatan seperti puskesmas, Puskesmas 24 jam, dan Rumah Sakit Pratama, tetapi terkait dengan peralatan medis kesehatan, masih sangat terbatas khususnya di puskesmas-puskesmas di daerah 3T.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja pelayanan dasar dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dilihat dengan memperhatikan beberapa indikator utama. Pemaparan kondisi pelayanan pada urusan tersebut diarahkan pada penilaian aspek ketersediaan dan kualitas. Beberapa hal yang menjadi perhatian adalah kondisi pelayanan pada bidang infrastruktur jalan dan jembatan, sumber daya air, bangunan dan jasa konstruksi serta penataan ruang.

Tabel 2. 7
Capaian Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
di Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Pilar-Tujuan SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Panjang Jalan Provinsi	Km	1.762,07	1.628,07	1.628,07	1.628,07	1.628,07	II.9
2	Kondisi Mantap	%	48,64	54,08	58,94	66,24	51,66	II.9
3	Perumahan berdasarkan fasilitas sanitasi :							
	- Jamban sendiri	%	n/a	n/a	89,71	89,75	91,76	
	- Jamban dengan Tangki Septik/IPAL	%	n/a	n/a	70,08	77,66	76,56	
4	Luas Lingkungan Pemukiman (Kumuh)	Ha	n/a	1.405,14	1.363,39	1.309,72	1.026,69	II.9
5	Jumlah kawasan strategis provinsi yang terhubung dengan		2	2	2	2	2	II.9

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian kinerja					Pilar-Tujuan SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
	kawasan sentra produksi (Kawasan)							
6	Cakupan layanan Air Minum Perpipaan (%)	%	n/a	n/a	51,7	51,5	54,3	III.6
7	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)		67,83	82,06	69,14	75,02	73,18	III.11

Kinerja pelayanan jalan dan jembatan dapat dilihat dari dua aspek yaitu ketersediaan dan kualitas. Dalam konteks ini, kedua aspek tersebut belum dipenuhi secara baik di Provinsi Kalimantan Timur. Ketersediaan jaringan jalan Provinsi hingga tahun 2017 sesuai dengan SK Kemendagri No. 55 Tahun 2000 yaitu sepanjang 1.628,07 Km dengan kondisi mantap mencapai 51,66%. Ketersediaan jalan provinsi dalam kondisi mantap belum mampu sepenuhnya mendukung konektivitas 8 Kawasan Strategis Provinsi (Perda RTRW Kaltim No 1 tahun 2016) dan pusat produksi, kawasan industri, serta outlet pemasaran terkoneksi jaringan jalan.

Tabel 2.8
Panjang Jalan (Km) Provinsi Menurut Kondisi
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Tahun	Baik		Sedang		Rusak		Rusak Berat	
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
2017	432,53	48,32	28,57	3,19	223,68	24,99	210,31	23,50
2016	149.97	9.55	720.54	45.89	500.52	31.88	269.04	17.14
2015	452.98	28.85	329.52	20.99	251.39	16.01	536.68	35.83
2014	456.86	29.10	339.57	21.63	359.21	22.88	414.43	26.40
2013	440.48	28.05	334.85	21.33	249.75	15.91	544.99	34.71

Sumber: Diolah dari Dinas PU Provinsi Kalimantan Timur, 2018

Berdasarkan kondisi jalan tahun 2017 menunjukkan kondisi rusak dan rusak berat mencapai 433,99 Km atau 48,49% dari total panjang jalan. Sebagian besar jalan dalam kondisi rusak berada di Kabupaten Kutai Timur yaitu mencapai 161,86 Km atau 65,26% dari total panjang jalan provinsi diwilayah tersebut dan Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 116,62 Km atau 51,27% dari total panjang jalan provinsi diwilayah tersebut.

Tingginya kerusakan jalan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah ketidaksesuaian konstruksi jalan dengan standar spesifikasi

teknis, kondisi tanah yang labil sehingga rawan terjadi longsor, serta belum optimalnya upaya rehabilitasi, pemeliharaan dan rekonstruksi serta tingginya pelanggaran batas muatan kendaraan.

Dari aspek keselamatan berlalu lintas dijelaskan bahwa pada tahun 2017 angka kecelakaan lalu lintas mencapai 864 kasus dengan korban meninggal dunia 951 jiwa, hal ini sebagian besar disebabkan rendahnya kesadaran pengguna jalan dalam berlalu lintas.

Persoalan lain yang berkaitan dengan konektivitas wilayah yaitu ketersediaan jaringan jalan yang menghubungkan antar kabupaten/Kota belum optimal. Saat ini masih terdapat satu kabupaten yang belum terkoneksi jaringan jalan yaitu Kabupaten Mahakam Ulu. Hal tersebut disebabkan oleh jauhnya rentang kendali menuju daerah tersebut sehingga biaya konstruksi dan mobilisasi alat berat menjadi lebih mahal.

Kota Balikpapan merupakan daerah yang memiliki kondisi jalan relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah lainnya. Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi baik pada daerah tersebut mencapai 77% dari total panjang jalan provinsi di wilayah tersebut. Ketimpangan capaian kualitas jalan terbangun antar wilayah mengindikasikan bahwa upaya rehabilitasi, pemeliharaan dan rekonstruksi belum merata di semua wilayah. Persoalan ini disebabkan oleh jauhnya rentang kendali serta sulitnya akses pada wilayah-wilayah tertentu.

Pada tahun 2018 dilakukan penetapan Status Jalan Provinsi Kalimantan Timur yang baru melalui Keputusan Gubernur No. 622/K.295/2018 tentang Penetapan Ruas-ruas menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi yaitu sepanjang 895.06 Km. dari perubahan Panjang jalan tersebut, maka kondisi mantap jalan provinsi mengalami perubahan mencapai 52,85 % dan tidak mantap mencapai 47,51 % di tahun 2018.

Salah satu sektor strategis pembangunan di Kalimantan Timur adalah Sumber Daya Air. Keberadaannya tidak hanya krusial untuk pemenuhan kebutuhan dasar tetapi juga menyangkut aktivitas perekonomian. Pada periode RPJMD sebelumnya, pembangunan sektor Sumber Daya Air difokuskan pada 3

aspek, yakni upaya pemenuhan Kebutuhan Air baku baik untuk kebutuhan domestik dan industri, Pembangunan jaringan irigasi untuk memberikan suplai air pada lahan pertanian, serta upaya pengendalian daya rusak air secara khusus pada pengendalian banjir.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor ekonomi yang kesinambungannya sangat bergantung pada suplai air yang memadai. Pada tahun 2017, luas lahan pertanian yang terlayani jaringan irigasi baru mencapai 13.618,5 Ha, atau 14,4% dari luas seluruh lahan sawah eksisting di Kaltim. Luasan tersebut tersebar di seluruh Kabupaten/Kota serta mencakup seluruh kewenangan baik Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten. (Tabel Kondisi Sawah Eksisting di Kaltim)

Tabel 2.9
Kondisi Sawah Eksisting di Kaltim

NO	KAB/KOTA	Sawah Irigasi (Ha)	Sawah Non-Irigasi (Ha)	Luas Sawah (Ha)
1	Paser	0	12.702	12.702
2	Kutai Barat	608	8.111	8.719
3	Kutai Kartanegara	6.071	29.921	35.992
4	Kutai Timur	2.881	6.874	9.775
5	Berau	2.831	7.654	10.485
6	Penajam Paser Utara	933	11.272	12.205
7	Mahakam Ulu	0	480	480
8	Balikpapan	0	250	250
9	Samarinda	294,5	3.453,5	3.748
10	Bontang	0	74	74
	TOTAL	13.618	80.791,5	94.410

Sumber : Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, & Holtikultura Prov. Kaltim, 2018

Sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta diperkuat oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kewenangan Pengelolaan Daerah Irigasi, terdapat 8 Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah provinsi dengan total luasan 12.051 Ha. Dari luasan tersebut, yang terlayani jaringan irigasi baru mencapai 56,59% atau seluas 6.820 Ha. Rencana pembangunan jaringan irigasi pada 4 Daerah Irigasi mencapai 83 Km. Hingga tahun 2017

realisasi pembangunan jaringan irigasi tersebut baru mencapai \pm 26 Km atau hanya 31%.

Tabel 2.10
Kondisi Daerah Irigasi di Kaltim

NO	DAERAH IRIGASI	LUAS DI (Ha)
1	Biatan	1.779
2	Labanan	1.100
3	Merancang	1.200
4	Semurut	1.089
5	Kaliorang	1.300
6	Selangkau	2.987
7	Marangkayu	1.507
8	Sungai Buluh	1.089
TOTAL		12.051

Sumber: Data Sektoral Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Dalam proses perencanaan pembangunan jaringan irigasi dan pencetakan sawah, integrasi memang belum dilakukan hingga posisi/lokasi spesifik. Penyebab utama dari hal ini adalah belum tersedianya data geospasial yang akurat mengenai kondisi lahan sawah eksisting serta rencana lokasi pencetakan sawah. Penyediaan data yang akurat dan mutakhir sangat diperlukan agar kedepannya persoalan ini tidak menjadi penghambat Kaltim untuk meningkatkan indeks pertanian dan presentase ketersediaan beras.

Pemenuhan kebutuhan air baku baik untuk kebutuhan domestik dan industri juga menjadi perhatian penting Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Hingga saat ini dan 5 tahun kedepan, hampir seluruh Kabupaten/Kota mengalami defisit air baku.

Tabel 2.11
Defisit Kebutuhan Air Baku

No.	Kabupaten / Kota	Defisit Kebutuhan Air (m ³ /Thn)	
		2018	2023
1	Kabupaten Paser	(13.262.992,45)	(16.823.065,72)
2	Kabupaten Berau	(2.426.389,82)	(6.119.490,31)
3	Kabupaten Kutai Kartanegara	(2.453.614,96)	(13.252.406,91)
4	Kabupaten Kutai Barat	(4.109.424,37)	(4.572.610,85)
5	Kabupaten Kutai Timur	(16.181.957,16)	(25.275.031,62)
6	Kabupaten Penajam Paser Utara	(8.472.603,46)	(9.696.067,38)
7	Kota Bontang	(3.124.422,15)	(5.796.593,97)

No.	Kabupaten / Kota	Defisit Kebutuhan Air (m ³ /Thn)	
		2018	2023
8	Kota Balikpapan	(4.512.187,52)	(3.382.418,18)
9	Kota Samarinda	(22.710.346,28)	(18.568.251,44)
10	Kabupaten Mahakam Ulu	(4.109.424,37)	(4.572.610,85)

Sumber: Data Sektoral Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Defisit air baku lebih disebabkan masih kurangnya pembangunan infrastruktur pengambil air baku pada air permukaan dan semakin berkurangnya cadangan air tanah. Perencanaan dan pembangunan infrastruktur tersebut sudah dilakukan pada beberapa lokasi prioritas. Beberapa diantaranya telah terbangun dan sisanya belum direalisasikan. Terdapat pula beberapa prasarana yang telah terbangun namun belum dapat dioperasikan. Kekurangan prasarana dan sarana air baku berpengaruh pada distribusi dan ketersediaan air minum.

Permasalahan sumber daya air lainnya di Provinsi Kalimantan Timur adalah belum optimalnya akses air bersih terutama untuk air minum. Pembangunan infrastruktur dasar untuk meningkatkan kualitas layanan air minum dapat dilakukan melalui peningkatan cakupan pelayanan air minum.

Tabel 2.12
Penduduk Terlayani Air Bersih Perpipaian

NO	KABUPATEN/KOTA	Sambungan Rumah (SR)			Cakupan Layanan Air Minum Perpipaian (%)		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	PASER	15.882	18.743	19.050	41,93	24,21	38,29
2	PENAJAM PASER UTARA	4.798	5.339	5.470	15,79	14,19	15,87
3	SAMARINDA	127.633	137.135	146.225	89,60	90,96	95,46
4	BALIKPAPAN	87.999	95.781	97.243	76,84	76,50	76,98
5	KUTAI KERTANEGARA	65.026	69.942	68.035	59,86	63,25	63,39
6	KUTAI BARAT	9.560	9.987	10.012	34,58	34,25	34,35
7	KUTAI TIMUR	17.727	20.656	15.945	25,79	31,67	33,13
8	BERAU	13.159	16.120	16.517	40,71	44,34	44,70
9	BONTANG	19.212	22.970	23.999	80,23	84,37	87,05
10	MAHAKAM ULU	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
JUMLAH		360.996	396.673	402.496	51,7	51,5	54,3

Sumber: Data Sektoral Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Berdasarkan data di atas, peningkatan cakupan pelayanan air bersih perpipaan mengalami peningkatan meskipun belum maksimal, dimana pada tahun 2015 sebesar 51,7% dan pada tahun 2017 meningkat sebesar 54,3%. Masih minimnya cakupan air bersih perpipaan disebabkan oleh Masih kurangnya infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

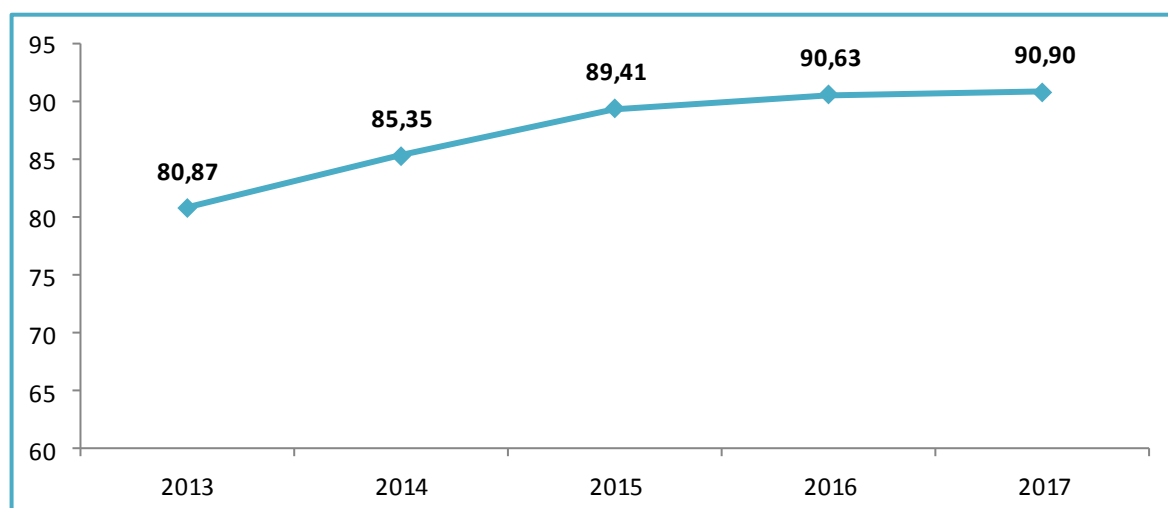
Tabel 2.13
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama
di Kalimantan Timur Tahun 2015-2017 (%)

No.	Sumber Air Minum	2015	2016	2017
1.	Ledeng meteran dan eceran	22,68	19,66	23,40
2.	Air kemasan dan air isi ulang	59,57	65,57	68,14
3.	Sumur bor dan sumur terlindungi	7,15	5,91	4,76
4.	Sumur tak terlindung, mata air terlindung/tak terlindungi, sungai air hujan dan lainnya	10,59	8,85	3,66

Sumber: Statistik Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur, 2017

Persoalan cakupan layanan air minum yang belum optimal, membuat masyarakat lebih memilih air kemasan dan air isi ulang sebagai sumber air minum. Hal ini terlihat pada tabel di atas, cakupan sumber air minum berupa air kemasan dan air isi ulang memiliki persentase tertinggi selama tiga tahun terakhir.

Grafik 2.21
Persentase Rumah tangga dengan Sumber Air Minum Bersih
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

Perusahaan air minum di Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan segala daya dan upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih. Pada tahun 2015 sendiri sudah terdapat 9 perusahaan air minum tersebar di kabupaten/kota dengan kapasitas produksi efektif sebesar 7.181 liter/detik.

Selain mengukur kualitas bangunan perumahan, kinerja pelayanan dasar di bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman juga dapat dilihat dari akses dan kualitas sanitasi. Sanitasi yang layak mengindikasikan kualitas sistem kesehatan lingkungan tempat tinggal. Kualitas sanitasi dapat dilihat dari penggunaan fasilitas sanitasi seperti jamban dan tangki septik.

Tabel 2.14
Perumahan Berdasarkan Fasilitas Sanitasi
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2017

Fasilitas Perumahan	2015	2016	2017
Jamban sendiri	89,71	89,75	91,76
Jamban dengan Tangki Septik/IPAL	70,08	77,66	76,56

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, 2017

Pada tahun 2017, sebagian besar RT telah mempunyai jamban sendiri sebesar 91,76% dari total RT keseluruhan. Capaian tersebut mengindikasikan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan, proporsi RT yang mempunyai jamban dengan pembuangan akhir berupa tangki septik sebesar 76,56%, sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Di samping fasilitas sanitasi, akses air bersih juga menjadi salah satu indikator rumah layak huni. Pada tahun 2016, rumah tangga yang mendapat akses air minum layak mencapai 92,25% dari total rumah tangga, meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun 7,75% sisanya belum dapat mengakses air minum layak.

Tabel 2.15
Penanganan Sampah dan Sampah Terangkut per Hari

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017	2018
% Penanganan sampah	-	75,24 %	77,5 %	78,5 %	72,29 %	67,62 %
% Sampah terangkut per hari	-	-	65,95 %	64,61 %	71,19 %	65,62 %

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

Penanganan sampah menunjukkan tren penurunan dari tahun 2014 hingga 2018. Begitu juga dengan persentase sampah yang terangkut pada jangka waktu tahun yang sama. Berbasis data tersebut, maka persoalan yang dihadapi oleh Kalimantan Timur adalah belum optimalnya penanganan pesampahan. Menurut hasil FGD persoalan ini disebabkan oleh belum adanya TPA regional dan rendahnya kesadaran masyarakat.

Meskipun belum memiliki TPA Regional, terdapat beberapa TPA di Kabupaten Kota yang bisa dioptimalkan. Namun ada satu kabupaten yang belum memiliki TPA, yaitu Mahakam Ulu. Berikut adalah sebaran lokasi TPA dan sistem operasionalnya di Provinsi Kalimantan Timur:

Tabel 2.16
Sebaran Lokasi TPA dan Sistem Operasionalnya di Provinsi Kalimantan Timur

Kabupaten/Kota	Nama TPA	Sistem Operasional TPA	Luas TPA (Ha)
Balikpapan	Manggar	<i>Control Landfill</i>	±28
Samarinda	Bukit Pinang	<i>Open Dumping</i>	±9,5
	Sambutan	<i>Control Landfill</i>	±30
Bontang	Bontang Lestari	<i>Control Landfill</i>	±15 (aktif 6 ha)
Paser	Janju	<i>Control Landfill</i>	10,499
	Batu Sopang	<i>Control Landfill</i>	±2 (rencana menjadi 5 ha)
Penajam Paser Utara	Buluminung	<i>Control Landfill</i>	±10
Kutai Timur	Batotak	<i>Control Landfill</i>	±12
Kutai Kartanegara	Bekotok	<i>Open Dumping</i>	±4
Kutai Barat	Belau	<i>Control Landfill</i>	±15
Berau	Bujangga	<i>Control Landfill</i>	±10
Mahakam Ulu	-	-	-

Sumber: Data Sektoral Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Timur, 2017

Jika ditinjau dari prasarana persampahan, semua kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur sudah memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) kecuali Kabupaten Mahakam Ulu. Dari 11 TPA yang ada, dua diantaranya masih menggunakan sisten *open dumping* yaitu TPA Bukit Pinang di Samarinda dan TPA Bekotok di Kutai Kartanegara, sedangkan 9 TPA lainnya sudah menggunakan sistem *Control Landfill*. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, proses akhir sampah idealnya dilakukan

dengan metode *control landfill*, *sanitary landfill* dan teknologi ramah lingkungan. Oleh karena itu, proses akhir sampah dengan metode *open dumping* harus segera diganti minimal dengan metode *control landfill*. Meskipun demikian, metode *control landfill* ini merupakan metode antara sebelum mampu menerapkan sistem *sanitary landfill*. Oleh karena itu, perbaikan metode pemrosesan akhir sampah perlu untuk diperbaiki terutama pada TPA yang masih menggunakan metode *open dumping*. Upaya tersebut penting untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.

Dari aspek pengendalian daya rusak air, dua fenomena utama yang menjadi fokus perhatian adalah pengendalian banjir dan abrasi. Tabel berikut memberikan gambaran mengenai prediksi luas genangan banjir di seluruh wilayah Kaltim.

Tabel 2. 17
Daerah Rawan Banjir Kalimantan Timur

No.	Kabupaten/Kota	DAS	Perkiraan Luas Genangan
1	Kota Balikpapan	Sungai Ampal	130
		Klandasan	50
		Sepinggan	50
2	Kota Samarinda	Karangmumus	100
		Karangasam Besar	100
		Karangasam Kecil	30
		Loa Bakung	20
		Loa Lah	15
		Rapak Dalam	30
		Keledang	5
		Sempaja	20
		Bengkuring	15
		Palaran	30
3	Kota Bontang	Bontang	120
		Guntung	20
4	Kabupaten Paser	Longkali/Telakai	1000
		Kandilo	200
5	Kabupaten Berau	Segah	200
		Bayur	5
6	Kabupaten Kutai Karta Negara	Sungai Mahakam	100
		Medeka	200
7	Kabupaten Kutai Timur	Sungai Sanggata	500
		Sungai Bengalon	100
8	Kabupaten Kutai	Sungai Mahakam	500

No.	Kabupaten/Kota	DAS	Perkiraan Luas Genangan
	Barat		
9	Kabupaten Mahulu	Sungai Mahakam	500
10	Kabupaten PPU	Tunan	20

Sumber: Data Sektoral Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Selain disebabkan oleh faktor geografis masing-masing Kabupaten/Kota, intensifnya kegiatan pembangunan diikuti pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukannya menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya frekuensi banjir di wilayah Kaltim. Salah satu kondisi riil yang terlihat adalah banyaknya aktivitas penduduk di atas badan sungai yang menyebabkan alur sungai semakin sempit dan sedimentasi semakin intensif. Drainase perkotaan juga mengalami sedimentasi yang cukup tinggi sementara kegiatan Operasi dan Pemeliharaan belum cukup memadai.

Upaya pengendalian banjir secara struktural kerap terkendala permasalahan sosial terutama pada proses pengadaan lahan. Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan juga masih jauh dari harapan. Sejatinya jika volume sampah dan sedimentasi yang masuk ke sungai dan saluran drainase dapat dikurangi maka frekuensi kejadian banjir baik dari sisi durasi maupun tinggi genangan dapat sedikit direduksi. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai hubungan antara menjaga lingkungan dengan penurunan risiko banjir merupakan upaya yang terus dilakukan dengan harapan mengurangi kebiasaan buruk masyarakat yang membawa dampak buruk bagi lingkungan.

Posisi geografi Provinsi Kalimantan Timur memberi konsekuensi wilayah ini memiliki potensi Abrasi. Hingga saat ini infrastruktur pengendali abrasi belum tersedia secara memadai. Berdasarkan hasil identifikasi terdapat 35.370 m garis pantai di Kaltim dalam kondisi kritis. Dari total panjang pantai kritis tersebut baru 9.086 m yang ditangani. Jika dikonversi menjadi luasan, wilayah pantai kritis yang belum tertangani mencapai 1.601 Ha.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1

Tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2036. Adapun 8 Kabupaten/ Kota di Kalimantan Timur yang telah menetapkan Perda RTRW Kabupaten/ Kota lebih dulu sebelum ditetapkannya Perda RTRWP, yaitu Kota Balikpapan, Samarinda, Bontang, Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara, Kutai Timur, Kutai Barat, dan Kutai Kartanegara. Sementara untuk Kabupaten Berau, baru menetapkan Perda RTRW-nya pada November 2017 lalu. Adapun Kabupaten Mahakam Ulu yang saat ini masih berproses pengajuan Persetujuan Subtansi ke Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN.

Adanya perbedaan waktu dalam menetapkan Perda RTRW Kabupaten/Kota dengan Provinsi menyebabkan masih terdapat perbedaan dalam menetapkan peruntukan pola ruang. Terhadap perbedaan tersebut, perlu dilakukan Peninjauan Kembali (PK) dengan mengacu pada Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali RTRW. Adapun tabel dibawah ini .

Tabel 2.18
Data Progres Peninjauan Kembali RTRW Provinsi/ Kabupaten / Kota

No	RTRW Kabupaten / Kota	Tahun PK	Progres Pelaksanaan PK RTRW											Permasalahan
			Persiapan	SK Penetapan PK	SK Tim PK	PK	Rekom PK	Revisi	Rekom Gub	Persub ATR	DPRD	Evaluasi Provinsi	PERDA	
1	Kota Balikpapan	2016	2016	√	√	2016	Revisi	2017	-	-	-	-	-	Target 2018 : Rekom Gub dan Persub ATR
2	Kota Bontang	2016	2016	√	√	2016	Revisi	2016	Tahun 2017	-	-	-	-	Proses pengajuan Persub ATR, namun terkendala belum ada keepakatan pola ruang dengan PT. PKT sebagai stakeholder di Bontang
3	Kabupaten Kutai Kartanegara	2017	2017	√	√	2017	Revisi	-	-	-	-	-	-	Sudah review RTRW tahun 2017 (kajian awal), SK Rekom Hasil PK: No 407/SK- BUP/HK/2017 tanggal 27 Desember 2017
4	Kabupaten Kutai Barat	2017	2018	√	√	2018	Revisi	2019	-	-	-	-	-	ada di presentasi Rakor BKPRD 2017 dan Surat Laporan 644/644/DPUPR- KB/IV/2018
5	Kota Samarinda	2018	2018	√	√	2018	-	-	-	-	-	-	-	PK mulai dari Februari 2018, SK Penetapan dan SK Tim sedang disusun
6	Kabupaten PPU	2018	2017	√	√	2019	-	-	-	-	-	-	-	sudah review RTRW tahun 2017 (kajian awal)
7	Kabupaten Kutai Timur	2020	Belum Masuk Waktu Peninjauan Kembali											
8	Kabupaten Paser	2019	Belum Masuk Waktu Peninjauan Kembali											TA 2018 melakukan Review RTRW (kajian awal PK)
9	Kabupaten Berau	2021	Belum Masuk Waktu Peninjauan Kembali											

Selain melakukan pengawalan terhadap Kabupaten/Kota yang melakukan penyusunan Perda RTRWK/K maupun PK RTRWK/K, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui TKPRD juga melakukan penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) sebagai turunan dari Perda RTRWP. Namun dalam pelaksanaannya, penyusunan dokumen RTR KSP mengalami beberapa kendala diantaranya belum tersedianya peta dasar skala rinci yang dibutuhkan, yaitu skala 1:25.000 – 1:5.000 dan perlunya melakukan penyesuaian materi teknis yang telah disusun terhadap beberapa KSP dengan mengacu pada Permen ATR/BPN Nomor 37 Tahun 2016.

Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Kalimantan Timur belum dapat berjalan secara optimal, dikarenakan belum menyusun dokumen terkait arahan peraturan zonasi, insentif dan disinsentif, serta arahan pelanggaran sanksi sebagai kendali pada pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Untuk meningkatkan kualitas bangunan di Provinsi Kalimantan Timur, diperlukan peningkatan sistem pengawasan konstruksi bangunan. Sistem pengawasan ini terkait dengan kebutuhan sumber daya manusia tenaga ahli dan terampil yang belum terpenuhi.

Tabel 2.19
Data Tenaga Kerja dan Tenaga Ahli Jasa Konstruksi Prov. Kaltim
Tahun 2017

No	Indikator	Jumlah
1	Tenaga Kerja Konstruksi	83.247 orang
2	Tenaga Kerja Konstruksi Bersertifikat	20.526 orang
3	Tenaga Kerja Konstruksi Belum Bersertifikat	62.721 orang
4	Jumlah Badan Usaha	5.793 orang
5	Tenaga Kerja Ahli K3	145 orang
5	Jumlah Minimal Tenaga Ahli K3	11.586 orang

Sumber: Bina Konstruksi, 2018

Data terkait sumber daya manusia tenaga ahli dan terampil yang sudah tersertifikasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.20
Sertifikasi Keterampilan dan Keahlian LPJ Kalimantan Timur
Tahun 2017

No	Kualifikasi	Jumlah
Sertifikat Keterampilan		
1	Kelas I	1.578
2	Kelas II	166
3	Kelas III	122
TOTAL		1.866
Sertifikat Keahlian		
1	Madya	1.094
2	Muda	688
TOTAL		1.782

Sumber: Bina Konstruksi, 2018

Jumlah tenaga terampil yang sudah memiliki sertifikat mencapai 1.866 orang dan tenaga ahli mencapai 1.782 orang. Selain untuk memenuhi jumlah ideal tenaga ahli, peningkatan keahlian tenaga kerja sangat diperlukan untuk mengatasi kemungkinan kegagalan pembangunan, kegagalan konstruksi, bahkan penyimpangan ke ranah hukum. Melalui UU Nomor 2 Tahun 2017, pemerintah mengharapkan jumlah tenaga ahli dan terampil meningkat melalui pembagian tugas pengembangan oleh pemerintah daerah dan kabupaten/kota.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman bertujuan untuk memastikan terpenuhinya perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni, terjangkau, aman dan berwawasan lingkungan bagi masyarakat. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, pemenuhan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni merupakan upaya pencapaian SDG's (*Sustainable Development Goal's*) yang ke-13 yaitu kota dan permukiman yang berkelanjutan. Adapun kondisi perumahan dan kawasan permukiman di Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 2.21
Luas Kawasan Pemukiman Eksisting dan Luas Kawasan Peruntukan
Pemukiman di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 (Ha)

Kabupaten/Kota	Luas Kawasan Pemukiman Eksisting	Luas Kawasan Peruntukan Pemukiman
Samarinda	12.910,00	39.156
Kutai Kartanegara	9.558,62	63.928
Bontang	3.024,09	7.775
Kutai Timur	9.906,89	79.923
Berau	5.818,32	76.643
Balikpapan	8.905,67	25.318
Penajam Paser Utara	3.342,19	27.123
Paser	3.944,22	62.298
Kutai Barat	1.359,78	11.311
Mahakam Ulu	138,94	2.790
Total	58.908,76	396.265

Sumber : RTRW Prov. Kaltim 2016-2036

Luas kawasan peruntukan pemukiman mencapai 396.265 Ha. Pada tahun 2017, luas kawasan pemukiman eksisting sebesar 58.908,76 Ha atau 14,87 persen dari total luas kawasan peruntukan pemukiman. Sebagian besar kawasan pemukiman berada di Kota Samarinda (12.910 Ha) yang mencapai 21,9 persen dari total luas kawasan pemukiman.

Pertumbuhan penduduk di Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke tahun khususnya di wilayah perkotaan memberikan dampak terhadap kebutuhan rumah yang semakin meningkat. Apabila pertumbuhan penduduk tidak diikuti oleh perkembangan perumahan maka akan terjadi *backlog* dimana seringkali angka pertumbuhan penduduk lebih besar daripada ketersediaan perumahan.

Tabel 2.22
Perkiraan Tambahan Kebutuhan Rumah di Provinsi Kalimantan Timur dari
Tahun Awal Rencana

No.	Kabupaten/kota	Tahun 2017			Tahun 2018	
		Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Rumah	Backlog	Proyeksi Jumlah Rumah Tangga	Proyeksi Kebutuhan Rumah
1	Paser	37.056	28.363	8.693	80.863	43.807
2	Kutai Barat	21.548	17.711	3.837	32.040	10.492
3	Kutai	128.023	104.405	23.618	225.278	97.255

No.	Kabupaten/kota	Tahun 2017			Tahun 2018	
		Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Rumah	Backlog	Proyeksi Jumlah Rumah Tangga	Proyeksi Kebutuhan Rumah
	Kartanegara					
4	Kutai Timur	17.249	12.740	4.509	139.762	122.513
5	Berau	83.549	66.413	8.800	87.973	4.424
6	Penajam Paser Utara	43.005	34.730	7.490	48.389	5.384
7	Mahakam Hulu	612	529	83	5.822	5.210
8	Balikpapan	161.892	112.086	49.806	169.106	7.214
9	Samarinda	204.605	144.370	51.069	233.001	28.396
10	Bontang	37.565	26.072	11.493	49.859	12.294
TOTAL		735.104	547.419	169.398	1.072.094	336.990

Sumber: Laporan Akhir RP3KP Prov Kaltim, 2018

Angka backlog diatas merepresentasikan kebutuhan rumah untuk keluarga yang belum memiliki rumah. Pemerintah memfasilitasi/mendorong agar setiap keluarga khususnya yang tergolong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat menghuni rumah yang layak, baik dengan cara sewa/kontrak, beli/menghuni rumah milik sendiri, maupun tinggal di rumah milik kerabat/keluarga selama terjamin kepastian bermukimnya. Tantangan pemerintah dalam pengurangan backlog adalah harga rumah yang ditawarkan tidak sebanding dengan daya beli Masyarakat Berpenghasilan Rendah sehingga mengakibatkan masyarakat lebih memilih bermukim di area kumuh dan tidak layak huni.

Tabel 2.23
Lokasi Kawasan Pemukiman Kumuh Provinsi
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

No.	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)	Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh
1.	Balikpapan	224,86	153,5
2.	Samarinda	133,33	63,68
3.	Kutai Timur	75,93	-
4.	Bontang	73,56	47,43
5.	Kutai Kartanegara	172,67	11,68
6.	Berau	184,30	66,3
7.	Penajam Paser Utara	49,07	-
8.	Paser	10,68	10,68
9.	Kutai Barat	488,59	-
Total		1412,99	353,27

Sumber: SK Kumuh Kab Kota 2018

Total kawasan pemukiman kumuh yang berada di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan SK Bupati/Walikota sebesar 1.412,99 Ha. . Komponen-komponen pemukiman layak huni yang belum terpenuhi diantaranya adalah akses terhadap perumahan, sanitasi, jalan lingkungan dan PSU permukiman lainnya. Rendahnya akses masyarakat terhadap pemukiman layak huni juga disebabkan oleh kurang optimalnya upaya penataan pemukiman. Sampai tahun 2018, sudah tertangani 353.27 Ha dari luas kawasan kumuh yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, dan masih tersisa seluas 1.059,72 ha.

Permasalahan lain yang perlu diperhatikan dalam akses perumahan adalah kondisi rumah yang dihuni. Rumah tidak layak huni merupakan rumah yang belum memenuhi standar minimal dilihat dari kualitas jenis atap, lantai dan dinding rumah. Data mengenai rumah tidak layak huni di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Hingga tahun 2017 tercatat bahwa rumah tidak layak huni mencapai 51.722 unit (berdasarkan verifikasi pemda). Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang tinggal dalam kondisi rumah yang tidak layak. Ketidaklayakan rumah tersebut baik dari segi kualitas fisik rumah maupun kualitas fasilitas rumah.

Tabel 2.24
Perkiraan Tambahan Kebutuhan Rumah di Provinsi Kalimantan Timur
dari Tahun Awal Rencana

No	Kabupaten/kota	Rumah Tangga Tahun 2017	Unit Rumah Tahun 2017	Backlog Tahun 2017	Rumah Tangga Tahun 2038	Demand Rumah Th 2038
1	Paser	37.056	28.363	8.693	80.863	43.807
2	Kutai Barat	21.548	17.711	3.837	32.040	10.492
3	Kutai Kartanegara	128.023	104.405	23.618	225.278	97.255
4	Kutai Timur	17.249	12.740	4.509	139.762	122.513
5	Berau	83.549	66.413	8.800	87.973	4.424
6	Penajam Paser Utara	43.005	34.730	7.490	48.389	5.384
7	Mahakam Hulu	612	529	83	5.822	5.210
8	Balikpapan	161.892	112.086	49.806	169.106	7.214
9	Samarinda	204.605	144.370	51.069	233.001	28.396
10	Bontang	37.565	26.072	11.493	49.859	12.294
TOTAL		735.104	547.419	169.398	1.072.094	336.990

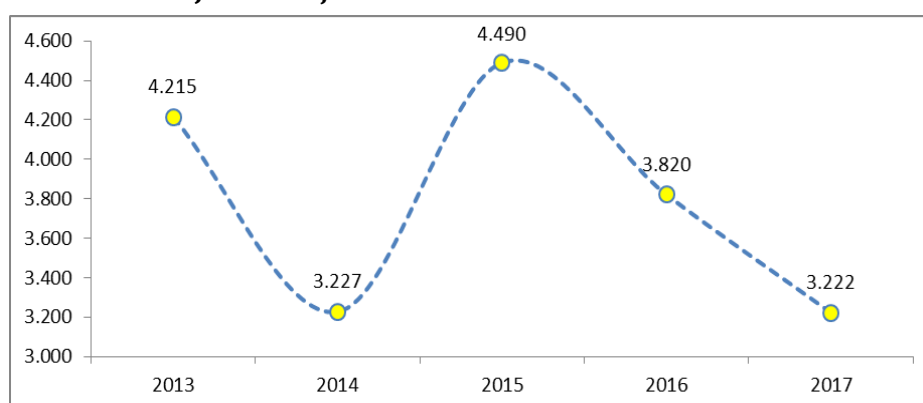
Sumber: Laporan Akhir RP3KP Prov Kaltim, 2018

Analisis backlog dilakukan untuk mengetahui jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah, dengan asumsi satu rumah tangga menempati satu rumah. Dengan demikian di Provinsi Kalimantan Timur masih dibutuhkan pembangunan rumah sebanyak 169.398 unit.

e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang relatif aman dari konflik sosial. Walaupun demikian, Kalimantan Timur masih menghadapi permasalahan tingkat kriminalitas yang cukup tinggi dan rendahnya penanganan tingkat kebencanaan.

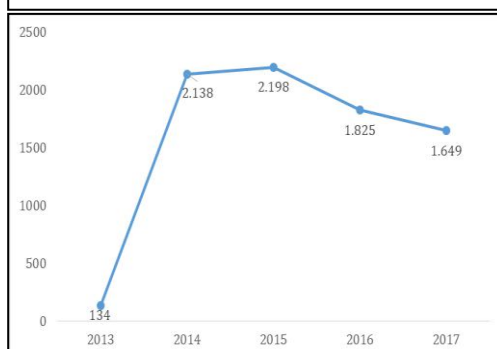
Gambar 2. 22
Jumlah Kejadian Kriminal di Kalimantan Timur



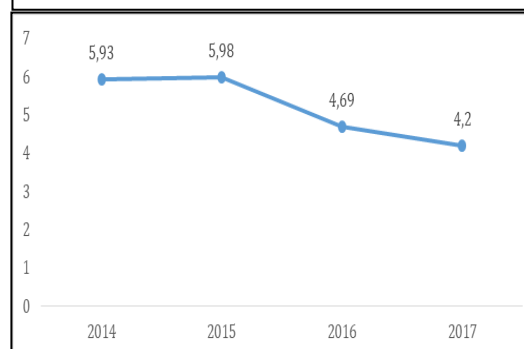
Sumber : Polda Kaltim

Permasalahan lain dalam memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat adalah kecenderungan penurunan ketersediaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Sat Linmas) di Provinsi Kalimantan Timur.

Gambar 2. 23
Jumlah Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017



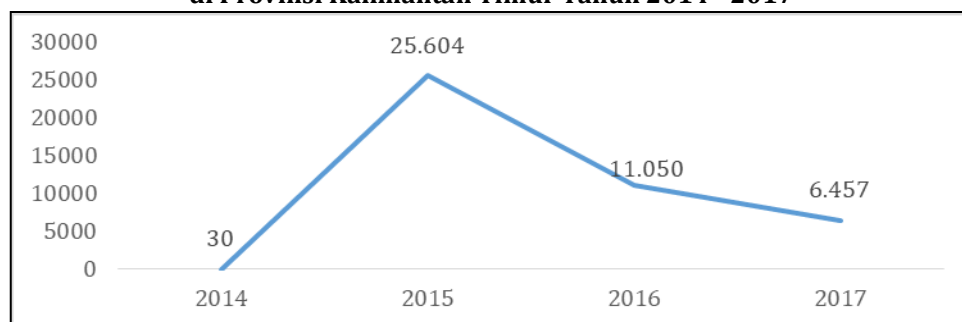
Gambar 2. 24
Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 - 2017



Sumber: Satpol PP Provinsi Kalimantan Timur, 2018

Jumlah Satpol PP di Kalimantan Timur pada tahun 2009 hingga 2013 mengalami fluktuasi. Peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2014 yaitu dari 134 personil pada tahun 2013 menjadi 2.138 personil pada tahun 2014. Akan tetapi, jumlah tersebut mengalami penurunan pada tahun 2016 dan 2017 yaitu masing-masing menjadi 1.825 dan 1.649 personil. Rasio Polisi Pamong Praja per satuan penduduk per 10.000 penduduk mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebanyak 0,84 persen, selanjutnya mengalami penurunan hingga tahun 2017.

Gambar 2. 25
Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 - 2017



Sumber: Satpol PP Provinsi Kalimantan Timur, 2018

Begitu juga dengan jumlah petugas Linmas yang saat ini mengalami penurunan. Padahal Sat Linmas berfungsi untuk membantu aparat pemerintah dalam memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta membantu kegiatan sosial kemasyarakatan di desa/kelurahan.

f. Sosial

Pemerintah daerah memiliki kewajiban menyelenggarakan urusan sosial dalam pelayanan dasar. Kewajiban tersebut merupakan kepanjangan dari UU nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial yang menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam prakteknya, urusan sosial lebih fokus pada penanganan dampak atau fenomena sosial yang membutuhkan intervensi sosial seperti penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Provinsi Kalimantan Timur mengalami permasalahan semakin meningkatnya jumlah penduduk penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Kondisi tersebut disebabkan oleh migrasi penduduk dari luar daerah. Kinerja pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial belum optimal karena peningkatan PMKS tidak sebanding dengan ketersediaan fasilitas pelayanan dan tenaga kesejahteraan sosial yang tersedia.

Salah satu permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian adalah masih terdapat 54 ribu keluarga Pra Sejahtera atau keluarga sangat miskin/fakir miskin. Sebagian besar penduduk fakir miskin berada di kawasan perkotaan, yaitu di Kota Samarinda (29,0% dari total keseluruhan Kaltim), Kota Balikpapan (21,3%), dan Kabupaten Kutai Kartanegara (20,5%).

Tabel 2. 25
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Sosial
Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					PILAR-TUJUAN SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Jumlah PMKS	Orang	120,971	113,807	113,807	247,167	243,459	I.1
2	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	%	0.02	0,02%	0,02%	0.01	31.09	I.1
3	PMKS yang Seharusnya Menerima Bantuan	Orang	355,636	355,636	355,636	7,869	76	I.1
4	PMKS yang memperoleh bantuan Sosial	%	23,69	14,12	14,12	54,67	99,60	I.1
5	Jumlah PMKS yang ditangani	Orang	26	26	26	26	75,696	I.1
6	Banyaknya panti asuhan	Unit	134	111	118	124	125	I.1
7	Banyaknya anak yang diasuh di panti asuhan	Anak	7,368	7,296	7,296	7,256	5.469	I.1
8	Banyaknya panti wredha	Unit	4	4	4	3	4	I.1
9	Banyaknya penghuni panti wredha	Orang	200	267	277	210	210	I.1

Sumber: Dinas Sosial Prov.Kaltim

2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

a. Koperasi dan UKM

Salah satu penunjang perekonomian masyarakat mikro adalah koperasi yang merupakan wadah kegiatan produktif masyarakat dalam perekonomian rakyat. Dalam lima tahun terakhir, perkembangan koperasi di Provinsi Kalimantan Timur cukup fluktuatif dan cenderung menurun. Pada tahun 2013, jumlah koperasi sebesar 5.916 unit dan menurun menjadi 5.184 unit di tahun 2017. Hal ini dikarenakan terjadinya pemekaran wilayah di Kalimantan Timur dan membentuk Provinsi baru yaitu Kalimantan Utara, imana ada beberapa Kabupaten/Kota yang sebelumnya berada di Provinsi Kalimantan Timur

masuk ke dalam Provinsi Kalimantan Utara. Hal itu menyebabkan Jumlah Koperasi dan juga mempengaruhi beberapa Indikator lainnya mengalami penurunan.

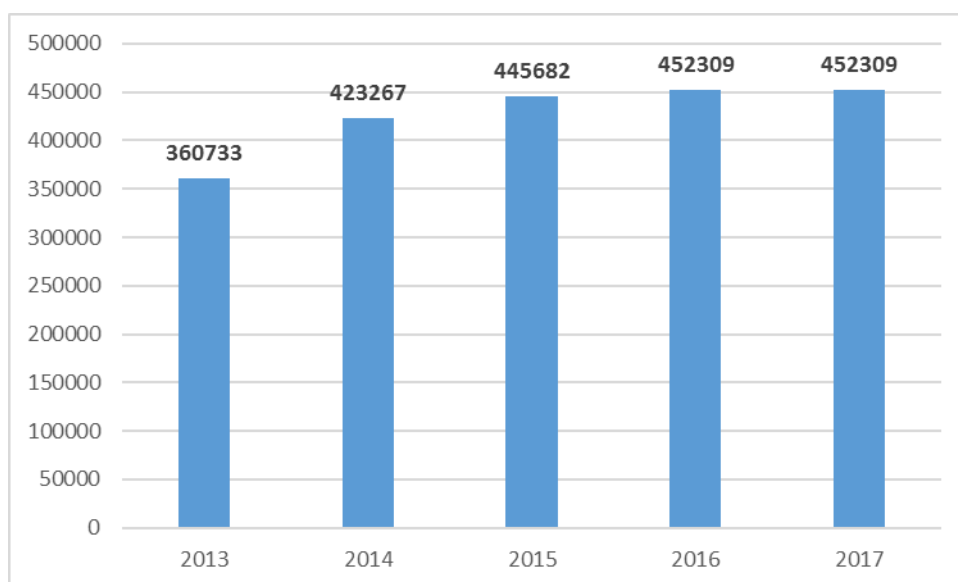
Tabel 2. 26
Perkembangan Koperasi Tahun 2013 s.d 2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Koperasi (Unit)	5,919	5,283	5,407	5,546	5,184
2	Persentase Koperasi Aktif (%)	66.73	72.7	67.99	64.08	71.05
3	Koperasi RAT (unit)	1,809	892	828	792	665
4	Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT (%)	91.87	23.22	22.52	21.5	18.06
5	Jumlah Anggota (orang)	390,360	344,310	341,269	299,068	121,455
6	Modal Sendiri (Rp Milyar)	361,686	577,062	691,816	783,438	637,694
7	Modal Luar (Rp Milyar)	1,156,218	1,439,290	1,291,882	996,328	531,331
8	Volume Usaha (Rp Milyar)	1,628,842	2,298,383	2,511,087	2,186,346	1,042,484
9	Sisa Hasil Usaha (Rp Milyar)	129,230	133,415	230,980	153,682	78,493
10	Jumlah Manager (orang)	397	290	273	237	149
11	Jumlah Karyawan (orang)	7,622	5,943	5,374	6,641	2,590

Sumber : Disperindagkop Prov Kaltim tahun 2018

Perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Kalimantan Timur pada tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Pada tahun 2013, jumlah UMKM sebesar 360.733 unit meningkat menjadi 452.309 unit pada tahun 2017.

Gambar 2. 26
Jumlah UMKM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 - 2017



b. Tenaga Kerja

Produktivitas perekonomian daerah dipengaruhi oleh variabel tenaga kerja. Variabel yang dapat digunakan untuk melihat kondisi baik atau buruknya ketenagakerjaan di suatu daerah adalah angkatan kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Tingkat Kesempatan Kerja. Kinerja pembangunan bidang ketenagakerjaan di Kalimantan Timur sudah cukup baik, namun masih menghadapi permasalahan terkait daya saing tenaga kerja.

Tabel 2. 27
Capaian Kinerja Pembangunan Ketenagakerjaan
Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					PILAR-TUJUAN SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)	%	15.55	40.61	22.12	20.03	22.61	11.8
2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	63.53	63.48	62.39	67.79	63,75	11.8
3	Persentase penduduk bekerja terhadap usia kerja	%	58.48	58.7	57.71	62.4	59,35	11.8
4	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Orang	18,105	13,080	7,078	5,982	10,365	11.8
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Orang	292,582	322,064	385,796	358,826	449,465	11.8
6	Rasio lulusan S1/S2/S3							1.4

Sumber : BPS Prov.Kaltim dan Dinas Tenaga Kerja Prov.Kaltim

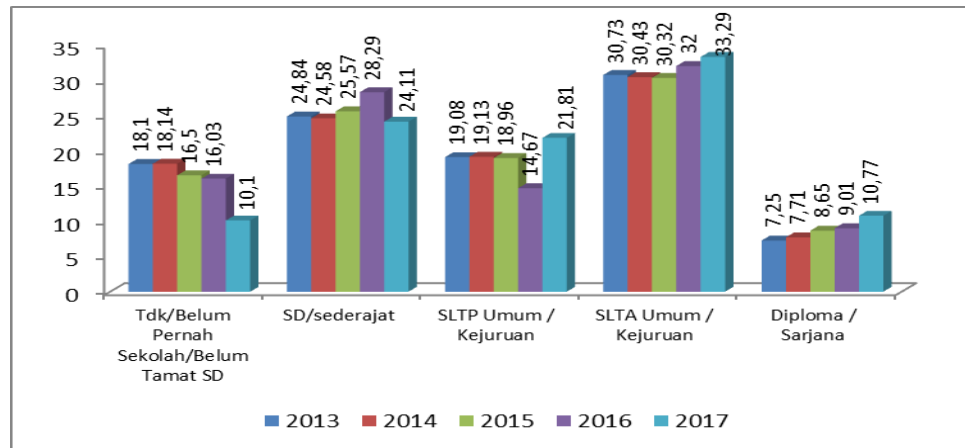
Angkatan kerja Provinsi Kalimantan Timur semakin meningkat selama 5 tahun terakhir, dengan daya saing yang rendah dilihat dari tingkat pendidikan sebagian besar hanya lulusan pendidikan menengah.

Tabel 2. 28
Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Utama
di Kalimantan Timur, 2012 - 2017

Uraian Kegiatan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Angkatan Kerja	1.777.381	1.497.572	1.537.938	1.539.491	1.717.892	1.654.964
Bekerja	1.619.118	1.378.610	1.421.952	1.423.957	1.581.239	1.540.675
Pengangguran	158.263	118.692	115.986	115.534	136.653	114.289
Bukan Angkatan Kerja	889.718	859.778	884.603	928.020	816.221	941.028
Sekolah	246.473	263.369	271.956	272.331	203.316	247.456
Mengurus RT	557.100	526.867	521.681	560.800	535.158	612.093
Lainnya	66.145	69.542	90.966	94.889	77.747	81.479

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur

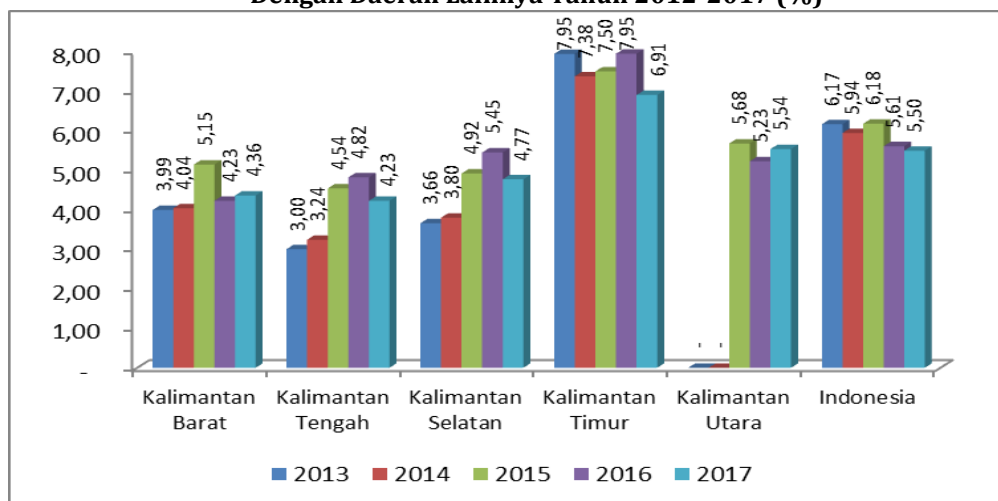
Gambar 2. 27
Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (%)



Sumber : BPS Prov.Kaltim 2017

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) menjadi salah satu indikator paling penting untuk mengetahui daya saing tenaga kerja karena berkaitan dengan ketersediaan lapangan kerja dan keterampilan tenaga kerja. Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Timur lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Nasional dan provinsi lainnya di Pulau Kalimantan. Pengembangan perekonomian Kaltim berimplikasi terhadap peningkatan jumlah pencari kerja yang masuk dari daerah lain, ditambah dengan kurangnya ketersediaan lapangan kerja di sektor ekonomi padat karya, hal ini semakin memperbesar tingkat pengangguran terbuka.

Gambar 2. 28
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Timur
Dengan Daerah Lainnya Tahun 2012-2017 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2018

c. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

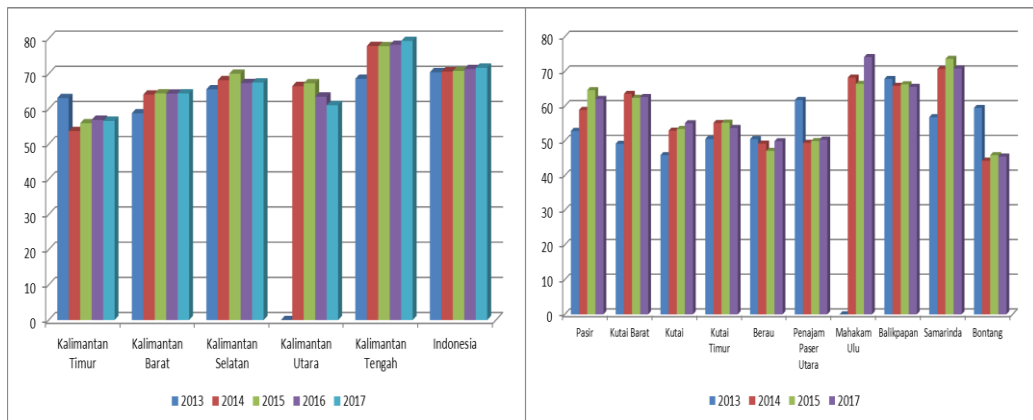
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga mempertimbangkan indikator kesejahteraan perempuan di samping IPG, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG menunjukkan tingkat partisipasi perempuan dibanding dengan laki-laki dalam berbagai aktivitas publik dan kontribusinya dalam pendapatan. Capaian IDG dihitung dari tiga aspek yaitu: keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, teknisi, dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Capaian IDG Provinsi Kalimantan Timur masih lebih rendah dibandingkan dengan daerah pembanding lainnya dan Nasional. Kondisi tersebut mengindikasikan pembangunan gender di Provinsi Kalimantan Timur masih belum optimal.

Tabel 2. 29
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					PILAR-TUJUAN SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		63.12	53.74	55.96	56.93	65.64	1.5
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		84.69	84.75	85.07	85.6	85.62	1.5
3	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (PNS Pemprov Kaltim)	%	39.53	39.63	40.52	39.37	44.86	1.5
4	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	%	39.95	42.26	48.93	47.69	42,33	1.5
5	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%			36.36	36.36		1.5
6	Rasio KDRT	%		12	1	7.12		1.5
7	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%						1.5
8	Banyaknya anak terlantar (0-21 tahun)	Anak	30,978	30,927	30,927	11,510		1.5
9	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	%	90.90	79.60	79.60	91.30	90.10	1.5

Sumber: BPS Kaltim dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan KB Prov.Kaltim

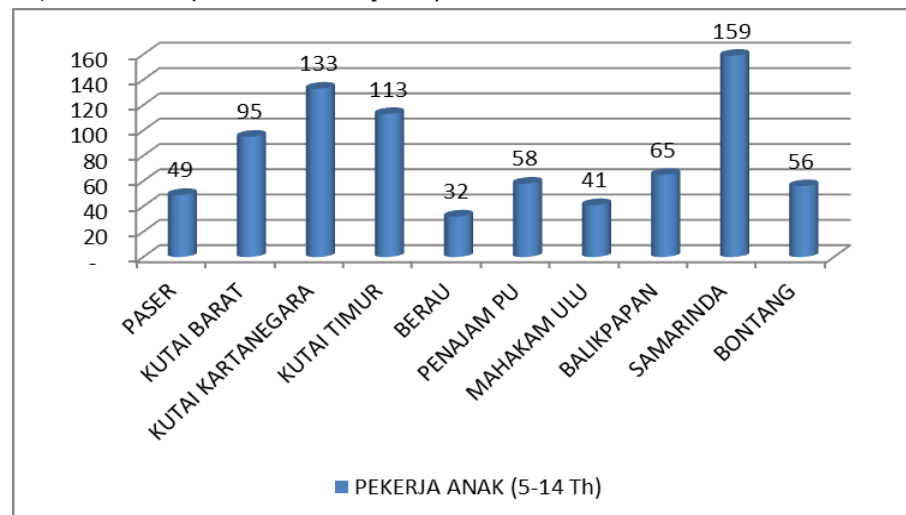
Gambar 2. 29
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten/Kota dan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (%)



Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan BPS Nasional

Provinsi Kalimantan Timur mengalami belum berkembangnya layanan publik ramah anak. Dari 10 kabupaten/kota, 9 daerah sudah menjadi pengembang kota/kabupaten layak anak. Sementara itu, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai barat dan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda memiliki jumlah pekerja anak yang cukup besar.

Gambar 2. 30
Jumlah Pekerja Anak di Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur Tahun 2017



Sumber: Basis Data Terpadu, TNP2K 2017

d. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Belum optimalnya pengembangan desa mandiri, karena Belum optimalnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa. Faktor yang

berpengaruh adalah masih terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga pendamping desa di daerah pedalaman, belum optimalnya fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna, belum optimalnya fasilitasi pelatihan dan akses pasar BUMDes, masih rendahnya koordinasi lintas sektor terhadap pembangunan desa.

Belum optimalnya fasilitasi penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, karena masih terbatasnya kemampuan memfasilitasi pelatihan bagi aparatur desa, belum optimalnya fasilitasi monitoring dan evaluasi pembangunan dan aparatur pemerintah desa.

e. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan khususnya beras dan daging di Provinsi Kalimantan belum memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Ketahanan pangan berhubungan dengan tiga aspek utama, yaitu ketersediaan pangan utama, akses atau distribusi pangan dan konsumsi pangan masyarakat. Berbagai indikator tersebut berhubungan erat dengan urusan kesehatan dan rumpun urusan ekonomi yang menjadi basis bagi pencapaian kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah.

Tabel 2. 30
Rasio Pemenuhan Beras/Kebutuhan Konsumsi Beras
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Produksi (GKG) (ton)	Beras Tersedia (ton)	Kebutuhan Konsumsi (ton)	Surplus/Minus (ton)	Ketersediaan (%)
1.	2013	3.275.844	439.439	275.704	373.446	-97.742	73,83
2.	2014	3.351.432	426.467	267.565	382.063	114.498	70,03
3.	2015	3.426.638	408.782	256.470	390.637	134.167	65,65
4.	2016	3.501.232	305.337	191.568	399.140	207.572	48,00
5.	2017	3.575.449	400.102	251.024	407.601	156.577	61,59

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov.Kaltim

Ketersediaan pangan terdiri dari pangan utama yang dikonsumsi masyarakat. Pada umumnya beras menjadi salah satu komponen dalam indikator tersebut. Ketersediaan pangan berkorelasi dengan stok cadangan pangan daerah. Ketersediaan pangan utama di Provinsi Kalimantan Timur

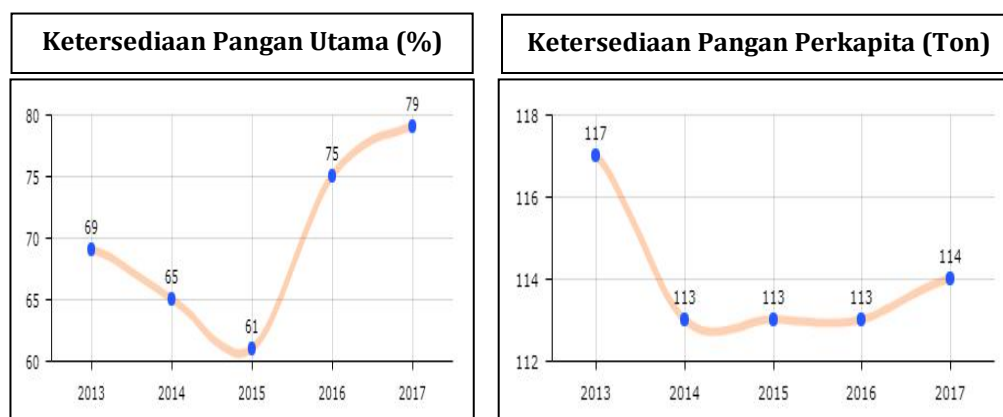
tetap harus ditingkatkan karena sebagian besar pangan utama berasal dari luar daerah.

Sampai tahun 2017, konsumsi beras per kapita di Kalimantan Timur sebesar 114 kg/kap/tahun, dan rasio pemenuhan beras lokal mencapai 61,54 % sampai tahun 2017. Pada tahun 2018 Tingkat konsumsi beras di Kalimantan Timur mengalami penurunan menjadi 89,79 kg/kap/tahun, sehingga tingkat pemenuhan beras di Kalimantan Timur pada tahun 2018 sebesar 73,53%. Tingkat konsumsi beras per kapita di Kalimantan Timur ini berada dibawah rata-rata nasional yaitu 92 kg/kap/tahun.

Stok beras di Kalimantan Timur sebagian besar berasal dari Surabaya, Sulawesi dan Kalimantan Selatan. Beras dari dalam daerah belum mampu memenuhi kebutuhan daerah dikarenakan tingkat produksi yang fluktuatif karena sebagian besar berasal dari sawah tadah hujan. Umur padi yang panjang juga menjadi penentu stok pangan beras dari dalam Provinsi Kalimantan Timur. Belum optimalnya stok cadangan pangan beras menjadi persoalan utama yang menjadi penyebab bagi ketersediaan pangan utama.

Ketersediaan pangan perkapita Provinsi Kalimantan Timur perlu menjadi perhatian utama untuk diintervensi oleh Pemerintah, karena erat dengan persoalan kemiskinan. Pemenuhan terhadap ketersediaan pangan per kapita secara merata dapat mempermudah akses masyarakat miskin terhadap pangan.

Gambar 2. 31
Ketersediaan Pangan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017



Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov.Kaltim

Penyebab lain masih rendahnya akses pangan di Provinsi Kalimantan Timur karena sulitnya distribusi pangan ke beberapa daerah. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya kualitas infrastruktur ke sentra pertanian. Panjangnya rantai distribusi pangan dari luar daerah maupun ke dalam daerah juga menjadi penyebab. Lebih dari 40% pedagang mendatangkan dari luar daerah yaitu dari Jawa dan Sulawesi kemudian didistribusikan ke pedagang menengah dan pengecer atau langsung pengecer.

f. Pertanahan

Urusan pertanahan termasuk urusan yang penting dalam pembangunan daerah, terutama pada unsur aset, legalitas, hingga adanya persoalan konflik pertanahan. Adanya konflik pertanahan yang perlu menjadi perhatian di Kalimantan Timur adalah terkait batas wilayah dan konflik tumpang tindih perijinan.

g. Lingkungan Hidup

Dalam konteks rencana pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur, lingkungan hidup menjadi salah satu isu penting yang harus diselesaikan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai salah satu barometer pencapaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup. Provinsi Kalimantan Timur sangat serius dalam meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dalam lima tahun terakhir di Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan.

Tabel 2. 31
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

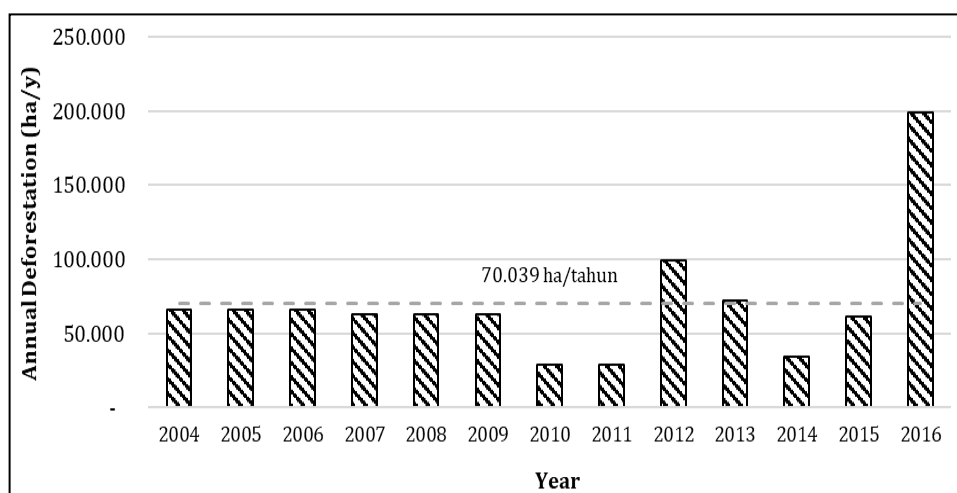
No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					PILAR-TUJUAN SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		72.41	75.24	81.97	83.03	82.64	
2	Persentase penurunan emisi dari BAU (%)	%	0.02	0.65	1.01	1.95	1.38	III.13
3	Indeks kualitas air sungai		7.59	3.04	2	3		III.14
4	Penegakan hukum lingkungan	%	86.21	86.36	100	100	100	IV.16
5	Persentase sampah terangkut per hari	%	64.61	90.33	66.43	87.51		III.11
6	Indeks Resiko Bencana							I.1
7	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	ha	45	11,160.25	181,125.00	12,740.00	104.00	III.6
8	Luas lahan terbuka tambang	ha	38,099.98	38,667.32	41,541.58	48,991.69	50,239.88	III.15
9	Luas lahan tambang yang direklamasi	ha	96,877.12	98,666.27	103,072.80	103,041.64	103,786.40	III.15
10	Emisi Gas Rumah Kaca tutupan hutan	ton CO2 Eq	10,276,303.00	23,831,368.00	31,085,172.00	19,725,868.92	19,433,145.44	III.15

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Prov.Kaltim

Kegiatan pembangunan, terutama yang bersifat fisik dan berhubungan dengan pemanfaatan sumberdaya alam jelas mengandung risiko terjadinya perubahan ekosistem yang selanjutnya mengakibatkan dampak yang bersifat negatif maupun positif. Oleh karena itu, aspek pelayanan umum dalam bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Provinsi Kalimantan Timur selain mengedepankan kemajuan sosial dan ekonomi juga berwawasan lingkungan.

Indeks tutupan hutan mengalami penurunan, persoalan ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu: tingginya alih fungsi hutan dan lahan, tingginya pencemaran air akibat dari limbah domestik, tingginya pencemaran udara, dan masih tingginya angka emisi GRK. Penurunan indeks tutupan hutan sejalan dengan kenaikan semakin tingginya laju deforestasi. Laju deforestasi Kalimantan Timur menunjukkan tren kenaikan yang signifikan pada tahun 2016. Terdapat lebih dari 7 juta ha hutan yang mengalami deforestasi.

Gambar 2. 32
Deforestasi di Provinsi Kalimantan Timur



Sumber: ER-PD FCPF Carbon Fund Kalimantan Timur, 2017.

Tingginya alih fungsi hutan dan lahan yang ditandai dengan menurunnya indeks tutupan hutan dan meningkatnya laju deforestasi disebabkan oleh tiga hal, yaitu: rendahnya pengawasan kawasan lindung, tingginya bukaan lahan oleh masyarakat dan dunia usaha dan rendahnya kegiatan penghijauan dan reboisasi terutama masih rendahnya reklamasi lahan tambang dan revegetasi kawasan lindung di Kalimantan Timur.

Besarnya emisi gas rumah kaca menjadi persoalan utama yang dihadapi oleh Kalimantan Timur. Pada tahun 2013 hingga 2017 emisi GRK menunjukkan tren yang fluktuatif. Namun saat ini sudah disusun berbagai kebijakan penanganan yang melibatkan multi-pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini. Masih tingginya emisi GRK di Kalimantan Timur disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: masih rendahnya penerapan RIL/RIL C pada IUPHHK-HA, masih rendahnya penanaman pada area cadangan karbon rendah, masih kurangnya perlindungan area cadangan karbon tinggi, masih kurangnya Jumlah perusahaan yang memanfaatkan limbah POME dan masih kurangnya perusahaan yang menerapkan penggunaan biodiesel 20%.

Hingga saat ini Provinsi Kalimantan Timur memiliki area cadangan karbon tinggi seluas 53.000 ha, sedangkan area cadangan karbon rendah seluas 1.462.000 Ha. Pada konteks penerapan penggunaan biodiesel, hingga saat ini terdapat 2 perusahaan pertambangan yang menerapkan B20 (Biodiesel 20%) PKB2B yaitu Berau Coal dan KPC.

h. Perhubungan

Gambaran umum mengenai pelayanan perhubungan merefleksikan tingkat akses dan kualitas transportasi di suatu daerah. Bidang urusan ini memiliki fungsi utama untuk memperlancar konektivitas antar wilayah sehingga mempercepat arus mobilisasi orang/barang dan jasa di suatu wilayah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan layanan transportasi dibagi atas beberapa aspek yaitu transportasi darat, laut, sungai, danau, penyeberangan dan udara. Akan tetapi, dalam konteks pembagian kewenangan pemerintahan sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah di level provinsi berkaitan dengan urusan perhubungan lebih ditekankan pada pelayanan perhubungan darat, laut, sungai, danau dan angkutan penyeberangan. Pelayanan perhubungan di Provinsi Kalimantan Timur sudah cukup baik dilihat dari capaian kinerja pembangunan bidang perhubungan selama lima tahun terakhir.

Laju pertumbuhan penggunaan kendaraan angkutan umum cenderung menurun, jumlah pengguna angkutan umum mencapai 15,6% pada tahun 2017. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah tingginya peralihan penggunaan moda transportasi dari angkutan umum ke kendaraan pribadi. Hal tersebut menyebabkan sejumlah terminal tidak mengalami peningkatan jumlah penumpang, rata pada periode 2013-2017.

Tabel 2. 32
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Perhubungan
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					PILAR-TUJUAN SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Jumlah Kendaraan Bermotor	unit	2,013,727	2,233,278	2,376,033	2,398,117	2,428,324	III.11
2	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	Kejadian	1,094	1,228	867	667	977	I.3
3	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	m	7.81	7.09	7.12	6.89	6.51	II.9
4	Jumlah Pengguna Angkutan Umum	Orang	10,913,500	10,913,500	9,241,800	12,127,125	10.232.985	III.11
5	Jumlah penumpang angkutan laut yang turun	Orang	687,407	456,539	209,854	223,305	256,425	III.11
6	Jumlah penumpang angkutan laut yang naik	Orang	613,991	375,124	193,981	229,755	249,352	III.11
7	Jumlah penumpang angkutan udara yang datang	Orang	3,642,539	3,791,629	3,945,625	4,025,784	4,216,892	III.11
8	Jumlah penumpang angkutan udara yang berangkat	Orang	3,593,269	3,955,136	3,693,028	*		III.11
9	Jumlah penumpang yang terlayani	Orang	25,565,418	26,035,007	22,120,061	24129407	22,861,863	III.11
10	Jumlah barang	ton	1,723,350,543	834,348,907	2,637,670,927	2,440,221,930	2,329,974,117	III.11
11	Rasio ijin trayek	%	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	IV.16
12	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	145,670	145,701	145,701	152,564	152,788	IV.16
13	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	49	44	44	44	46	II.9
14	Persentase layanan angkutan darat	%	32,68	31,49	35,49	34,96	36,23	III.11
15	Jumlah Pemasangan Rambu-rambu	unit	850	284	414	1,239	350	II.9
16	Persentase Pemasangan Rambu-rambu	%	6,74	2,30	3,47	11,60	3,11	II.9
17	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	%	7.81	7.09	7.12	6.89	6.51	II.9
18	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	jiwa	20,091,174	20,032,034	19,573,224	21,676,243	20,043,352	III.11

Sumber: Dinas Perhubungan Prov.Kaltim

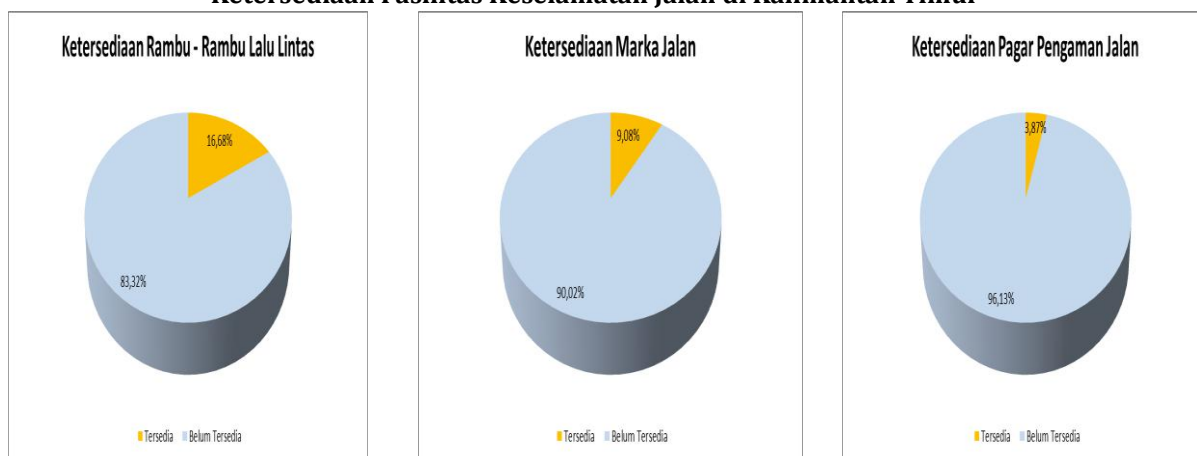
Tabel 2. 33
Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat

No.	Transportasi Darat	2013	2014	2015	2016	2017	Satuan
1.	Jumlah Terminal	23	23	23	23	23	Unit
	1. Kelas A	2	2	2	2	2	Unit
	2. Kelas B	7	7	7	7	7	Unit
	3. Kelas C	10	10	10	10	10	Unit
	4. Jumlah Orang Melalui Terminal	1.826.522	1.821.094	1.779.384	1.970.567	1.849.432	Orang
2.	Jumlah Jembatan Timbang	1	1	1	1	1	Unit
3.	Jumlah Rambu-rambu yang tersedia	851	1.135	1.549	2.472	2.822	Unit
	Jumlah Pemasangan Rambu-rambu	850	284	414	923	350	Unit

Sumber: Dinas Perhubungan Prov.Kaltim

Keterbatasan jumlah jembatan timbang merupakan salah satu permasalahan yang menyebabkan daya rusak konstruksi jalan akibat lalu lintas sejumlah angkutan barang dan alat berat di atas 10 ton. Tingkat keselamatan transportasi juga sangat rendah karena bentuk trase jalan yang berkelok dan juga karena rendahnya ketersediaan fasilitas keselamatan jalan. Ketersediaan rambu-rambu jalan hanya 16,68% (2.669 unit) dari total kebutuhan sebanyak 16.000 unit. Sementara itu, marka jalan terbangun hanya 9,08% (201.235 km) dari total kebutuhan pada jalan sepanjang 2.215.500 km.

Gambar 2. 33
Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan di Kalimantan Timur



Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, 2017

Tingkat keselamatan transportasi sangat minim. Hal tersebut dapat terindikasi dari rendahnya ketersediaan fasilitas keselamatan jalan. Ketersediaan rambu-rambu jalan hanya 16,68% (2.669 unit) dari total kebutuhan sebanyak 16.000 unit. Sementara itu, marka jalan terbangun hanya 9,08% (201.235 km) dari total kebutuhan (2.215.500 km). Selain itu, ketersediaan pagar pengaman jalan hanya 3,87% (3.428 km) dibandingkan dengan total kebutuhan yang mencapai 88.620 km.

Akses pelayanan transportasi sungai dan penyeberangan mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama periode 2013-2017. Jumlah kendaraan roda empat yang terangkut kapal ferry meningkat 42,3%. Selain itu, jumlah orang melalui angkutan penyeberangan sungai juga mengalami peningkatan lebih dari 17% setiap tahunnya.

Ketersediaan prasarana perhubungan laut juga sudah cukup baik, upaya pengembangan pelabuhan terus berjalan sampai saat ini melalui pembangunan 4 pelabuhan laut baru yang direncanakan akan beroperasi pada tahun 2019/2020 yaitu Pelabuhan Buluminung, Pelabuhan Maloy, Pelabuhan Kenyamukan dan Pelabuhan Mantaritip. Selain itu, prasarana perhubungan laut juga dilengkapi dengan pelabuhan/terminal khusus yang jumlahnya saat ini sudah melebihi 300 unit.

Provinsi Kalimantan Timur memiliki salah satu Bandar Udara Internasional terbesar di Indonesia yaitu Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian yang terletak di Kota Balikpapan, Bandara Kalimarau di Berau dan Bandara APT Pranoto di Samarinda. Bandara-bandara tersebut mampu melayani penerbangan udara menggunakan pesawat Boeing berkapasitas besar. Selain itu, aktivitas transportasi udara di Provinsi Kalimantan Timur juga ditopang oleh 6 bandara lokal. Saat ini terdapat 13 bandara yang beroperasi yang mampu melayani hampir seluruh kecamatan di dalam provinsi. Meskipun kuantitas bandara dan maskapai tidak mengalami perubahan pada periode 2013-2017, namun akses pelayanan perhubungan udara terus meningkat. Hal tersebut dipengaruhi oleh perkembangan kapasitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan jumlah penumpang pesawat udara tiba sebesar 15% selama periode 2013-2017, dan jumlah barang yang dibongkar muat meningkat lebih dari 10%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mobilitas orang/barang terus mengalami peningkatan.

Upaya pemerataan pembangunan melalui peningkatan konektivitas transportasi udara khususnya di perbatasan telah dilakukan secara serius dan komprehensif. Pembangunan bandara dengan panjang runway 1.600 m telah dilakukan di kawasan perbatasan yaitu kecamatan Data Dawai dan di Pulau kecil terluar yaitu Pulau Maratua. Selain itu, telah direncanakan pembangunan bandara perintis yang bisa melayani pesawat ringan/kecil di Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu.

i. Komunikasi dan Informatika

Seluruh masyarakat kawasan perkotaan di Kalimantan Timur telah terakses oleh layanan jaringan komunikasi dan informasi. Sementara di kawasan perdesaan masih terdapat beberapa wilayah di Provinsi Kalimantan Timur yang belum memiliki akses telekomunikasi maupun informatika. Keterbatasan akses telekomunikasi disebabkan salah satunya adalah kondisi geografis yang sulit dijangkau terutama di kawasan pedalaman dan perbatasan.

Tabel 2. 34
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					PILAR-TUJUAN SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
10.1	Website milik pemerintah daerah	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	II.9
10.2	Persentase penduduk usia 5 thn keatas menggunakan HP	%	95.34	96.27	97.12	100	100	II.9
10.3	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	29.63	37.63	33.46	34.67	32.89	II.9

Sumber : SIDATA, Bappeda Prov.Kaltim

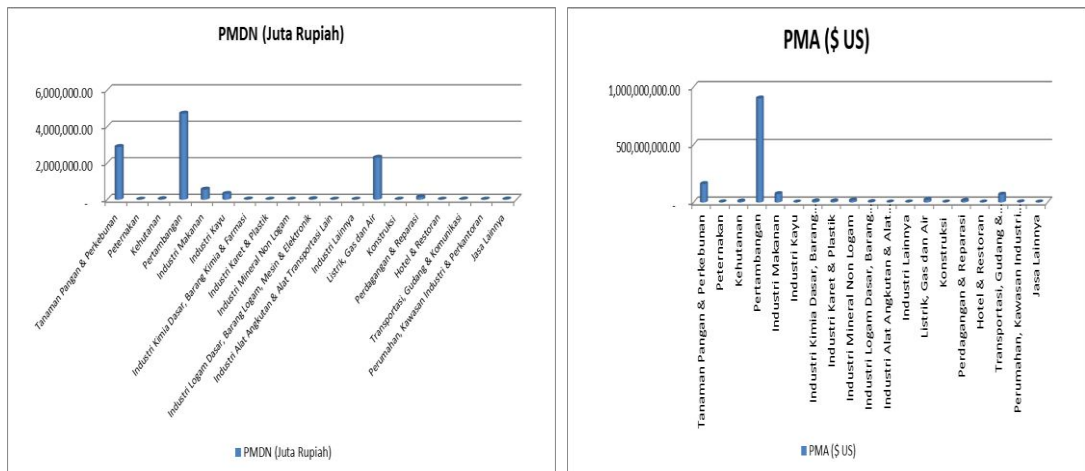
j. Penanaman Modal

Investasi di Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan realisasinya terus meningkat. Hal yang menjadi perhatian adalah sektor perkebunan dan pertambangan yang memiliki daya pikat para investor baik dalam negeri maupun luar negeri.

Tabel 2. 35
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Penanaman Modal
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					PILAR-TUJUAN SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Realisasi proyek PMDN	Juta Rp	18,441,377.30	12,983,049.70	9,611,313.10	6,885,124.60	10,980,216.40	II.8
2	Realisasi proyek PMA	US \$ 000	1.324.197,42	2.145.665,10	2.381.442,30	1.181.859,20	1285215.2	II.8
3	Nilai realisasi investasi	Milliar Rp	30,892	37,873	39,379	1,180,049	28,202.10	II.8
4	Rasio daya serap tenaga kerja		235.62	102.41	161.73	71.75	23.08	II.8
5	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN	Milliar Rp	10,732	-5,458.32	-3,372	-2,726	4,095.09	II.8

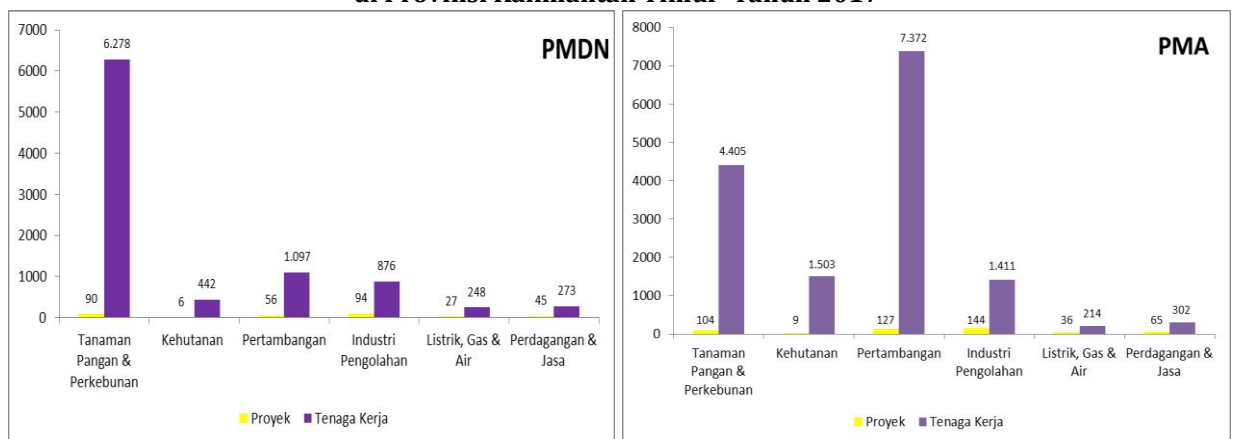
Gambar 2. 34
Realisasi PMDN dan PMA Per Sektor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017



Sumber: DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Timur, 2017

Walaupun investasi di Kalimantan Timur berkembang dengan baik dan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap PDB Nasional, namun daya serap tenaga kerja dari investasi tersebut sangat rendah. Dari 3.247 proyek investasi yang dijalankan hanya menyerap 325.633 tenaga kerja dari 1,5 juta angkatan kerja yang bekerja atau 20,66 %. Investasi di bidang Perkebunan yang paling banyak menyerap tenaga kerja pada proyek PMDN, sementara Pertambangan paling banyak menyerap tenaga kerja pada proyek PMA.

Gambar 2. 35
Daya Serap Tenaga Kerja Proyek PMDN dan PMA di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017



Sumber: DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Timur, 2017

Selain permasalahan nilai investasi yang sudah berjalan, kawasan strategis Provinsi yaitu kawasan industri di Kariangau Balikpapan, Buluminung di Penajam Paser Utara (PPU), dan kawasan industri

oleochemical di Maloy Kutai Timur, yang telah disiapkan bagi pengembangan industri belum banyak investor yang memanfaatkan kawasan tesebut. Ketersediaan infrastruktur pendukung kawasan industri yang belum memadai menjadi salah satu permasalahan dalam menarik investasi di kawasan tersebut.

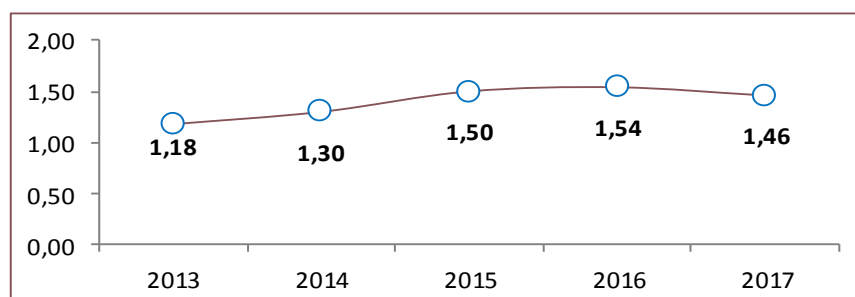
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan terdiri dari berbagai urusan seperti kelautan dan perikanan, pertanian, pariwisata dan berbagai sektor potensial lain yang berparuh terhadap berbagai indikator makro daerah. Urusan pilihan menjadi sektor pengungkit yang sangat potensial dan menjadi *leading* sektor dalam peningkatan perekonomian daerah.

a. Kelautan Dan Perikanan

Kalimantan Timur memiliki wilayah perairan yang sangat luas baik laut seluas 3,99 juta Ha maupun perairan darat dengan potensi perikanan yang juga sangat besar. Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB Kaltim selama lima tahun terakhir cenderung meningkat walaupun sedikit mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 1,46%.

Gambar 2. 36
Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB (%)
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017



Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka 2017

Kondisi perubahan iklim, kualitas sumber daya manusia, dan kurangnya sarana prasarana penangkapan maupun budidaya menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap produksi perikanan. Produksi perikanan selama lima tahun terakhir sangat fluktuatif dan bahkan cenderung menurun. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah sistem distribusi pemasaran hasil produksi perikanan yang tidak tercatat dan transaksi langsung di tengah laut

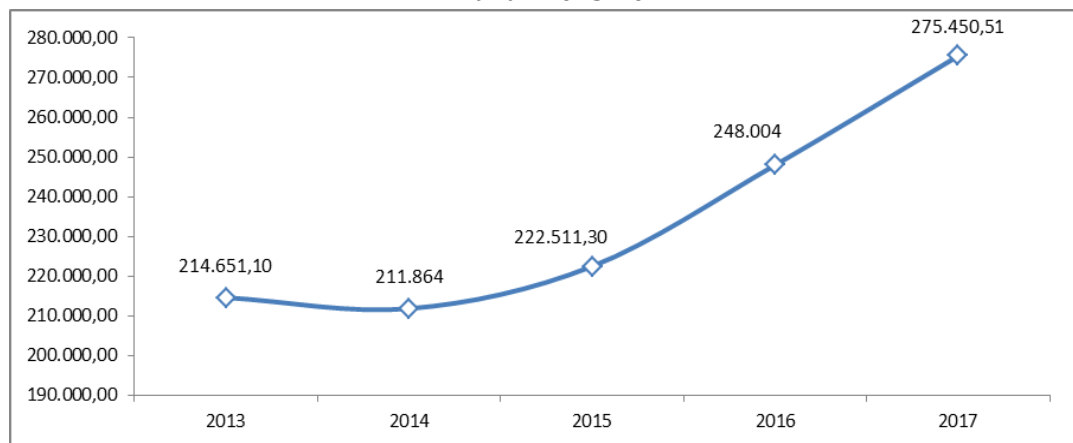
atau sungai. Permasalahan lainnya adalah pada budidaya perikanan terkait dengan perubahan kondisi fisik lahan dan kualitas sumber daya manusia pembudidaya.

Tabel 2. 36
Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					PILAR-TUJUAN SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Produksi Perikanan	Ton	214,651.10	211,863.50	222,511.30	248,004.20	275,450.51	II.8
2	Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB	%	1.18	1.30	1.50	1.54	1.46	II.8
3	Konsumsi ikan	Kg	1,537,874.00	837,876.00	276,047.00	278,298.00	399,055.00	I.2
4	Cakupan bina kelompok nelayan	%	5.77	6.81	8.81	3.14	3.14	II.8
5	Produksi perikanan kelompok nelayan	Ton	42,202.50	42,273.10	40,557.90	40,558.00	37,583.00	II.8
6	Nilai tukar nelayan	%	88.98	101.46	98.38	99.89	101.37	I.1

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 2. 37
Produksi Perikanan Laut dan Budidaya di Kalimantan Timur
Tahun 2013-2017



Sumber : Sidata Kaltim

b. Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam menopang perekonomian daerah, karena pariwisata dapat mendorong pengembangan aktifitas ekonomi lainnya seperti perdagangan dan jasa dan layanan transportasi.

Pariwisata di Kalimantan Timur belum berkembang secara optimal. Destinasi Pariwisata cukup banyak dengan pola tersebar dan sebagian besar merupakan wisata alam. Pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata di Kalimantan Timur membutuhkan biaya pembangunan yang tidak sedikit karena

wilayah yang sangat luas dan sebaran antar obyek wisata yang saling berjauhan. Namun demikian, jumlah kunjungan wisata cenderung meningkat baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara.

Tabel 2. 37
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Pariwisata
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

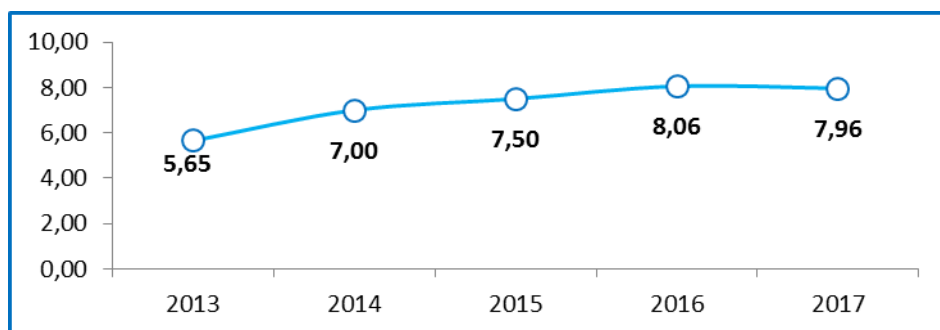
No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					PILAR-TUJUAN SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Jumlah wisatawan mancanegara.	Orang	32,973	53,257	49,285	45,211	58,869	11.8
2	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Orang	1,926,769	3,914,769	4,270,740	3,324,294	7,185,790	11.8
3	Kontribusi subsektor pariwisata terhadap PDRB	%	0.66	0.73	0.86	0.95	0.93	11.8

Sumber: BPS Kaltim dan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur

c. Pertanian

Pertanian tidak hanya terkait peningkatan kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB, namun juga terkait kesejahteraan petani yang dinilai dengan Nilai Tukar Petani (NTP). Kinerja sektor pertanian mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Kontribusi sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan terhadap PDRB Kaltim mengalami kenaikan mulai tahun 2013 hingga 2017. Walaupun relatif kecil, tetapi hal ini menunjukkan adanya pergerakan transformasi ekonomi Kalimantan Timur.

Gambar 2. 38
Kontribusi Pertanian (Dalam Arti Luas) Terhadap
PDRB Kalimantan Timur Tahun 2013-2017



Sumber : BPS Provinsi Kaltim

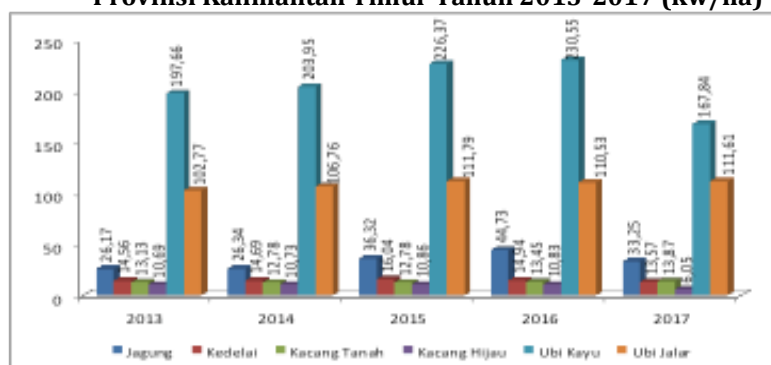
Tabel 2. 38
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Pertanian
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					PILAR-TUJUAN SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Produksi padi	Ton	439,439	426,567	408,782	305,337	356,680	II.8
2	Produktivitas padi atau bahan utama lokal lainnya per Ha	Ton/Ha	4.27	4.25	4.12	3.80	3.78	II.8
3	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	5.65	7.00	7.72	8.22	7.96	II.8
4	Kontribusi subsektor tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB	%	0.30	0.32	0.36	0.31	0.30	II.8
5	Kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB	%	2.59	3.75	3.98	4.43	4.49	II.8
6	Nilai tukar petani		95.30	99.93	98.61	98.14	97.16	I.1

Sumber: BPS Kaltim dan Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Timur

Salah satu komoditas tanaman pangan di Provinsi Kalimantan Timur adalah padi. Tingkat konsumsi beras di Kalimantan Timur cukup tinggi yaitu 84,1 kg/kap/tahun walaupun lebih rendah dari rata-rata nasional 150 kg/kap/tahun. Produksi beras lokal belum memenuhi kebutuhan pangan daerah dengan rasio pemenuhan beras lokal mencapai 61,54 % sampai tahun 2017. Permasalahan menurunnya luas tanam padi adalah kondisi fisik lahan potensial tersebar dalam kawasan konservasi hutan, alih fungsi lahan pertanian, dan terbatasnya petani. Tanaman pangan potensial di Provinsi Kalimantan Timur adalah komoditas pertanian lahan kering terutama ubi kayu, ubi jalar dan jagung.

Gambar 2. 39
Perkembangan Tingkat Produktivitas Palawija
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (kw/ha)



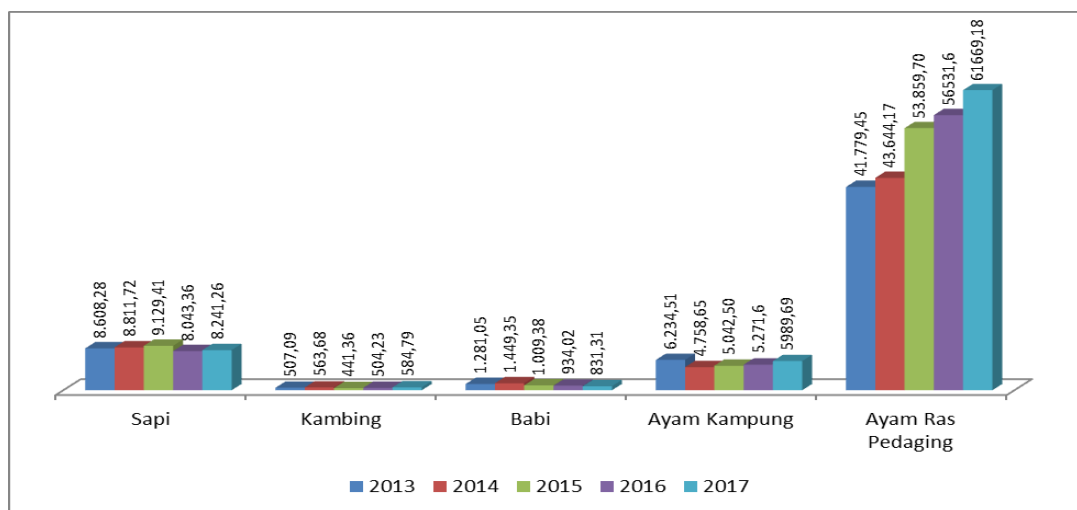
Sumber: BPS Kaltim

Sub sektor pertanian yang menjadi unggulan Kalimantan Timur adalah perkebunan. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah rendahnya

produktivitas perkebunan rakyat antara lain komoditi sawit, karet, kakao, kelapa dalam dan lada. Rendahnya produktivitas komoditi perkebunan rakyat disebabkan tanaman rusak dan keterbatasan benih unggul. Permasalahan lainnya adalah belum adanya pusat pengembangan teknologi bidang perkebunan.

Sub sektor pertanian unggulan lainnya adalah peternakan. Produksi peternakan terkait dengan cadangan pangan daerah untuk mencukupi konsumsi nutrisi masyarakat. Kalimantan Timur telah swasembada ayam dan telur.

Gambar 2. 40
Produksi Daging Komoditas Peternakan Kalimantan Timur
Tahun 2013-2017



Sumber : Sidata Kaltim

d. Kehutanan

Potensi produksi kehutanan di Kalimantan Timur mengalami penurunan seiring dengan laju deforestasi selama lebih dari satu dasawarsa. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB yang ditopang dari produksi hasil hutan kayu cenderung stagnan.

Tabel 2. 39
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Kehutanan
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					PILAR-TUJUAN SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Kontribusi subsektor kehutanan terhadap PDRB	%	1.11	1.16	1.33	1.34	1.15	II.8
2	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Ha	46,896.39	84,035.54	56,224.46	42,464.21	40,901.85	III.15
3	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	Rasio	0.19	0.22	0.22	0.22	0.22	III.15

Sumber: Dinas Kehutanan Prov. Kaltim

Permasalahan yang dihadapi adalah hutan produksi belum dikelola secara arif dan efisien, semakin meluasnya areal hutan yang di berikan ijin pinjam pakai oleh Kementerian Kehutanan untuk kegiatan pertambangan. Pengelolaan kawasan hutan sampai saat ini yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat menjadi kendala dalam upaya pengendalian di daerah.

Hasil hutan produksi selama ini yang terus diharapkan adalah hasil hutan kayu, padahal pemanenan kayu kontradiktif dengan isu perubahan iklim dan *green economic*. Perlu perubahan orientasi terhadap hasil-hasil hutan non-kayu, seperti ekstraktif tumbuhan obat, energi terbarukan, jasa lingkungan dan ekowisata. Sampai saat ini belum ada regulasi tentang penerapan RIL/RIL C pada IUPHHK-HA. Hingga saat ini jumlah perusahaan IUPHHK-HA yang menerapkan metode riil-C 7 unit dari jumlah perusahaan IUPHHK-HA yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu 65 unit.

Pengolahan hasil hutan belum dilakukan dengan rangkaian yang lebih panjang dan nilai ekonomisnya yang masih rendah. Jika dikelola dengan baik, kayu log dapat diolah menjadi industri barang jadi seperti meubeler dan lain sebagainya. Rata-rata 1.6 juta m³ kayu log bahan mentah yang diekspor ke luar daerah tanpa pengolahan, sehingga nilai ekonomisnya masih rendah. Hal ini disebabkan belum adanya regulasi tentang pembatasan kayu bulat yang keluar dari Kalimantan Timur dan belum berkembangnya (diversifikasi) industri pengolahan hasil hutan kayu. Saat ini terdapat 131 unit industri pengolahan hasil hutan kayu di Provinsi Kalimantan Timur untuk kapasitas 2.000 m³ s/d 6.000

m³, 65 unit untuk kapasitas < 2.000 m³ dan 40 unit untuk kapasitas ≥ 6.000 m³. Peningkatan nilai tambah pengolahan hasil hutan kayu memerlukan regulasi yang mewajibkan stakeholder untuk mengolah hasil kayunya di Kalimantan Timur. Pada sisi lain, industri hasil hutan selama ini hanya fokus pada hasil kayu, belum mengarah pada limbah kayu, misalnya peluang mengembangkan Eucalyptol (minyak dari daun HTI Eucalyptus) yang selama ini justru hanya menjadi limbah di HTI di Kalimantan Timur. HTI Eucalyptus setiap tahunnya dipanen seluas sekitar 15.000 ha.

Akses masyarakat di sekitar kawasan hutan juga belum memadai dalam mendukung pengelolaan hutan lestari (perhutanan sosial). Kurangnya sosialisasi dan keterlibatan masyarakat disekitar kawasan hutan menjadi akar masalah dari persoalan tersebut. Di sisi lain areal penanganan masing-masing kawasan terlalu luas.

Menurunnya produksi kehutanan juga disebabkan oleh Penegakan hukum terhadap pelaku penebangan kayu liar belum dapat ditangani dengan lebih sistematis. Jumlah kasus *illegal logging* mengalami kenaikan dari tahun 2015 hingga 2017. Belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelaku penebangan kayu liar disebabkan oleh belum optimalnya pengendalian dan pengawasan hutan.

Persoalan ini diperparah oleh laju deforestasi dan degradasi hutan yang menyebabkan meningkatnya jumlah emisi di Kalimantan Timur. Deforestasi hutan di Kalimantan Timur rata-rata sebesar 70.039 Ha/tahun, dan degradasi hutan sebesar 16.236 Ha/tahun. Deforestasi di Provinsi Kalimantan Timur disebabkan oleh alih fungsi lahan untuk pertambangan dan perkebunan sawit. Terdapat ijin HGU pada kawasan hutan seluas lebih dari 600.000 ha, dan lebih dari 3 juta Ha ijin pinjam pakai pertambangan. Pemanfaatan hutan tanpa kendali menjadi kawasan perkebunan, pemukiman, infrastruktur, penambangan akan berdampak terhadap penurunan kapasitas penyerapan dan penyimpanan CO₂, di samping juga akan berpengaruh terhadap kondisi lingkungan lainnya terutama menurunnya fungsi hidroorologis serta punahnya flora dan fauna.

Degradasi yang signifikan di Kalimantan Timur sebagian besar terkait dengan kegiatan penebangan di hutan alam (IUPHHK-HA) dari tahun 2006 sampai 2015, tingkat degradasi rata-rata yang disebabkan oleh penebangan di

Kalimantan Timur adalah 65.395 Ha per tahun dengan 3.381 Ha per tahun lebih lanjut terdegradasi dalam perkebunan kelapa sawit. Selain masalah emisi, deforestasi dan degradasi hutan menyebabkan berkurangnya fungsi hutan sebagai penangkap air, sehingga kegiatan tersebut dapat menyebabkan berkurangnya wilayah tangkapan air. Hal ini dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berkurangnya kuantitas dan kualitas air di berbagai daerah sebagai sumber mata air baku.

Penanganan kerusakan tanah pasca penebangan hutan belum tertangani melalui program reboisasi terus menerus. Permasalahan belum tertanganinya kerusakan tanah pasca penebangan hutan melalui program reboisasi disebabkan oleh kemampuan untuk merehabilitasi lebih rendah dari kemampuan penebangan, baik kemampuan pendanaan maupun sumber daya manusianya. Luas lahan kritis di Provinsi Kalimantan Timur saat ini telah mencapai 7,78 juta Ha. Program reboisasi dijalankan melalui dana DBH-DR melalui anggaran pemerintah pusat dan daerah. Disamping itu, terdapat berbagai skema rehabilitasi hutan dan lahan dan salah satunya dari program Rehab DAS yang dilakukan oleh pemilik ijin pinjam pakai dan beberapa program rehabilitasi dalam skema perubahan iklim.

Kawasan hutan lindung belum berfungsi optimal sebagai penyeimbang lingkungan hidup serta perlindungan keanekaragaman hayati. Masalah tersebut disebabkan oleh penataan batas kawasan hutan lindung yang belum tuntas oleh Kementerian Kehutanan, walaupun pengelolaan berada di pemerintah daerah. Luas hutan lindung mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun 2013 hingga 2017. Diperlukan penegakan regulasi yang lebih baik untuk menanggulangi permasalahan tersebut secara efektif.

e. Energi dan Sumberdaya Mineral

Pemerintah provinsi memiliki kewenangan yang cukup besar di bidang urusan Energi dan Sumber Daya Mineral. Kinerja bidang urusan Energi dan Sumberdaya Mineral meliputi ketenagalistrikan, pertambangan minyak, gas bumi, batu bara dan sumber daya mineral lainnya.

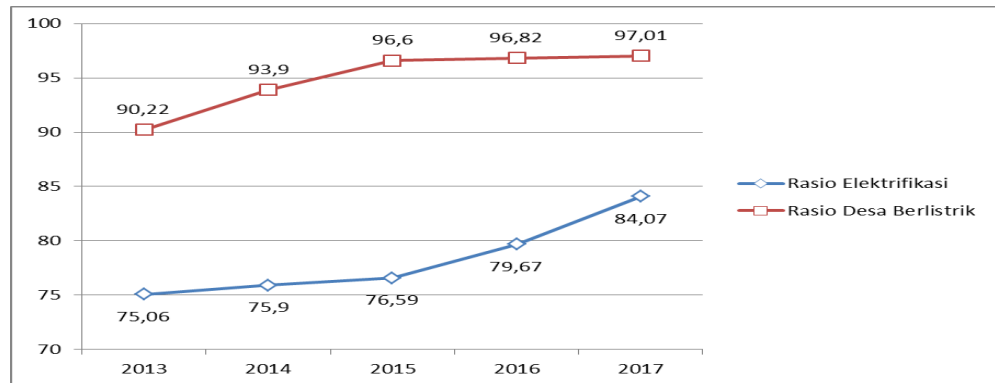
Tabel 2. 40
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

N	INDIKATOR DAERA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					PILAR-TUJUAN SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
4.1	Kontribusi pertambangan penggalan terhadap PDRB	%	55.21	50.21	45.03	43.17	46,31	II.8
4.2	Rasio ketersediaan daya listrik	Rasi	159.35	174.83	184.48	169.04	202.87	II.7
4.3	Rasio rasio KK	%	75,06	75,	76,59	79,67	84,07	II.7
10.	Daya listrik yang diproduksi	MWh	2,666,440.00	2,930,573.00	3,110,17	3,286,00	3,230,40	II.7
10.	Jumlah pelanggan	Oran	663,58	736,59	791,55	842,00	904,93	II.7

Pertambangan masih menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar di Provinsi Kalimantan Timur, namun demikian Kalimantan Timur mengedepankan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis sektor non-tambang. Geliat industri ekstraktif mengalami pelambatan dalam beberapa tahun terakhir, dengan terjadinya penurunan tingkat produksi beberapa komoditi pertambangan. Total produksi gas alam dan batubara yang menjadi sumber utama pertambangan mengalami penurunan pada periode 2013-2017 masing-masing sebesar 36,5% dan 3,9%. Sementara itu, produksi minyak bumi dan LNG juga mengalami penurunan sebesar 23,7%. Menurunnya harga pasar dunia beberapa produk pertambangan sangat berpengaruh pada produktifitas pertambangan di daerah.

Ketenagalistrikan adalah infrastruktur dasar yang menjadi fondasi bagi kegiatan ekonomi di berbagai sektor potensial, khususnya industri. Kondisi ketenagalistrikan di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan tren yang semakin membaik. Namun tetap memerlukan upaya peningkatan agar akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan dapat berjalan dengan optimal. Sebagian besar masyarakat mengakses listrik non-PLN, mencapai 64% dari total keluarga. Hanya 12,16% keluarga yang telah mengakses listrik PLN dan 13,84% belum memiliki akses listrik. Pada tahun 2017, rasio elektrifikasi hanya mencapai 84,07% lebih rendah dari capaian nasional 92,75%.

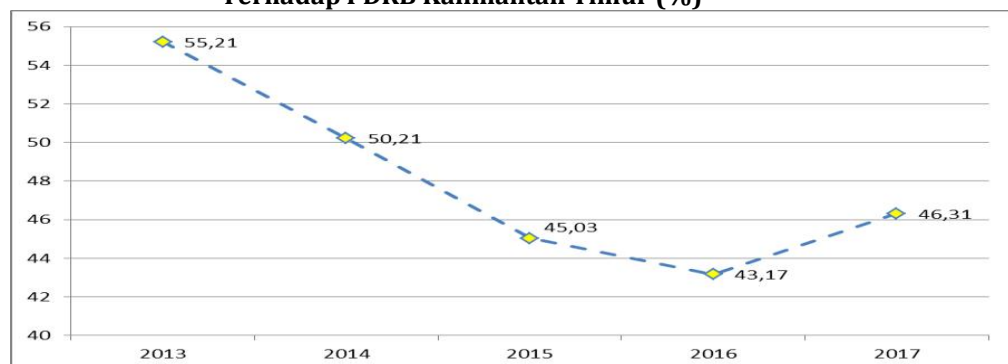
Gambar 2. 41
Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik di
Provinsi Kalimantan Timur



Sumber: *sidata.kaltimprov.go.id*, 2018

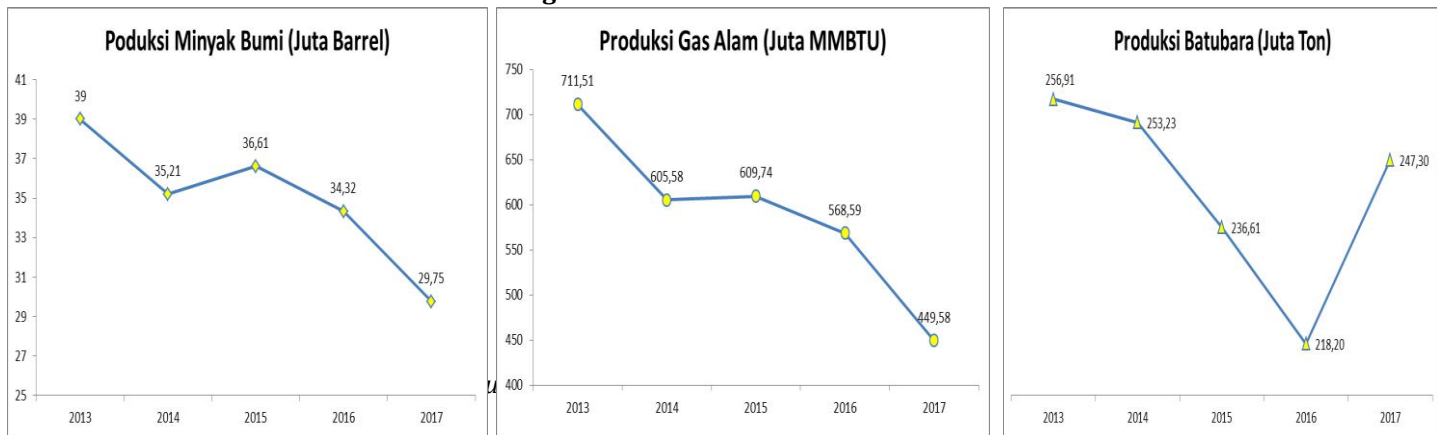
Kualitas instalasi listrik non-PLN yang terpasang sebagian besar belum sesuai dengan standar keamanan. Rata-rata listrik non-PLN hanya beroperasi selama 6 jam setiap harinya. Daya listrik non-PLN yang dialirkan berasal dari PLTS, PLTD, PLTU dan PLTG. Hal tersebut berarti cakupan layanan PLN di Provinsi Kalimantan Timur masih perlu ditingkatkan. Penyediaan listrik di wilayah Terpencil, Tertinggal dan Terluar (3T) melalui pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) belum optimal karena lemahnya kemampuan masyarakat dalam pemeliharaan.

Gambar 2. 42
Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalan
Terhadap PDRB Kalimantan Timur (%)

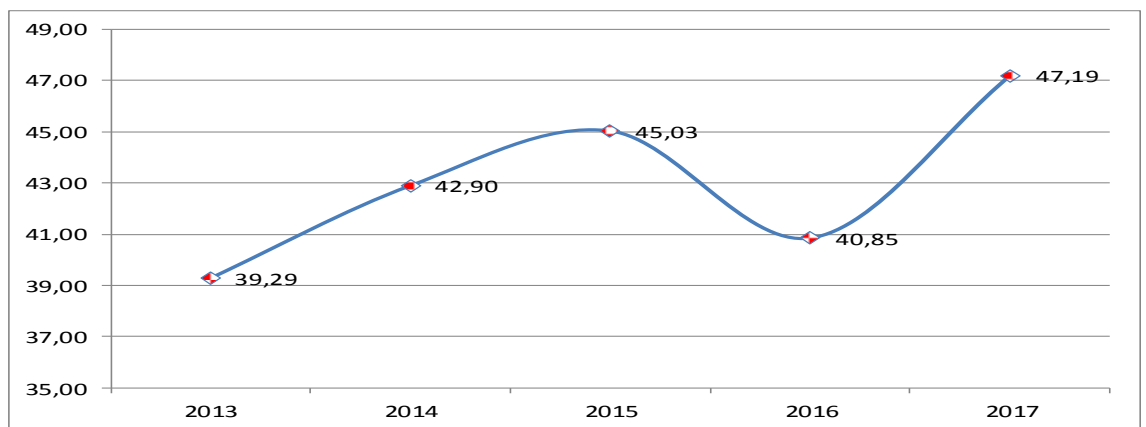


Sumber : *BPS Kaltim*

Gambar 2. 43
Kondisi Sektor Pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017



Gambar 2. 44
Persentase Area Direhabilitasi dari Lahan Terganggu



Sumber: sidata.kaltimprov.go.id, 2018

f. Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kaltim lebih kecil dibandingkan dengan pertanian, kehutanan, dan perikanan. Persoalan ini disebabkan oleh masih belum optimalnya daya saing produk dan masih terbatasnya pasar produk, karena kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk belum optimal dan belum luasnya jangkauan jaringan perdagangan.

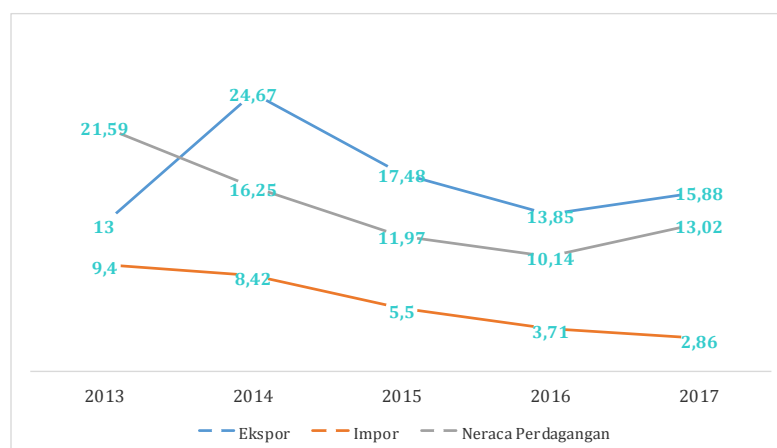
Kinerja perdagangan sangat dipengaruhi oleh nilai transaksi, kerjasama pemasaran, pelaku usaha, dan nilai ekspor. Selama periode 2013-2017, neraca perdagangan Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan neraca positif karena nilai ekspor lebih besar dari nilai impor. Sementara dilihat dari pertumbuhan mengalami surplus perdagangan.

Tabel 2.41
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Perdagangan
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					PILAR-TUJUAN SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Kontribusi subsektor perdagangan terhadap PDRB	%	4.29	4.58	5.12	5.53	5.30	II.8
2	Nilai ekspor	Ribu USD	31,003,083	24,673,182	17,483,274	13,854,373	17,532,855	II.17
3	Nilai impor	Ribu USD	9,512,101	8,471,495	5,506,226	3,711,080	3,228,306	II.17
4	Ekspor bersih perdagangan	Ribu USD	21,490,982	16,201,687	11,977,048	10,143,293	14,304,549	II.17

Sumber : BPS Kaltim

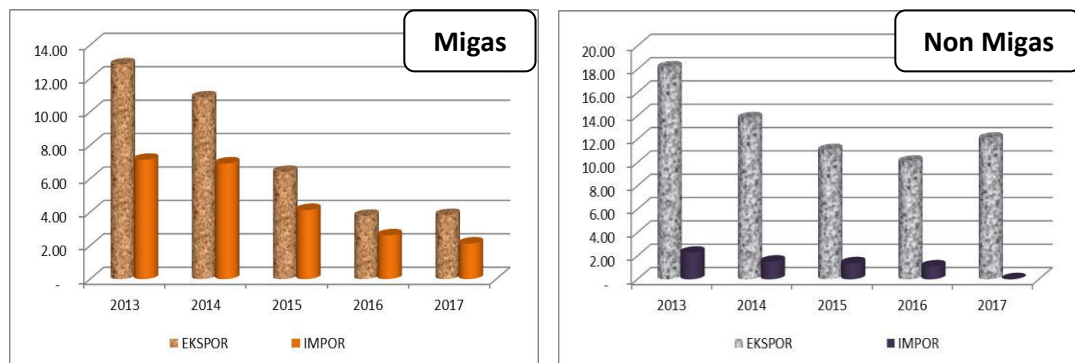
Gambar 2. 45
Nilai Ekspor Impor dan Neraca Perdagangan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017



Sumber: BPS Kaltim

Selama periode tahun 2013-2017, tren pertumbuhan nilai ekspor menunjukkan peningkatan baik dari sektor migas ataupun non migas. Nilai ekspor migas meningkat sebesar 0,05 persen, sementara non migas meningkat sebesar 1,98 persen. Komoditi terbesar yang menyumbang nilai ekspor berasal dari produksi mineral. Sementara tren pertumbuhan nilai impor mengalami penurunan pada tahun 2017. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan di sector migas yaitu sebesar 0,49 dari 2,61 menjadi 2,12 pada tahun 2017. Sementara non migas data yang diperoleh tahun 2017 dari BPS belum valid karena berjumlah sebesar 742,65. Barang impor Provinsi Kalimantan Timur sebagian besar adalah golongan barang Minyak & Gas, dimana dari tahun ke tahun impor migas selalu lebih besar dari non migas.

Gambar 2. 46
Nilai Ekspor dan Impor Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2013-2017 (Juta US)

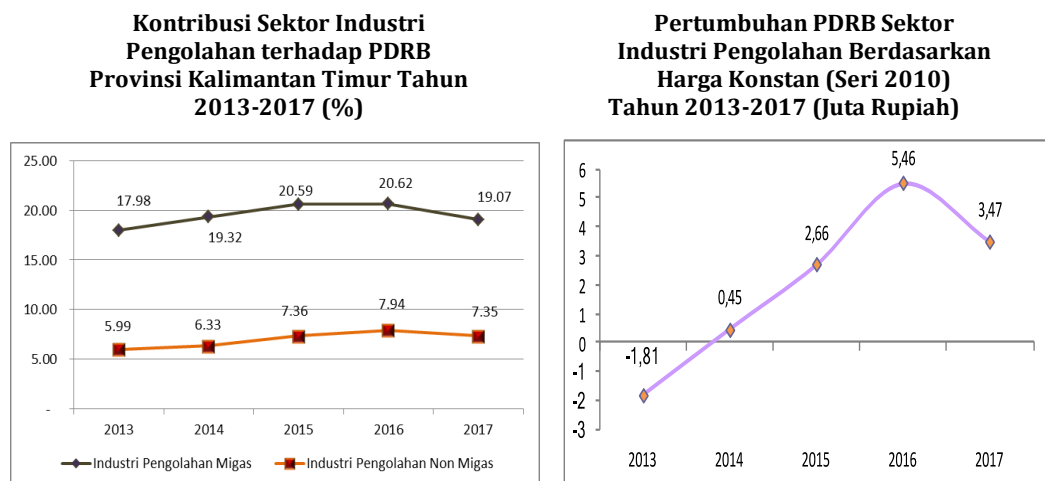


Sumber: BPS Kaltim

g. Perindustrian

Perindustrian merupakan sektor potensial kedua penyumbang terbesar dalam perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur. Pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan mengalami peningkatan rata-rata 2,85 persen selama lima tahun terakhir, namun kontribusinya terhadap PDRB Kaltim cenderung menurun. Rendahnya kontribusi Industri pengolahan non migas disebabkan tingkat produksi dan daya saing produk masih rendah.

Gambar 2. 47
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Perindustrian
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017



Sumber: BPS Kaltim

Sebagian besar produk pengelolaan sumber daya alam Kaltim diekspor dalam bentuk bahan mentah, integrasi proses hulu hilir dan antar sektor belum berjalan. Industri Kecil Menengah (IKM) di Kalimantan Timur masih belum berkembang dengan baik. Sentra industri kecil menengah tercatat 8.314 unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 22.033 orang. Jumlah IKM

yang berorientasi ekspor hanya 15 unit. Industri kecil menengah masih didominasi oleh industri pangan. Pengembangan IKM dihadapkan pada permasalahan belum adanya regulasi pembatasan ekspor bahan mentah, kualitas sumber daya manusia, dan daya saing produk.

Tabel 2. 42
Komoditas Produk Unggulan Industri Pengolahan di Kalimantan Timur

No.	Komoditas	Lokasi
1	Kayu Lapis (plywood), Mdf	Samarinda, Balikpapan, PPU, Kukar
2	Udang Beku	Balikpapan, Kukar
3.	Pengolahan kayu/sawmill	Samarinda, Balikpapan, Kukar, Berau, Paser, Kutim
4	Crude Palm Oil	Kukar, Paser, Kutim
5	Galangan Kapal	Kukar, Paser, Samarinda, Balikpapan
6	Pupuk urea & Amoniak	Bontang
7	Moulding	Samarinda, Balikpapan, Kukar
8	Gas, Methanol, Hexamethylene Tetramine, Melamine	Bontang
12	Pengolahan Lem	Samarinda, Bontang
13	Pengolahan Minyak Kelapa	Penajam Paser Utara
14	Pulp/Kertas	Berau
15	Pengolahan Rotan	Paser, Balikpapan
16	Kulit Buaya	Balikpapan
17	Kain Tenun Ulap Doyo	Kutai Kartanegara
18	Garmen	Balikpapan

Sumber: Dinas Indakop Provinsi Kalimantan Timur, 2018.

Komoditas unggulan yang mendominasi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur adalah komoditas kelapa sawit, akan tetapi industri pengolahan yang telah dikembangkan hanya sampai pada produk *Crude Palm Oil (CPO)*. Lima komoditas utama yang perlu dikembangkan secara prospektif dan potensial untuk industri pengolahan adalah Kayu, Batubara, Kelapa Sawit, Kakao dan Karet.

2.3.3 Fokus Urusan Penunjang

a. Perencanaan Pembangunan

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan yang telah ditetapkan baik sebagai Peraturan daerah maupun Peraturan Kepala Daerah merupakan acuan utama dalam pelaksanaan pembangunan dan evaluasi terhadap pencapaian keberhasilan pembangunan di Kalimantan Timur. Kualitas perencanaan pembangunan daerah Kalimantan Timur sudah cukup baik dan mampu bersaing secara nasional. Kalimantan Timur telah

berhasil memperoleh penghargaan nasional sebagai salah satu provinsi berprestasi dalam perencanaan pembangunan, melalui Anugerah Pangripta Nusantara (APN) dengan peringkat kedua terbaik nasional. Walaupun demikian, Kalimantan Timur masih dihadapkan pada permasalahan inkonsistensi perencanaan dengan penganggaran di setiap perangkat daerah dan kabupaten/kota. Sebagian besar perangkat daerah masih belum konsisten dalam merencanakan dan mencapai target kinerja terutama pada program dan kegiatan.

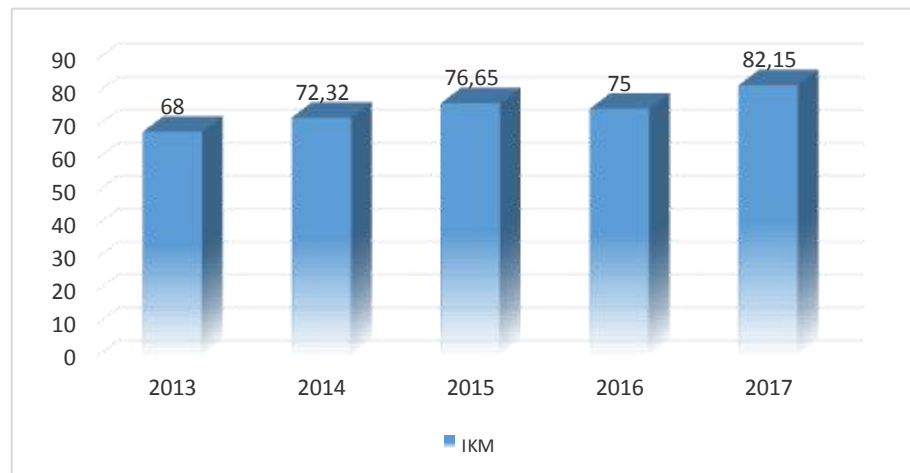
Tabel 2. 43
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Perencanaan Pembangunan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					PILAR-TUJUAN SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	IV.16
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	IV.16
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	IV.16
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ada	Ada	IV.16
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd	%	-	-	-	97.00	99.28	IV.16
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam APBD	%	-	-	-	97.00	99.28	IV.16
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	-	-	-	95.15	96.32	IV.16

b. Kualitas Pelayanan Publik

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) digunakan untuk merefleksikan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Semakin tinggi nilai IKM menunjukkan semakin tingginya kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi semakin meningkat. Artinya secara keseluruhan kualitas pelayanan publik di Provinsi Kalimantan Timur semakin meningkat.

Gambar 2. 48
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (%)



Sumber: SIDATA, Bappeda Kaltim

Meskipun demikian, masih ada persoalan lain yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah terutama terkait dengan kontrol terhadap kegiatan survai IKM yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Saat ini, kontrol terhadap survai IKM belum berjalan optimal. Persoalan ini diindikasikan dengan masih adanya hasil survai yang tidak dikembalikan atau diserahkan kepada OPD pengampu yaitu Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Selain itu, persoalan lain juga berkaitan dengan belum optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Di Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur terdapat 9 (Sembilan) SPM, sementara di tingkat Kabupaten/Kota terdapat 15 (lima belas) SPM. Dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum yang mengatur secara jelas dan menyeluruh terkait dengan ruang lingkup dan pelaksanaan SPM, Pemerintah Daerah diharapkan dapat menerapkan SPM baik di kabupaten/kota maupun internal perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur.

c. Keuangan

Urusan keuangan merupakan salah satu urusan yang paling penting karena menjadi penopang penyelenggaraan pemerintah daerah. Salah satu indikator untuk mengukur keuangan daerah adalah kapasitas fiskal. Kapasitas fiskal merupakan gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah. Indeks Kapasitas Fiskal diperoleh dengan membandingkan kapasitas fiskal suatu daerah terhadap kapasitas fiskal seluruh daerah. Capaian indeks kapasitas fiskal Provinsi Kalimantan Timur termasuk kategori tinggi.

Tabel 2. 44
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Perencanaan Pembangunan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					PILAR-TUJUAN SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Opini BPK		WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	IV.16
2	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)		5,20	4,90	5,58	5,58	5,56	IV.16
3	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah	%	-2.29	-2.96	-20.27	-11.26	1.95	IV.16
4	Persentase SILPA terhadap APBD	%	10.00	8	11.74	4.86	8.23	IV.16
5	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	Program (%)	7.39	9.43	0.82	12.43	0.46	IV.16
		Kegiatan (%)	12.43	13.22	0.72	8.60	0.60	
6	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	3.79	4.28	3.10	2.71	5.26	IV.16
7	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	5.80	5.41	6.90	10.98	9.54	IV.16
8	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	BL (%)	49.87	45.99	43.71	47.47	36.95	IV.16
		BTL (%)	50.13	54.01	56.29	52.53	63.05	
9	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	18.23	21.09	25.03	18.51	23.81	IV.16
10	Penetapan APBD	Tepat Waktu / Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	IV.16
11	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	%	50,60	59,04	52,30	50,46	56,25	IV.16

Sumber : BPKAD Prov.Kaltim

Kalimantan Timur berupaya untuk mencapai kemandirian fiskal melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), karena dana perimbangan cenderung semakin menurun. Selama lima tahun terakhir PAD Kaltim semakin meningkat dan pada tahun 2017 telah mencapai 55,88 persen dari total pendapatan daerah. Namun peningkatan PAD tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan. Badan Usaha Milik Daerah yang ada belum memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD. Untuk meningkatkan kemandirian fiskal, Kalimantan Timur perlu upaya keras untuk melakukan transformasi sumber-sumber PAD lainnya secara bertahap, melalui peningkatan kapasitas dan kinerja BUMD, serta pengembangan nilai tambah sektor ekonomi non migas dan batu bara yang berkelanjutan seperti industri pengolahan, pariwisata, perikanan dan pertanian.

d. Akuntabilitas

Salah satu prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah prinsip akuntabilitas. Sistem akuntabilitas yang baik menunjukkan berjalannya sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan, hingga evaluasi dan pelaporan dengan baik. Opini BPK merupakan

salah satu indikator penting untuk melihat capaian akuntabilitas perencanaan, penggunaan, dan pelaporan anggaran suatu daerah.

Laporan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur semakin membaik dan telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2014 sampai 2017. Meskipun demikian, Kalimantan Timur masih menghadapi permasalahan dalam pengelolaan aset daerah terutama terkait dengan belum optimalnya identifikasi dan pengelolaan asset-asset daerah. Hal ini terjadi karena adanya pelimpahan wewenang berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Selain itu, persoalan lain juga berkaitan dengan belum seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur memiliki status opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian, masih terdapat 2 (dua) Kabupaten yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Mahakam Ulu.

Selain opini BPK, peringkat EKPPD juga menjadi salah satu gambaran akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peringkat EKPPD atau Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan penilaian terhadap dokumen LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) untuk melihat kualitas pelaksanaan otonomi daerah. Peringkat EKPPD Provinsi Kalimantan telah mencapai status skor sangat tinggi dengan peringkat ke tiga nasional. Tingkat akuntabilitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga dapat dilihat melalui hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Berdasarkan Evaluasi AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017 mendapat predikat BB dengan skor 77,49. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur semakin meningkat. Untuk meningkatkan kinerja akuntabilitas pemerintah daerah, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan nilai SAKIP, yaitu meningkatkan konsistensi penentuan indikator perencanaan program dan kegiatan di setiap perangkat daerah.

e. Keterbukaan informasi publik

Pemerintahan yang transparan adalah pemerintahan yang menerapkan salah satu prinsip-prinsip *governance*. Salah satu indikator untuk mengukur transparansi daerah adalah keterbukaan informasi publik.

Tabel 2. 45
Peringkat Keterbukaan Informasi Publik
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	Tahun	Peringkat	Nilai
1	2013	5	62,88
2	2014	3	91
3	2015	3	81,18
4	2016	3	88,17
5	2017	8	-

Sumber: Laporan Tahunan KIP 2012-2016

Walaupun akses terhadap informasi di Provinsi Kalimantan Timur sudah berjalan semakin baik yang diindikasikan dengan semakin mudahnya mendapatkan data atau informasi capaian pembangunan daerah di website pemerintah, Indeks keterbukaan informasi publik Kalimantan Timur mengalami penurunan dari peringkat ke 3 menjadi peringkat ke 8 nasional. Permasalahan tersebut terjadi karena belum optimalnya kelembagaan informasi, yaitu Komisi Informasi Publik (KIP).

f. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu urusan yang sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah. Urusan ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik maupun penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam konteks ini, diperlukan pembinaan PNS dan peningkatan kualitas SDM aparatur.

Persentase pembinaan PNS dan peningkatan kualitas SDM di Provinsi Kalimantan Timur masih belum optimal. Perkembangan ASN yang mengikuti Diklat baik diklat formal maupun diklat struktural cenderung mengalami penurunan. Hal tersebut memerlukan adanya kebijakan peningkatan diklat pegawai melalui optimalisasi penerapan standar kompetensi, peningkatan sistem administrasi kepegawaian, optimalisasi kelembagaan perangkat daerah, dan optimalisasi pelaksanaan lembaga sertifikasi.

Tabel 2. 46
Capaian Kinerja Pembangunan Bidang Perencanaan Pembangunan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					PILAR-TUJUAN SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
3.1	Jumlah PNS	Orang	7,235	7,163	7,234	6,525	11,566	IV.16
3.2	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Hari	68.00	57.00	61.00	63.00	49.00	
3.3	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	1.90	1.70	1.50	1.80	0.60	
	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural	%	99.00	80.00	40.00	70.00	33.00	
3.4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jabatan	61	62	62	61	56	IV.16
3.5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jabatan	310	310	299	300	280	IV.16
3.6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	1,422	1,611	1,695	1,455	4,985	IV.16
3.7	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Skor	68.00	70.00	75.00	80.00	81.56	IV.16
3.8	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	%	5.68	11.99	11.08	11.20		IV.16

Sumber: BPSDM Kaltim

g. Penelitian dan pengembangan

Urusan penelitian dan pengembangan merupakan salah satu urusan yang krusial bagi penyelenggaraan pemerintah daerah. Urusan ini menyediakan instrumen perumusan kebijakan daerah melalui aktivitas ilmiah.

Tabel 2. 47
Uraian Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

No	Uraian	Capaian
1.	Implementasi Rencana Kelitbangan	100 %
2.	Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	87%
3.	Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	100 %
4.	Kebijakan Inovasi yang Diterapkan	100 %

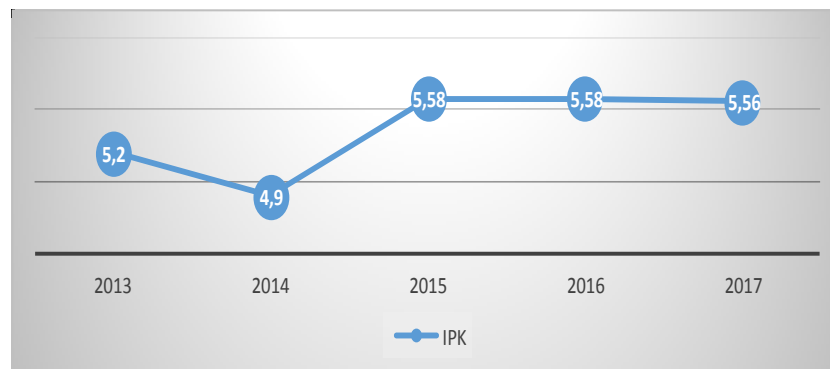
Sumber: Balitbang Prov.Kaltim 2018

Urusan penelitian dan pengembangan sudah berjalan optimal karena perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, dan kebijakan inovasi yang diterapkan sudah mencapai 100 persen. Sementara kegiatan pemanfaatan hasil kelitbangan baru 87 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlunya optimalisasi hasil penelitian dan pengembangan daerah.

h. Pengawasan

Urusan pengawasan merupakan urusan yang sangat penting bagi setiap pemerintah daerah. Urusan ini mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi penyelenggaraan pemerintahan terutama terkait dengan bagaimana mencegah terjadinya pelanggaran internal instansi pemerintah. Untuk melihat kinerja pengawasan, dapat dilihat berdasarkan angka Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Provinsi Kalimantan Timur.

Gambar 2. 49
Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017



Sumber: Inspektorat Prov.Kaltim

IPK provinsi Kalimantan Timur mengalami perkembangan fluktuatif dan cenderung menurun. Turunnya nilai IPK menunjukkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah belum berjalan optimal karena cukup banyak masyarakat menganggap masih ada praktek korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun demikian, IPK ini belum diterapkan di seluruh OPD, dimana baru diterapkan pada pelayanan perizinan berusaha. Artinya, pelayanan perizinan belum berjalan optimal sehingga perlu adanya peningkatan pengawasan.

Selain itu, persoalan lain juga berkaitan Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Kalimantan Timur masih pada posisi level 2. Hanya satu perangkat daerah yang sudah menerapkan zona integritas yaitu RSUD Kanujoso Balikpapan. Penetapan ini penting karena mencerminkan komitmen instansi tersebut dalam upaya pencegahan korupsi dan menciptakan pelayanan yang optimal.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) baik dari BPK maupun APIP juga belum optimal.

Tabel 2. 48
Status Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK-RI
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018

Tahun	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status Tindak Lanjut		Persentase TLHP yang Belum Selesai
			Selesai	Belum	
2013	49	93	80	13	13,97
2014	19	47	38	9	19,14
2015	48	112	86	26	23,21
2016	41	118	60	58	49,15
2017	31	85	26	59	69,41
2018	11	29	8	21	72,41

Sumber: inspektorat 2013-2018

Tabel 2. 49
Status Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status Tindak Lanjut		Persentase TLHP yang Belum Selesai
			Selesai	Belum	
2013	106	160	160	0	Selesai
2014	251	393	391	2	0,50
2015	203	309	308	1	0,32
2016	211	374	330	43	11,49
2017	282	421	209	212	50,35

Sumber: Inspektorat 2013-2017

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran tentang kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumberdaya manusia.

Tabel 2. 50
Indikator Daya Saing Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					PILAR-TUJUAN SDG's
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita	Rp/Bulan	1,096,709	1,136,173	1,193,642	1,296,926	1,443,928	I.1
2	Nilai tukar petani	%	95	100	99	98	97,16	I.1
3	Rata-rata pengeluaran konsumsi makanan per kapita	Rp/Bulan	508,706	508,801	549,351	587,920	663,535	I.1
4	Rata-rata pengeluaran konsumsi non makanan per kapita	Rp/Bulan	588,003	627,372	644,291	709,006	780,393	I.1
5	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%	58.73	59.69	63.76	63.76	48.17	
6	Angka kriminalitas yang tertangani	%	5.84	5.42	6.33	6.44	5.29	
7	Jumlah kantor perbankan	Unit	580	627	770	775	688	II.8
8	Jumlah akomodasi (hotel/penginapan)	Unit	523	661	661	673	689	II.8
9	Jumlah rumah makan/ restoran	Unit	943	987	1062	1167	1230	II.8
10	Persentase rumah tangga dengan sumber air bersih	%	80.87	85.35	89.41	90.63	90,90	I.3
11	Rasio ketergantungan		46.2	45.76	45.28	44.83	42.43	I.1

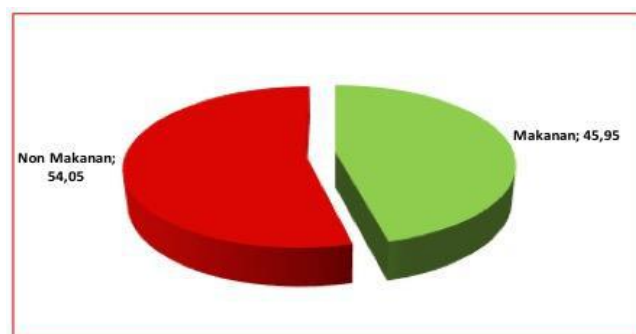
Sumber: BPS Kaltim

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Fokus kemampuan ekonomi daerah diukur dengan indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita. Selama kurun waktu beberapa tahun, pengeluaran konsumsi rata-rata per kapita per bulan di Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2017 mencapai Rp. 1.443.928,- per bulan.

Secara umum kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur sudah lebih baik karena fokus konsumsi penduduk lebih tinggi ke konsumsi non makanan dibandingkan dengan konsumsi makanan. Kenaikan persentase konsumsi rumah tangga non makanan di tiap tahunnya menunjukkan konsumsi rumah tangga sudah mulai fokus ke pengeluaran barang sekunder maupun tersier yang merupakan kebutuhan penunjang kehidupan dan tidak hanya memikirkan pemenuhan kebutuhan makanan.

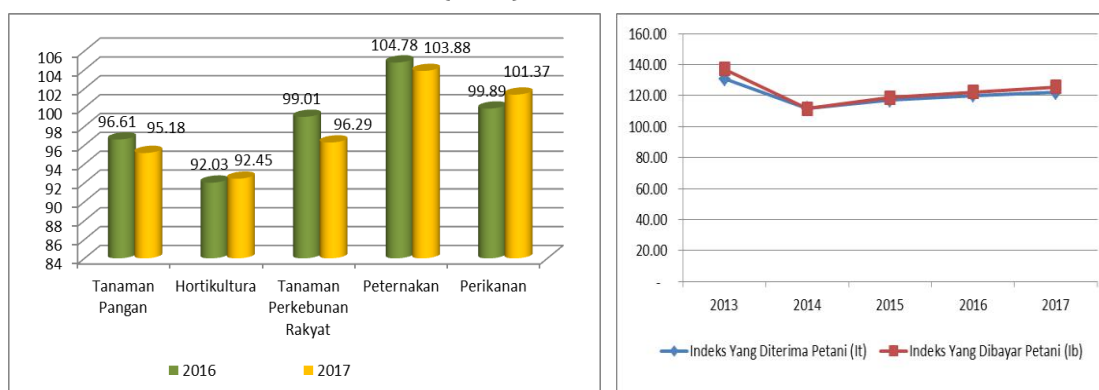
Gambar 2. 50
Persentase Pengeluaran Konsumsi per Kapita sebulan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2017

Disamping indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita, kemampuan ekonomi daerah diukur juga dengan indikator Nilai Tukar Petani (NTP). NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat kemampuan/daya beli petani di wilayah pedesaan, dan juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi pertaniannya. Semakin tinggi NTP-nya maka semakin kuat kemampuan/daya beli petani. Pada periode tahun 2012-2017, NTP Provinsi Kalimantan Timur selalu berada di bawah nilai 100 yang berarti bahwa petani mengalami defisit/penurunan daya beli karena kenaikan penerimaan hasil produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga input biaya produksi dan kebutuhan konsumsi rumahtangganya.

Gambar 2. 51
Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Timur



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2017

Jika dilihat Nilai Tukar Petani berdasarkan subsektor pertanian, NTP tertinggi adalah peternakan dan perikanan, sedangkan NTP terendah pada subsektor hortikultura.

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Infrastruktur sangat berpengaruh terhadap daya saing daerah. Tingkat daya saing diukur dari ketersediaan infrastruktur pendukung kegiatan sosial ekonomi daerah. Pelayanan infrastruktur terkait sarana dan fasilitas wilayah lainnya yang diukur meliputi: konektivitas jalan, jembatan, perhubungan sungai, perhubungan udara, perhubungan laut ke kawasan-kawasan kesatuan sosial ekonomi masyarakat, ketersediaan air baku dan air bersih, jaringan irigasi, perumahan, listrik dan energy, jaringan telekomunikasi, serta fasilitas pelayanan jasa perdagangan.

Konektivitas infrastruktur perhubungan di Kalimantan Timur masih belum optimal mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat, terutama masih terbatasnya jaringan jalan dan prasarana perhubungan di kawasan pedalaman dan perbatasan. Konektivitas jalan nasional di wilayah Kalimantan Timur dikelompokkan menjadi tiga poros yaitu:

1. Poros Selatan, menghubungkan kawasan Kalimantan Selatan - Batu Aji/Kerang Dayu - Tanah Grogot - Kuaro - Penajam - Balikpapan - Samarinda - Bontang - Sangatta - Muara Wahau - Tanjung Redeb - Kalimantan Utara.
2. Poros Tengah, menghubungkan kawasan Samarinda - Tenggarong - Kota Bangun - Melak - Barong Tongkok - Kalimantan Tengah.
3. Poros Utara, menghubungkan Kalimantan Barat – Kalimantan Timur.

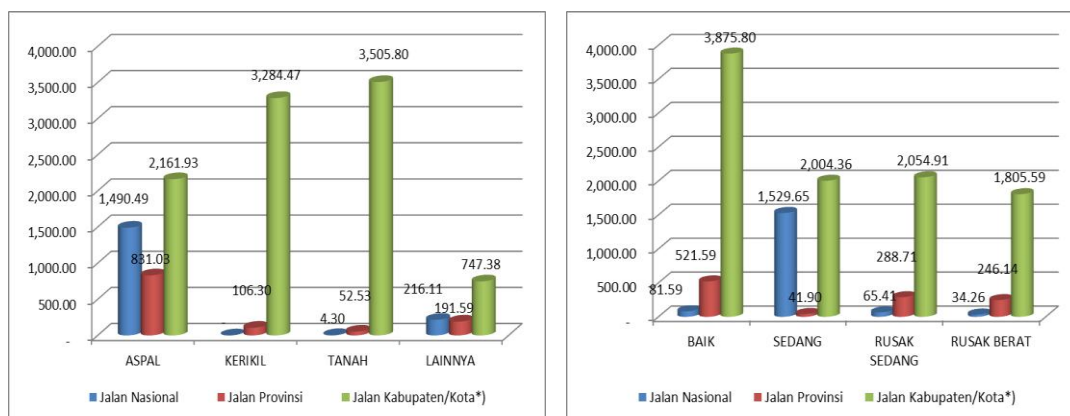
Pembangunan infrastruktur jalan Provinsi dihadapkan pada permasalahan masih rendahnya rasio panjang jalan terhadap luas wilayah, dimana angka rasionya menunjukkan 147,30 km per 1.000 km² di bawah rasio nasional, yaitu 265,47 km/1.000 km². Hal ini dikarenakan beberapa kendala yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur jalan, antara lain:

1. Konsentrasi penduduk yang masih tidak merata dalam satuan kecil dan terpencil serta kondisi topografi yang berat;
2. Kendala pembebasan lahan dan penetapan harga yang disepakati;
3. Keterbatasan anggaran sehingga alokasi dana tidak proposional sesuai kebutuhan sehingga menyebabkan belum terpenuhinya target jalan mantap, baik nasional maupun provinsi, dan belum tuntasnya pembangunan jalan lintas kalimantan. Belum ada kesepakatan pembiayaan atas beberapa pembangunan infrastruktur

antara pemerintah pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; dan Dukungan swasta belum optimal.

4. Pembangunan jalan diperbatasan terkendala fungsi dan status kawasan hutan dan kawasan lindung.

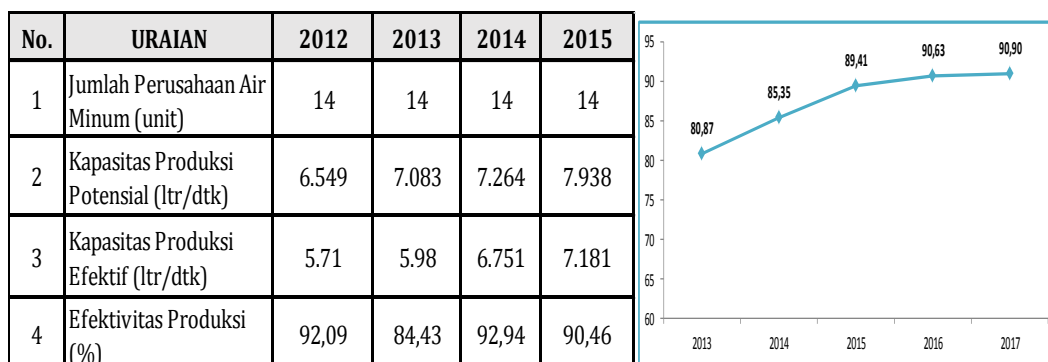
Gambar 2. 53
Panjang Jalan Menurut Status, Jenis Permukaan, dan Kondisi
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017



Sumber: Dinas PUPR Prov.Kaltim

Ketersediaan air baku dan air bersih di Kalimantan Timur hingga tahun 2017 telah melayani 90,90 persen rumah tangga. Perusahaan air minum di Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan segala daya dan upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih. Terdapat 14 perusahaan air minum dengan kapasitas produksi efektif sebesar 7.181 liter/detik.

Gambar 2. 54
Kapasitas Pelayanan Air Bersih dan Persentase Rumah Tangga yang Terlayani
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2017

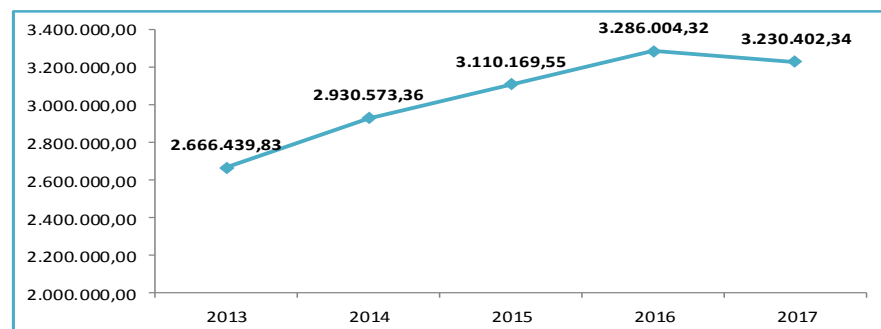


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Dari segi kelistrikan, infrastruktur listrik di Provinsi Kalimantan Timur memang perlu pembenahan, utamanya dalam pendistribusian listrik ke seluruh masyarakat. Oleh karena itu, PLN berusaha meningkatkan produksi tenaga listrik di

setiap tahunnya hingga mencapai 3.286.004,32 MWh pada tahun 2016. Pengguna listrik ini sebagian besar dirasakan oleh rumah tangga yang pada tahun 2016 berjumlah 774.995 rumah tangga dengan kapasitas listrik yang digunakan mencapai 1.801.719.937 MWh. Sementara pada tahun 2017 produksi tenaga listrik sedikit mengalami penurunan, namun jumlah pelanggan listrik rumah tangga tetap mengalami peningkatan.

Gambar 2. 55
Produksi Tenaga Listrik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017 (MWh)

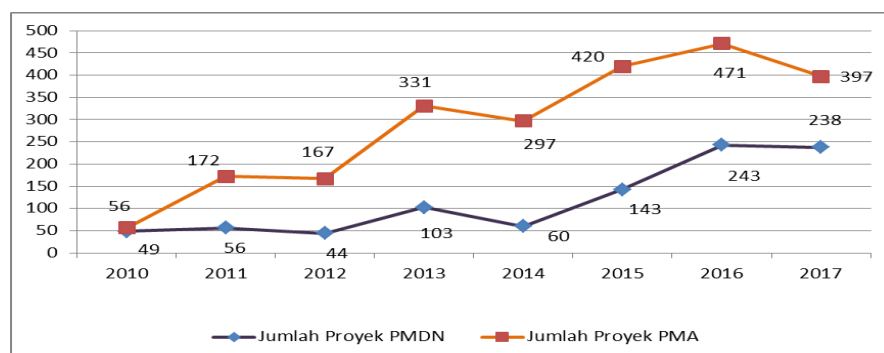


Sumber: PT. PLN Wilayah Kaltimra

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Daya saing daerah dengan fokus iklim berinvestasi sangat terkait dengan penataan ruang, pelayanan perijinan, regulasi daerah, kondisi keamanan berusaha, fasilitas pelayanan perbankan dan pelayanan umum lainnya. Ketertarikan investor untuk menanamkan modalnya di Provinsi Kalimantan Timur cukup tinggi. Sampai dengan tahun 2017, terdapat 936 proyek investasi terdiri dari 238 proyek investasi dari PMDN yang telah menyerap tenaga kerja sebanyak 128.998 orang, dan 397 proyek dari PMA yang telah menyerap tenaga kerja sebanyak 196.635 orang.

Gambar 2. 56
Perkembangan Jumlah Proyek Investasi PMDN dan PMA Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017



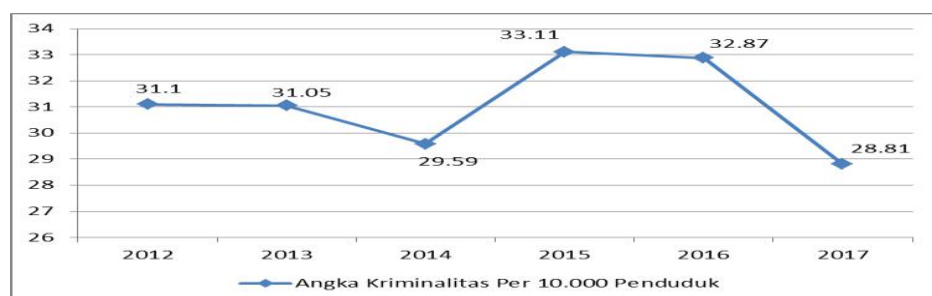
Sumber : DPMPSTSP Prov.Kaltim

Kondisi tata ruang wilayah sangat berpengaruh terhadap iklim berinvestasi terkait dengan kejelasan status lahan dan perijinan pemanfaatan ruang yang didukung oleh kebijakan daerah dalam penerapan insentif dan disinsentif. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur telah menjadi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016. Hal tersebut telah memberikan kejelasan status lahan bagi pengembangan investasi di daerah. Namun demikian, Kalimantan Timur masih menghadapi permasalahan tumpang tindih lahan akibat perijinan yang diterbitkan sebelum RTRWP Kaltim di sahkan. Pengembangan luas lahan produktif yang tumpang tindih terkendala oleh waktu proses penyelesaian sengketa lahan yang cukup panjang. Hal tersebut menuntut pemerintah daerah untuk segera melakukan penataan perijinan dan peninjauan kembali peruntukan ruang yang telah ditetapkan dalam RTRWP Kaltim. Kabupaten/Kota juga dituntut segera menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Zonasi, karena Peraturan Zonasi menjadi dasar hukum dalam penerbitan ijin di tingkat kabupaten/kota.

Kondisi keamanan suatu wilayah juga sangat berpengaruh terhadap daya tarik investor dalam menanamkan modal usahanya di wilayah tersebut. Iklim investasi yang positif dibangun dari kondusifnya wilayah, baik itu segi keamanan, demokrasi, politik, hingga unsur sosial budaya. Adanya jaminan keamanan berinvestasi akan menentukan keberlangsungan dan kekonsistenan gerak perekonomian suatu wilayah sehingga para investor berani menanamkan modal dan pada akhirnya dapat mengembangkan perekonomian wilayah.

Angka kriminalitas di Kalimantan Timur cenderung mengalami penurunan, namun masih dalam posisi tinggi secara nasional. “Pekerjaan Rumah” inilah yang harus dituntaskan oleh aparat penegak hukum agar investor dapat nyaman dan aman dalam menanamkan modalnya di Provinsi Kalimantan Timur.

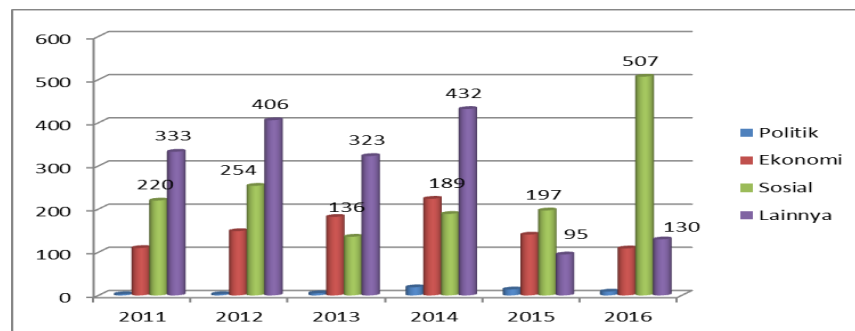
Gambar 2. 57
Angka Kriminalitas Per 10.000 Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2017



Sumber: Polda Kaltim 2017

Persoalan lain yang berpengaruh terhadap iklim investasi adalah demonstrasi. Demonstrasi menunjukkan kebebasan aspirasi masyarakat dalam berpendapat jika dilakukan dengan damai dan tujuan yang jelas. Namun jika demonstrasi dilakukan dengan diiringi kekerasan maka sudah menyalahi konsep dasar sebuah demokrasi. Jumlah demonstrasi di Kalimantan Timur meningkat dalam beberapa tahun terakhir, namun dilakukan dengan damai, ini mengindikasikan tingginya animo masyarakat dalam menyampaikan aspirasi pendapatnya.

Gambar 2. 58
Jumlah Demonstrasi Menurut Jenisnya Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016



Sumber: Polda Provinsi Kaltim Tahun 2016

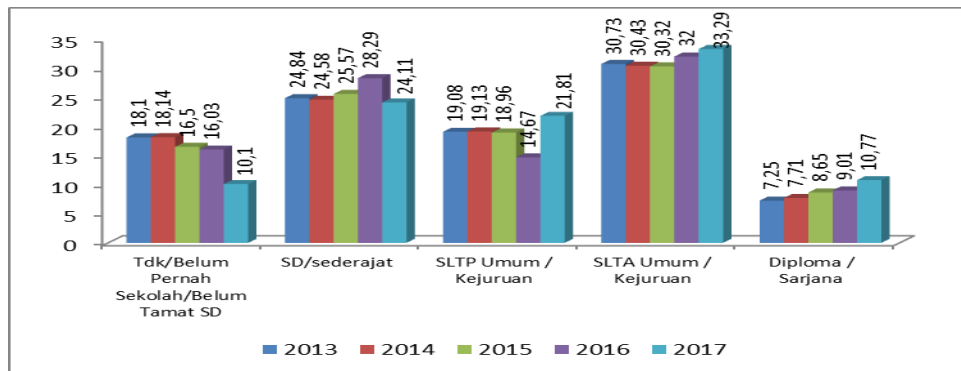
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada daya saing daerah. Untuk mencapai pembangunan yang diinginkan, tidak hanya kuantitas penduduk saja yang dibutuhkan, melainkan sumber daya manusia berkualitaslah yang menjadi harapan utama penyokong pembangunan suatu daerah. Indikator kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh masyarakat. Selain itu, rasio ketergantungan kelompok umur produktif dan non produktif juga dijadikan ukuran kualitas sumber daya manusia.

Penduduk Kalimantan Timur yang telah mengenyam pendidikan hingga bangku perguruan tinggi hanya mencapai 9,01 persen saja, sementara sebagian besar berpendidikan hingga jenjang SLTA (32,00%) dan SD (28,29%), serta masih tingginya masyarakat tidak/belum sekolah/belum tamat SD yang mencapai 16,03 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur masih rendah. Efek dari rendahnya tingkat pendidikan ini akan mempengaruhi minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan keahlian sebagai modal daya saing tenaga kerja. Hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah maupun *stakeholder* terkait untuk mengoptimalkan kembali

program dan kegiatan dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Timur.

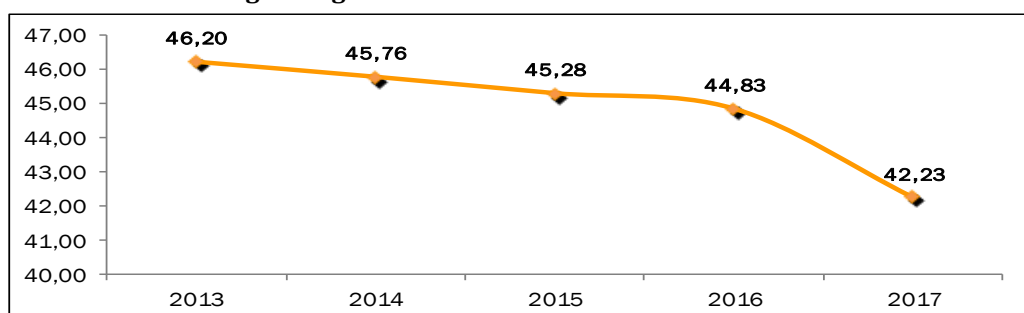
Gambar 2.58
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2018

Produktivitas penduduk, selain dari kualitas pendidikan juga ditentukan oleh kelompok umur dimana terdapat kelompok usia non produktif (<15 tahun dan >64 tahun) dan usia produktif (15-64 tahun). Asumsi umum yang berlaku adalah penduduk usia non produktif akan menjadi beban tanggungan oleh penduduk usia produktif, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Di Provinsi Kalimantan Timur, rasio ketergantungan penduduk non produktif semakin menurun yang mengindikasikan bahwa beban tanggungan masyarakat produktif semakin ringan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung 42-43 orang penduduk usia belum dan tidak produktif. Rasio ini secara konsisten mengalami penurunan, terutama jika dilihat dari tahun 2013 dimana rasio ketergantungan menunjukkan rasio sebesar 46,20.

Gambar 2. 59
Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur,